

LAPORAN INDIVIDU

PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING (PLT)

LOKASI: SMA N 1 PLERET BANTUL YOGYAKARTA

Kedaton, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Kota
Yogyakarta

Disusun dan Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Dalam Mata Kuliah

Praktik Lapangan Terbimbing (PLT)

Dosen Pembimbing Lapangan : Suripno, SH., M.Pd.



Disusun Oleh:

Lisdri Sustiwi

14401241007

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Pengesahan laporan kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di SMA Negeri 1 Pleret :

Nama : Lisdri Sustiwi
NIM : 14401241007
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Telah melaksanakan kegiatan PLT di SMA Negeri 1 Pleret dari tanggal 15 September 2017 sampai dengan 15 November 2017. Hasil seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah tercakup dalam laporan ini.

Bantul, 15 November 2017

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Suripno, S.H., M.Pd

NIP. 195606151986011 001

Guru Pembimbing



Heri Widiati S.Pd

NIP. 19710614 199802 005

Menyetujui,

Kepala SMA N 1 Pleret



Drs. Imam Nurrohmah

NIP 19610823 198703 1 007

Guru Koordinator PLT



Drs. Haryanto, M.Pd

NIP. 19650806 199512 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan PLT UNY 2017 dan menyelesaikan penulisan laporan sebagai gambaran kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan hasil PLT ini meliputi semua kegiatan dan observasi. Selain itu, laporan ini juga memuat masalah-masalah yang dihadapi selama PPL berlangsung. Penulisan laporan adalah tugas individu yang wajib dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa peserta PLT Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Akademik 2017/2018.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan laporan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa bantuan moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Sutrisna Wibawa, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan PLT tahun 2017.
2. Ibu Yuliati, M.Kes selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama melaksanakan kegiatan PLT.
3. Pusat Layanan Praktik Lapangan Terbimbing dan Praktik Kerja Lapangan (PL PLT dan PKL) LPPMP UNY yang telah menyelenggarakan kegiatan PLT UNY 2017.
4. Suripno, SH., M.Pd., SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL jurusan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama PLT berlangsung.
5. Bapak Drs. Imam Nurrohmat selaku Kepala Sekolah SMA N 1 Pleret yang sangat kami hormati, yang telah membimbing kami selama melaksanakan kegiatan PPL UNY tahun 2016.
6. Bapak Drs. Haryanto, M.Pd selaku koordinator PLT SMA N 1 Pleret yang telah membimbing kami selama melaksanakan kegiatan PLT di SMA N 1 Pleret.
7. Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SMA N 1 Pleret atas kerjasamanya selama ini.
8. Seluruh warga SMA N 1 Pleret, khususnya siswa kelas X IPA1, X IPS

- 1, X IPS 2, dan X IPS 3.
9. Keluarga atas segala doa dan bantuannya selama ini, baik moral maupun materiil.
 10. Teman-teman seperjuangan PLT UNY 2017 yang telah memberi semangat dan berbagi suka duka selama kegiatan PLT berlangsung dan atas kebersamaan yang telah terjalin selama ini.
 11. Teman-teman seangkatan jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum yang telah sama-sama berjuang dan saling memberi semangat dan dorongan.
 12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu pelaksanaan kegiatan PLT.

Laporan ini sebagai bukti bahwa penulis telah selesai melaksanakan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT). Namun, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan di laporan ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya, Amin.

Yogyakarta, 15
November 2017 Penulis,

Lisdri Sustiwi
NIM. 14401241007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PPL.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Analisis Situasi	2
C. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PLT	11
BAB II : PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL	
A. Persiapan PLT	16
B. Pelaksanaan PLT (Praktik Lapangan Terbimbing).....	22
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi	27
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan	30
B. Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Observasi Sekolah
- Lampiran 2 Hasil Observasi Kondisi Sekolah
- Lampiran 3 Matriks
- Lampiran 4 Kartu Bimbingan PLT
- Lampiran 5 Agenda Mengajar
- Lampiran 6 Laporan Mingguan Pelaksanaan PLT
- Lampiran 7 Kalender Pendidikan SMA N 1 Pleret
- Lampiran 8 Program Tahunan Kelas X
- Lampiran 9 Program Semester Kelas X
- Lampiran 10 Silabus Kelas X
- Lampiran 11 RPP
- Lampiran 12 Kisi-kisi Ulangan Harian
- Lampiran 13 Soal Ulangan Harian
- Lampiran 14 Kunci Jawaban Ulangan Harian
- Lampiran 15 Daftar Nilai Ulangan Harian
- Lampiran 16 Anbuso
- Lampiran 17 Nilai Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan
- Lampiran 18 Daftar Hadir Siswa
- Lampiran 19 Catatan Harian
- Lampiran 20 Dokumentasi

ABSTRAK

LAPORAN PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING (PLT) DI SMA NEGERI 1 PLERET

OLEH:
Lisdri Sustiwi
14401241007

Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pleret selama dua bulan sejak. Tanggal 15 September 2017 sampai dengan 15 November 2017. Tujuan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman faktual tentang proses pembelajaran dan kegiatan kependidikan lainnya di sekolah, sebagai bekal untuk mengembangkan diri menjadi tenaga yang profesional yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi observasi pembelajaran di kelas yang dilaksanakan pada saat KBM berlangsung dan pembuatan perangkat pembelajaran yaitu membuat analisis hari efektif, program tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, soal dan pedoman penskoran ulangan harian, daftar hadir siswa, dan daftar penilaian. Kegiatan praktik mengajar dimulai dari tanggal 15 September 2017 sampai dengan 15 November 2017.

Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memenuhi target frekuensi mengajar yang telah ditetapkan sebanyak minimal 8 kali pertemuan, adapun praktikan sudah mencapai 26 kali pertemuan. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan PLT selama kurang lebih dua bulan di SMA N 1 Pleret ini dirasa sangat membantu mahasiswa dalam mengetahui kondisi pembelajaran di sekolah secara umum. Selain itu mahasiswa dapat belajar menyusun strategi pembelajaran agar hambatan yang muncul selama pembelajaran dapat diselesaikan. Saran untuk keberhasilan PLT dari praktikan yaitu peningkatan kerjasama yang baik antara pihak universitas, sekolah dan praktikan itu sendiri agar tidak terjadi *miss* komunikasi dalam pelaksanaan PLT.

Kata kunci : PLT, SMA Negeri 1 Pleret

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai salah satu perguruan tinggi yang mempunyai misi dan tugas untuk menyiapkan dan menghasilkan tenaga-tenaga pendidik yang siap dalam bidangnya, mencantumkan beberapa mata kuliah pendukung yang menunjang tercapainya kompetensi, salah satunya yaitu Praktik Pengalaman Lapangan. Kegiatan PLT dapat digambarkan sebagai wahana untuk menerapkan berbagai ilmu yang diterima di bangku perkuliahan yang kemudian diterapkan langsung di lapangan kegiatan PLT ini bertujuan memberikan pengalaman secara nyata mengenai proses pembelajaran dan kegiatan administrasi sekolah lainnya sehingga dapat digunakan sebagai bekal untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional, memiliki sikap ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam bidang keprofesiannya.

Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa UNY yang mengambil jurusan kependidikan, dalam pelaksanaannya, mahasiswa melaksanakan tugas-tugas kependidikan tenaga pendidik dalam hal ini guru yang meliputi kegiatan praktik mengajar atau kegiatan kependidikan lainnya. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa agar dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum terjun ke dunia kependidikan sepenuhnya. Dengan diadakannya PLT ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran. PLT akan memberikan *life skill* dan *soft skill* bagi mahasiswa, yaitu dapat memperluas wawasan, melatih dan mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam bidangnya, meningkatkan keterampilan, kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan dalam memecahkan masalah, sehingga keberadaan program PLT ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai tenaga kependidikan dalam mendukung profesinya dan juga sebagai bekal untuk pengabdian secara penuh di dunia pendidikan maupun dalam masyarakat.

Sebelum dilaksanakan kegiatan PLT ini, mahasiswa sebagai praktikan telah menempuh kegiatan sosialisasi, yaitu pra- PLT melalui mata kuliah Pembelajaran *Micro Teaching* dan observasi SMA Negeri 1 Pleret, Bantul. Dalam pelaksanaan PPL di SMA Negeri 1 Pleret Bantul tahun 2016 terdiri dari 2 mahasiswa jurusan Pendidikan Sosiologi, 2 mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi, 2 mahasiswa

jurusan Pendidikan Matematika, 2 mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah, 2 mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika, 2 mahasiswa jurusan PKnH, 2 mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling, 2 mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi, dan 2 mahasiswa jurusan Pendidikan Kimia, 2 mahasiswa jurusan Pendidikan Seni Rupa, 2 mahasiswa jurusan Pendidikan Seni Tari, 2 mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Jawa, Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan PPL diharapkan dapat dipakai sebagai bekal untuk membentuk calon guru atau tenaga kependidikan yang lebih profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. ANALISIS SITUASI

SMA Negeri 1 Pleret terletak di Dusun Kedaton, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul 55791 Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan observasi yang kami lakukan tanggal 24-27 Agustus 2017, maka hal yang dapat kami simpulkan adalah:

1. Kondisi Fisik

SMA Negeri 1 Pleret Bantul ini berdiri di atas lahan seluas 9.873 m² dan memiliki luas bangunan 5.426 m². Sekolah ini berbatasan secara langsung dengan SMP Negeri 2 Pleret pada sisi timurnya, dan pada bagian selatan sekolah ini berbatasan dengan persawahan penduduk hingga bagian barat sekolah. Selain berbatasan dengan persawahan, pada sisi barat sekolah juga berbatasan dengan kompleks perumahan penduduk. Di sebelah utara berbatasan dengan jalan desa yang juga merupakan sarana akses yang utama menuju SMA Negeri 1 Pleret.

2. Sejarah Singkat dan Profil SMA Negeri 1 Pleret

SMA Negeri 1 Pleret berdiri berdasar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0219/O/1981 tertanggal 14 Juli 1981. Dari beberapa aspek utama dari sisi lingkungan masyarakat dan peserta didik dimana lokasi sekolah dekat dengan pondok, banyak siswa yang bersekolah sekaligus santri atau mondok di sebuah pesantren, maka SMA Negeri 1 Pleret melaksanakan serta mengedepankan program keunggulan lokal yaitu sebagai **Sekolah Model Imtaq** dan mendapat pengakuan berdasarkan SK bersama Departemen Agama nomor: 09/Kpts/20001, dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul nomor: 450/247/III/2001 tertanggal 8 Maret 2001.

SMA Negeri 1 Pleret juga berbangga sekaligus termotivasi karena sekolah ini ditunjuk LPPMP Yogyakarta sebagai sekolah Piloting Penjamin Mutu pada Januari 2011, bersama lima sekolah di DIY. Hal ini menjadikan sekolah lebih berbenah diri terutama dalam kegiatan administrasi yang sebenarnya merasa kurang baik, semoga penunjukkan ini bermanfaat bagi SMA Negeri 1 Pleret.

Sebagai sekolah model Imtaq, SMA Negeri 1 Pleret melaksanakan program peningkatan Imtaq dalam mewujudkan salah satu misinya yaitu meningkatkan iman dan taqwa dalam rangka memperkuat kepribadian peserta didik sebagai insan beragama.

Adapun program-program unggulan lokal yang sampai saat ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pleret adalah sebagai berikut:

- Penambahan jam pelajaran agama yang seharusnya 2 jam menjadi 3 jam tatap muka
- Pelaksanaan Tadarus setiap hari pukul 07.00-07.10 WIB
- Pelaksanaan infaq siswa setiap hari jumat pagi
- Pelaksanaan praktik ceramah ba'da sholat dhuhur
- Pelaksanaan pesantren kilat setiap bulan Ramadhan
- Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, yang mencakup kegiatan:
 - Hadroh
 - Seni baca Al Qur'an
 - Nasyid

Harapan dari keterlaksanaan program Imtaq ini, sekolah akan mampu mencetak putra bangsa yang berbudi luhur dan agamis.

Sejak berdiri hingga kini, SMA Negeri 1 Pleret telah dipimpin oleh beberapa Kepala Sekolah. Kepala Sekolah yang pernah memimpin di SMA Negeri 1 Pleret adalah :

Pertama	: Drs. Suharjo, sejak berdirinya tahun 1981-1982
Kedua	: Drs. Soejadi tahun 1982-1987
Ketiga	: Drs. Warsito tahun 1987-1992
Keempat	: Drs. Eddy Sugiyarto tahun 1992-1996
Kelima	: Drs. Gunakarja tahun 1996-1999
Keenam	: Drs. H. Masharun tahun 1999-2005
Ketujuh	: Drs. H. Suyitno tahun 2005-2009
Kedelapan	: Drs. H. Edison Ahmad Jamli tahun 2009-2012
Kesembilan	: Drs. Ir. Joko Kustanta, M.Pd tahun 2012-2013
Kesepuluh	: Drs. H. Sumiyono, M.Pd tahun 2013-2014
Kesebelas	: Drs. Imam Nurrohmat tahun 2014-sekarang

3. Visi dan Misi

Dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupannya, dan untuk mensukseskan pendidikan tentu SMA Negeri 1 Pleret memiliki Visi dan Misi yang akan menjadi pegangan dan patokan pergerakannya. Visi dan Misi SMA Negeri 1 Pleret adalah:

- 1) Visi : Cerdas dalam Imtaq, Iptek, cinta seni, budaya, dan olahraga.

2) Misi :

- 1) Meningkatkan iman dan taqwa dalam rangka memperkuat kepribadian peserta didik sebagai insan beragama
- 2) Meningkatkan kualitas akademik sehingga mampu melanjutkan ke Perguruan Tinggi
- 3) Menegmbangkan keterampilan peserta didik sesua dengan potensi yang dimiliki sebagai bekal hidup di masyarakat
- 4) Mengembangkan bakat, minat, dan daya kreasi seni untuk melestarikan budaya bangsa yang berkepribadian mulia
- 5) Mengembangkan bakat dan minat berolahraga sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai bekal hidup di masyarakat

3) Tujuan Sekolah

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, SMA Negeri 1 Pleret mengemban tugas yang begitu berat untuk mencerdaskan bangsa.SMA Negeri 1 Pleret ini hanya sebagai sebuah wasilah yang menjadi salah satu jalan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya, SMA Negeri 1 Pleret memiliki tujuan, yaitu :

- 1) Mempersiapkan peserta didik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlaq mulia.
- 2) Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian, cerdas, berkualitas, dan berprestasi dalam bidang olahraga dan seni.
- 3) Membekali peserta didik agar memiliki keterampilan teknologi informasi dan komunikasi serta mampu mengembangkan diri secara mandiri.
- 4) Menanamkan peserta didik sikap ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan sikap sportifitas.
- 5) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan terjun di masyarakat.

4) Sarana dan Prasarana

SMA Negeri 1 Pleret Bantul memiliki sarana dan prasarana gedung sekolah sebagi penunjang kegiatan belajar mengajar.

Tabel 1. Daftar ruang kelas siswa, laboratorium, dan ruang pembelajaran

No.	Ruang Kelas	Jumlah
1.	Kelas X IPA	3
2.	Kelas X IPS	3
3.	Kelas XI IPA	3
4.	Kelas XI IPS	3

5.	Kelas XII IPA	3
6.	Kelas XII IPS	3
7.	Laboratorium Fisika	1
8.	Laboratorium Biologi	1
9.	Laboratorium Kimia	1
10.	Laboratorium TIK	1
11.	AVA (Audio Visual Aid)	1
12.	Ruang OR	1
13.	Ruang Seni Tari	1

Tabel 2. Daftar ruang Kantor

No.	Ruang	Jumlah
1.	Ruang Kepala Sekolah	1
2.	Ruang Wakil Kepala	2
3.	Ruang Guru	1
4.	Ruang Tata Usaha	1

Tabel 3. Ruang penunjang lainnya

No.	Ruang	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Aula	1
3.	Ruang Koperasi	1
4.	Ruang OSIS	1
5.	Perpustakaan	1
6.	Ruang BP/BK	1
7.	Ruang UKS	1
8.	Lapangan Bola Volly	1
9.	Lapangan Bola Basket	1
10.	Lapangan Tenis	1
11.	Bak Pasir Lompat Jauh	1
12.	Lapangan upacara	1
13.	Dapur	1
14.	Gudang	1
15.	WC Siswa	4
16.	WC Guru	1

17.	WC Kepala Sekolah	1
18.	Kantin	2
19.	Ruang Piket	1
20.	Ruang posko Tatib	1
21.	Tempat parkir guru	1
22.	Tempat parkir TU	1
23.	Tempat parkir siswa	2
24.	Ruang peralatan olahraga	1
25.	Studio Band	1

5) Kondisi Lingkungan

Berdiri di Desa Pleret, merupakan ibukota kecamatan Pleret adalah sebuah keuntungan tersendiri bagi sekolah. Sebab dengan berada di ibukota kecamatan, maka tentu memiliki aksesibilitas yang memadai. Selain itu juga berdekatan dengan sarana dan prasarana umum. posisi sekolah sangat strategis, karena berada dekat dengan jalan utama kabupaten yang memiliki dua jalur kendaraan umum yaitu jalur Giwangan dan jalur Imogiri. Dengan demikian tentu memberikan keuntungan juga bagi para siswa yang tidak membawa kendaraan pribadi dapat menggunakan angkutan umum.

Selain itu, karena lokasi sekolah yang masih masuk ke daerah pedesaan dan dekat dengan areal persawahan menjadikan suasana belajar mengajar menjadi sangat kondusif dan menyenangkan. Mengingat SMA Negeri 1 Pleret merupakan sekolah negeri dengan model Imtaq, maka suasana religius yang muncul begitu terasa dan tercermin dalam semua kegiatan yang dilaksanakan di sekolah.

6) Kondisi Non-Fisik Sekolah

1) Potensi siswa

Potensi siswa di SMA N 1 Pleret Bantul tergolong sudah baik, karena sekolah ini merupakan sekolah bermodelkan IMTAQ.

2) Potensi Guru

Jumlah guru di SMA N 1 Pleret Bantul memiliki 48 orang guru.

Tabel 4. Daftar nama guru beserta bidang studi

No	Nama	Status Pegawai	Bidang Studi
1	Drs. Imam Nurrohmat	PNS	Ekonomi
2	Dra. L. Sri Waluyajati	PNS	Matematika
3	Siti Djufroiah, S.Pd.	PNS	Kimia
4	Kus Dewanti, S.Pd.	PNS	Bahasa Indonesia

5	Dra. Vera Afri Iswanti	PNS	Bahasa Inggris
6	Dra. Sri Nurdiyanti	PNS	Biologi
7	Muryani, BA	PNS	Penjas Orkes
8	Hj. Musthofiyah, S.Pd.	PNS	Matematika
9	Siti Mahsunah, BA	PNS	Pend. Agama Islam
10	Dra. Hj. Retnani Sulistyowati, M.Pd.	PNS	Sosiologi
11	A.Yulita Hidayani	PNS	Pend.Agama Katolik
12	Dra. Titik Kuntartiningtyas	PNS	Bahasa Indonesia
13	Drs. Sriyanto	PNS	Elektronika
14	Edi Purwanta, S.Pd.	PNS	Biologi
15	Sri Marwanto, S.Pd.	PNS	Matematika
16	Dra. Siti Mufarokhah	PNS	Sejarah
17	Dra. Budiarti	PNS	Ekonomi/Akuntansi
18	Hj. Tri Lestari, S.Pd. M.Pd	PNS	Sejarah
19	Salimuddin, S.Ag	PNS	Pend. Agama Islam
20	Jarot Sunarna, S.Pd	PNS	Kewarganegaraan
21	Yuniatun, S.Pd	PNS	Fisika
22	Drs. Haryanto, M.Pd	PNS	Matematika
23	Ristiyanti, S.Pd	PNS	Kesenian Tari
24	Susi Purwestri, S.Pd	PNS	Ekonomi
25	Dara Zukhana, S.Pd	PNS	Bhs. Inggris
26	Sumartiani, S.Pd	PNS	Fisika
27	Ristina Ferawati, S.Pd	PNS	Biologi
28	Heri Widayati, S.Pd	PNS	PPKn
29	Drs. H. Basuki	PNS	Sejarah
30	Dwi Mas Agung Basuki,	PNS	Seni rupa
31	S.Pd	PNS	Keterampilan Menjahit
32	Rusyani, S.Pd	PNS	Bimbingan Konseling
33	Drs. Rusdiyanto	PNS	Bhs. Inggris
34	Hanifah Riastuti, S.Pd	PNS	Geografi
35	Sri Purwanti, S.Pd	PNS	Kimia
36	Sudaryanti, S.Pd	PNS	Bhs. Jawa
37	Naning Tyastuti, S.Pd	PNS	Bhs. Indonesia
38	Mujiran, S.Pd	PNS	Bimbingan Konseling
39	Siti Qomariyah, S.Pd	PNS	Geografi
40	Drs. Wiyono	PNS	Bhs. Inggris

41	Umi Sa'diyah, S.Pd	PNS	Bhs. Indonesia
42	Drs. Suhana, M. Hum	PNS	Sosiologi
43	Afiri Novi Kurniawan, S.Pd	PNS	TIK
44	M. Tsawabul Latif, S.Kom	PNS	Penjas-Orkes
45	Ika Dita Kusuma, S.Pd	PNS	Pend. Agama Kristen
46	Sujodo	PNS	TIK
47	Mukhlis Amir, S.Kom	PNS	Bhs. Jawa
48	Devi Listriyani, S.Pd Anwar, S.Si.	PNS	Sosiologi

3) Potensi Karyawan

SMA N 1 Pleret mempunyai banyak karyawan, yakni Tata Usaha, Petugas Perpustakaan, Petugas Laboratorium, Karyawan Kantin dan Pemelihara Sekolah.

Tabel 5. Daftar nama karyawan beserta jabatan

No	Nama	Status Pegawai	Jabatan Tugas yang dilakukan
1	Ngatijo, A.Md.	PNS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Tata Usaha 2. Membuat program kerja TU 3. Membuat pembagian tugas TU 4. Mengkoordinasikan tugas TU 5. Bendahara Iuran Rutin/SPP 6. Membuat LPJ BOP
2	Yono Dwi Yanto	PNS	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan gaji pegawai b. Membagikan gaji pegawai c. Mengajukan tambahan penghasilan d. Mengisi buku induk pegawai e. Membuat laporan kepegawaian f. Membantu waka kurikulum
3.	Hanu Hudodo	PNS	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengagendakan surat masuk/keluar b. Menyiapkan dan merekap presensi guru dan karyawan c. Membuat amplop d. Menyiapkan ederan siswa

			e. Membuat laporan kesiswaan
4.	Darmadi	PNS	a. Mengisi buku inventar b. Memberi kode inventaris barang c. Membuat daftar inventaris ruang d. Membuat laporan triwulan/tahunan e. Menyiapkan peralatan upacara
5.	Sumardi	PNS	a. Menyiapkan dan membersihkan alat praktikum kimia b. Membersihkan ruang laborat kimia c. Penggandaan d. Membantu menyiapkan alat upacara
6.	Harmanto	PTT	a. Kebersihan halaman depan s.d. belakang, selokan, tempat parkir guru/karyawan dan siswa b. Kebersihan masjid dan aula c. Membersihkan laborat biologi d. Membersihkan/mengangkut sampah
7.	Subardi	PTT	a. Membersihkan ruang kasek, wakasek dan ruang guru b. Membuat minuman guru/karyawan/t c. Membantu penggandaan d. Menyiapkan tempat rapat
8.	Purnadi	PTT	a. Kebersihan halaman depan s.d. belakang, selokan, tempat parkir b. Kebersihan WC siswa sebelah selatan c. Membersihkan/mengangkut sampah

			d. Kebersihan masjid dan aula
9.	Esturhana	PTT	a. Menjaga keamanan sekolah b. Membersihkan Ruang AVA c. Mebersihkan sekitar rumah d. Jaga malam e. Menyapu tempat parkir guru/karyawan
10.	Bambang Hanung	PTT	Jaga Malam
11.	Sutrisna	PTT	a. Mengatur dan menjaga keamanan kendaraan siswa b. Membuka dan menutup pintu gerbang c. Memandu tamu d. Membersihkan ruang piket dan ruang tatib
12	Setya Budi Prasetya, A.Md	PTT	a. Mengisi buku inventaris perpus b. Membuat klasifikasi buku c. Memberi kode buku d. Memperbaiki buku yang rusak
13	Vivin Isnuanita, S.Si.	PTT	a. Membuat administrasi laborat biologi b. Membantu menyiapkan peralatan praktik biologi c. Membersihkan perlatan laborat d. Kebersihan, keindahan dan ketertiban ruang laborat biologi dan sekitarnya

4) Kegiatan Ko-Kurikuler dan Ekstrakurikuler

Di SMA Negeri 1 Pleret juga diadakan beberapa kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh para siswa sesuai dengan bakat dan

minatnya, antara lain:

- 1) Basket
- 2) Sepakbola
- 3) Musik/Band
- 4) Bola volley
- 5) Teater
- 6) Seni baca Al-Qur'an
- 7) Nasyid
- 8) Pencak silat
- 9) Paduan suara
- 10) PMR
- 11) English Conversation
- 12) KIR
- 13) Pramuka

C. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PLT

Kegiatan PLT dilaksanakan untuk menerapkan hasil pendidikan yang telah diperoleh selama kuliah guna mendapatkan pengalaman di luar proses pembelajaran di kelas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keterampilan pendidikan secara langsung agar profesionalisme dan kompetensi sebagai calon pendidik dapat berkembang.

Rumusan Program dan Rancangan kegiatan PLT disusun setelah mahasiswa melakukan observasi di kelas. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa di kelas, serta lingkungan sekitar dengan maksud agar pada saat PLT mahasiswa benar-benar siap melakukan praktik mengajar.

Setelah melakukan analisis situasi, praktikan merumuskan program dan rancangan kegiatan PLT yang dapat dijabarkan dalam beberapa agenda kegiatan:

a. Pengembangan Perangkat Pembelajaran

- 1) Menyusun Prota, Prosem dan Silabus

Perangkat pembelajaran yang dibuat meliputi: Analisis minggu efektif KBM, Program Tahunan, Program Semester, dan Silabus. Hal ini di bawah bimbingan guru pembimbing di sekolah.

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Sebagai persiapan mengajar praktikan harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disesuaikan dengan silabus. Dalam penyusunan RPP, praktikan mengkonsultasikan dengan guru pembimbing. RPP dibuat untuk satu kali pertemuan (dua jam pelajaran) atau disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai rencana atau tidak menyimpang dari kurikulum yang ada.

3) Persiapan Materi Ajar dan Pengembangan Media Pembelajaran

Materi mengajar harus dipersiapkan sedemikian rupa agar pada saat melakukan praktik mengajar, praktikan dapat tampil dengan tenang dan maksimal karena telah menguasai materi yang akan disampaikan. Media pembelajaran merupakan faktor penunjang keberhasilan suatu kegiatan belajar mengajar. Praktikan mengembangkan media pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi siswa dan fasilitas sekolah.

Pembuatan media dalam pembelajaran mendukung proses belajar mengajar itu sendiri. Siswa tidak hanya berfikir secara abstrak namun dalam kegiatan pembelajaran dapat melihat contoh konkret dari substansi materi yang diberikan oleh praktikan. Dengan adanya media pembelajaran, praktikan lebih mudah dalam mengkomunikasikan materi dan siswa lebih mudah dalam memahami pembelajaran.

Pembuatan media dalam pembelajaran mendukung proses belajar mengajar itu sendiri. Siswa tidak hanya berfikir secara abstrak namun dalam kegiatan pembelajaran dapat melihat contoh konkret dari substansi materi yang diberikan oleh praktikan. Dengan adanya media pembelajaran, praktikan lebih mudah dalam mengkomunikasikan materi dan siswa lebih mudah dalam memahami pembelajaran.

Sedangkan pengembangan metode pembelajaran, mempunyai tujuan siswa menjadi tidak bosan dalam proses pembelajaran. Selain itu kegiatan belajar mengajar lebih bervariasi dan tidak monoton. Metode pembelajaran disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, sehingga siswa lebih antusias dalam mengikuti pelajaran.

b. Melaksanakan Praktik Mengajar di Kelas

Tahap ini dari praktek pengalaman lapangan adalah latihan mengajar di kelas. Pada tahap ini mahasiswa praktikan diberikan kesempatan untuk

menggunakan seluruh kemampuan dan keterampilan mengajar yang diperoleh dari pengajaran mikro.

Sebelum melakukan praktik mengajar mahasiswa praktikan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan mata pelajaran yang akan diajarkan dan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran.

Pada saat praktik mengajar, praktikan melaksanakan praktik mengajar terbimbing dan mandiri dengan dibimbing oleh guru pembimbing. Praktik mengajar dilakukan setelah berkonsultasi dengan guru pembimbing dengan materi dan rencana pembelajaran. Guru pembimbing memberikan waktu mengajar di kelas X IPA 1, X IPS 1, X IPS 2, dan X IPS 3. Kesempatan mengajar diberikan guru pembimbing adalah 12 kali pertemuan termasuk ulangan Harian untuk kelas X IPA 1 dan X IPS 3, dan satu kali pertemuan dengan kelas X-IPA 2.

c. Mengadakan Evaluasi Pembelajaran

Sebagai rangkaian dari kegiatan belajar mengajar, mahasiswa praktikan harus melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh praktikan selama kegiatan mengajar dilakukan. Di samping itu evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan praktikan didalam menyampaikan materi kepada peserta didik.

d. Melaksanakan Administrasi Guru

Mahasiswa praktikan selain melakukan praktik mengajar dan evaluasi terhadap peserta didik juga wajib melakukan administrasi guru seperti pengisian presensi siswa.

e. Praktik Persekolahan

Berbagai macam kegiatan dilaksanakan oleh mahasiswa selama melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan adalah membenahan administrasi kurikulum, piket, PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah) bagi siswa baru, HUT Sekolah, dan upacara bendera. Secara lebih rinci, praktik persekolahan yang akan dilakukan oleh mahasiswa PLT antara lain:

1) Piket Ruang Guru

Tujuan: Membantu dalam mengerjakan piket guru

Kegiatan:

- a) Mendata siswa yang terlambat, siswa yang mau ijin keluar
 - b) Membunyikan bel tanda mulai pelajaran, pergantian jam pelajaran, dan selesai jam pelajaran di sekolah
 - c) Memberikan surat- surat yang masuk ke ruang TU
 - d) Memberikan tugas guru yang tidak masuk dan surat ijin siswa
 - e) Menerima telepon yang bersangkutan dengan kepentingan sekolah (informasi)
- 2) Piket TU (Tata Usaha) / Administrasi Sekolah

Tujuan: Membantu TU dalam mengerjakan tugas

Kegiatan:

- a) Mengurutkan data siswa tahun ajaran 2017/2018
 - b) Mengurutkan surat-surat yang masuk ke sekolah berdasarkan abjad dan juga tanggal
- 3) Piket Perpustakaan

Tujuan: Membantu karyawan perpustakaan

Kegiatan:

- a) Memantau keadaan perpustakaan
- b) Menginventaris buku perpustakaan
- c) Merapikan buku di rak perpustakaan
- d) Menyampul dan memberi stempel pada buku-buku baru

f. Penyusunan Laporan PLT

Setelah melakukan praktik mengajar, praktikan diharuskan menyusun laporan PLT sebagai syarat kelulusan mata kuliah lapangan ini. Laporan ini berisi mengenai kegiatan praktikan di SMA Negeri 1 Pleret yang berkaitan dengan program praktik mengajar.

g. Penarikan PLT

Kegiatan penarikan PLT dilakukan pada tanggal 15 November 2017 yang sekaligus menandai berakhirnya kegiatan PLT di SMA Negeri 1 Pleret.

BAB II
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL
KEGIATAN PLT

A. Persiapan Program dan Kegiatan PLT

Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program S1 kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahap-tahap kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan PLT adalah:

1. Pengajaran Mikro (*Microteaching*)

Praktik pengajaran mikro yang dilaksanakan mulai bulan Februari hingga Juni 2017 bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai praktik pengajaran di kelas. Dalam kegiatan ini, mahasiswa melakukan latihan mengajar sesama mahasiswa yang berperan sebagai murid (*peer teaching*).

Praktik pengajaran mikro meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Merancang perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dan media pembelajaran.
- b. Praktik membuka pelajaran.
- c. Praktik mengajar dengan metode yang dianggap sesuai dengan materi yang disampaikan.
- d. Praktik menyampaikan materi yang berbeda-beda.
- e. Praktik keterampilan dasar mengajar.
- f. Teknik bertanya kepada siswa.
- g. Praktik efisiensi alokasi waktu dan penguasaan kelas.
- h. Praktik mengajar teori di kelas dengan bahasa baku dan jelas.
- i. Praktik mengajar di laboratorium
- j. Praktik mengajar di lapangan dengan media realia (nyata)
- k. Praktik menggunakan media pembelajaran (LCD dan Proyektor).
- l. Praktik menutup pelajaran

Dalam satu kesempatan melaksanakan praktik pembelajaran mikro mahasiswa diberi kesempatan selama 20 menit. Setelah selesai melaksanakan praktik pembelajaran mikro, mahasiswa diberi pengarahan atau koreksi mengenai kekurangan, kesalahan dan kelebihan mahasiswa dalam

mengajar serta masukan-masukan mengenai strategi mengajar yang lebih tepat. Jadi, dengan pembelajaran mikro mahasiswa dapat mempersiapkan dirinya untuk dapat mengajar dengan lebih baik dan benar.

2. Pembekalan PLT

Sebelum terjun ke lapangan dalam rangka PLT, diperlukan kesiapan diri baik fisik, mental, maupun materi yang nantinya dibutuhkan dalam pelaksanaan PLT. Oleh karena itu, selain praktik pengajaran mikro, mahasiswa calon praktikan dibekali dengan materi tambahan yang berupa pembekalan PLT.

Pembekalan yang dilakukan ini juga menjadi persyaratan khusus untuk bisa mengikuti PLT atau terjun ke lokasi di semester khusus ini. Oleh karena itu, bagi mahasiswa yang belum mengikuti pembekalan tidak diperbolehkan terjun ke lokasi PLT.

Pembekalan dilaksanakan dua kali untuk seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah PLT di semester khusus, yaitu di tingkat fakultas yang dipimpin oleh Koordinator PLT fakultas. Pembekalan dari fakultas dilakukan satu kali sebelum berjalannya kegiatan PLT, sedangkan pembekalan dengan DPL PLT dilaksanakan sebelum dan selama PLT berlangsung. Jadi, selama program PLT berlangsung, mahasiswa berhak untuk tetap berkonsultasi dengan DPL PLT masing-masing.

3. Kegiatan Observasi

Observasi lapangan merupakan kegiatan pengamatan terhadap berbagai karakteristik, komponen pendidikan serta norma yang berlaku di sekolah yang nantinya sebagai tempat duduk PLT. Hal ini dilakukan dengan pengamatan ataupun wawancara dengan tujuan agar mahasiswa memperoleh gambaran yang nyata tentang praktek mengajar dan lingkungan persekolahan. Observasi ini meliputi dua hal, yaitu:

a. Observasi Pembelajaran di Kelas

Dalam pelaksanaan praktik pembelajaran, terlebih dahulu dilakukan observasi proses pembelajaran di lokasi SMA Negeri 1 Pleret. Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang proses belajar mengajar, ajang latihan mahasiswa bagaimana memberikan materi, mengelola kelas dan lain-lain yang kaitannya dengan proses belajar mengajar di sekolah termasuk perilaku siswa di dalam kelas.

Observasi pembelajaran di kelas dilakukan oleh mahasiswa praktikan terhadap proses pembelajaran di kelas X yang diampu oleh Ibu Heri Widayati, S.Pd. Kegiatan observasi pembelajaran di kelas dilakukan sebanyak tiga kali, yang menjadi pandangan dalam melakukan observasi di kelas selain bagaimana cara guru mengajar juga meneliti bagaimana perilaku siswa ketika menerima pelajaran dari guru. Hal ini dilakukan agar mahasiswa praktikan bisa memiliki pandangan tentang bagaimana proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Pleret. Dalam kegiatan observasi pembelajaran, aspek-aspek yang diamati meliputi:

- 1) Cara membuka pelajaran
- 2) Memberikan apersepsi dalam mengajar
- 3) Penyajian materi
- 4) Teknik bertanya
- 5) Bahasa yang digunakan dalam KBM
- 6) Memotivasi dan mengaktifkan siswa
- 7) Memberikan umpan balik terhadap siswa
- 8) Penggunaan metode dan media pembelajaran
- 9) Penggunaan alokasi waktu
- 10) Pemberian tugas dan cara menutup pelajaran

Melalui kegiatan observasi di kelas ini mahasiswa praktikan dapat:

- 1) Mengetahui situasi pembelajaran yang sedang berlangsung.
- 2) Mengetahui kesiapan dan kemampuan siswa dalam menerima pelajaran.
- 3) Mengetahui metode, media, dan prinsip mengajar yang digunakan guru dalam proses pembelajaran.

Meskipun hasil yang dapat dicapai dalam kegiatan ini hanya bersifat umum dan kurang lengkap, tetapi sudah cukup memberikan gambaran tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Pleret.

b. Observasi Perilaku Siswa di Luar Kelas

Siswa SMA Negeri 1 Pleret berpakaian rapih dan sesuai dengan aturan berpakaian yang ditentukan oleh sekolah. Sebagian besar siswi yang beragama islam mengenakan hijab. Sopan santun siswa yang dimiliki siswa dalam menghargai dan menghormati guru baik di dalam kelas maupun di luar kelas cukup baik, Saling bertegur sapa dan menebar

senyum apabila bertemu telah menjadi adab yang senantiasa dilakukan meskipun ada beberapa siswa yang terkesan acuh namun sebagian besar telah bersikap baik antar sesama dan terhadap guru dan karyawan.

Hubungan yang dibangun antara guru dan siswa di lingkungan bisa bersifat rasional dan emosional. Mengingat akan hal tersebut, maka peran aktif guru sebagai orang tua kedua bagi siswa sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati, motivator dan juga sebagai contoh teladan perlu untuk ditingkatkan. Disinilah arti penting dari kedekatan hubungan emosional antara guru dengan siswa.

B. Pelaksanaan Praktik Lapangan TERBIMBING (PLT)

Praktik Pembelajaran Lapangan mengajarkan mahasiswa PLT mendapatkan pengalaman mengajar di luar kampus terutama pengalaman mengajar di dalam kelas dan kehidupan di sekolah. Kegiatan PLT meliputi :

1. Penyusunan Perangkat Pembelajaran

Penyusunan perangkat pembelajaran wajib di buat oleh mahasiswa PLT sebelum melaksanakan praktik mengajar di dalam kelas. Pembuatan perangkat pembelajaran akan di bimbing oleh guru pembimbing yang di jadikan tempat PLT, untuk guru pembimbing mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Pleret kelas X adalah Ibu Heri Widayati, S.Pd.

Salah satu perangkat pembelajaran yang di bimbing dalam pembuatannya adalah pembuatan RPP di mana di dalam RPP berisi tentang :

- a) Identitas Sekolah / instansi terkait
- b) Identitas mata pelajaran
- c) Standar Kompetensi
- d) Kompetensi dasar
- e) Indikator pembelajaran
- f) Tujuan pembelajaran
- g) Nilai kepribadian yang di munculkan
- h) Materi pembelajaran
- i) Metode pembelajaran
- j) Strategi pembelajaran
- k) Sumber belajar
- l) Alat dan bahan
- m) Penilaian yang terdiri atas :
 - Model penilaian

- Lembar penilaian

Aspek penilaian yang dilakukan mahasiswa PLT di dalam kelas, terdiri atas 3 aspek yaitu penilaian afektif, penilaian kognitif dan penilaian psikomotorik. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan sebab ketika mahasiswa melaksanakan penilaian dalam 1 aspek maka secara tidak langsung dua aspek penilaian lainnya ikut ternilai. ketiga penilaian dalam pembelajaran di dalam kelas maupun luar kelas memiliki fungsi atau tujuan penilaian yang berbeda seperti :

- a) Aspek penilaian psikomotorik merupakan penilaian yang menekankan kepada kemampuan peserta didik dalam mengeluarkan argumen dan menanggapi sebuah argument di dalam kelas biasanya peserta didik akan terpancing mengeluarkan argument ketika terjadi diskusi kelas.
- b) Aspek penilaian efektif menekankan penilaian sikap peserta didik di dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Biasanya butir - butir penilaian efektif seperti kedisiplinan, percaya diri, tanggung jawab peserta didik.
- c) Aspek kognitif merupakan penilaian peserta didik terhadap kemampuan menjawab pertanyaan atau evaluasi dengan bentuk tertulis dan lisan. Sarana yang digunakan untuk penilaian kognitif secara tertulis adalah berupa soal pretest, posttest dan ulangan harian.

2. Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan oleh mahasiswa PLT untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Media pembelajaran sangat bervariasi, salah satu media pembelajaran yang sederhana dan selalu di gunakan adalah spidol, papan tulis, selain kedua media tersebut terdapat juga media pembelajaran yang lain yaitu mikroskop, berbagai macam spesies terung, berbagai macam spesies cabai, power point yang berisi gambar varietas mangga dan powerpoint materi terkait. Selain itu metode yang digunakan adalah praktik secara langsung dengan pemeragaan.

3. Alat Evaluasi

Alat evaluasi pembelajaran yang digunakan adalah berupa pre-test, soal - soal latihan, penugasan, dan ulangan harian. Alat evaluasi berfungsi mengukur kemampuan peserta didik dalam menyerap dan memahami materi yang di sampaikan oleh mahasiswa PLT. Biasanya hasil evaluasi menunjukkan peserta didik yang paham dan begitu paham terhadap materi pembelajaran, selain itu alat evaluasi juga berfungsi menilai

mahasiswa PLT dalam menyampaikan materi kepada peserta didik dilihat dari hasil evaluasi peserta didik semakin banyak peserta didik yang tuntas maka kemampuan mahasiswa PLT menyampaikan materi terbilang baik dan sebaliknya.

4. Pelaksanaan Praktik Mengajar

Pada pelaksanaan praktik pembelajaran, mahasiswa harus mengaplikasikan teori-teori tentang pembelajaran yang telah diproses selama di bangku kuliah, baik itu menyangkut materi, teknik, metode pendekatan, maupun evaluasi. Di dalam praktikan mengajar ini, secara teori mahasiswa diwajibkan melaksanakan praktik pembelajaran minimal sebanyak 8 pertemuan. Dalam PLT ini praktikan diberi kesempatan mengajar 4 kelas yaitu kelas X IPA 1, X IPS 1, X IPS 2, dan X IPS 3. Secara faktual mahasiswa melaksanakan praktik pembelajaran sebanyak 26 kali pertemuan pada beberapa kelas yang berbeda, rincian pertemuan sebagai berikut:

No	Hari / Tanggal	Kelas	Jam ke	Materi
1.	Jum'at, 24 september 2017	X IPS 2	1-2	Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia
2.	Jum'at, 24 september 2017	X IPS 1	3-4	Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia
3.	Selasa, 3 Oktober 2017	X IPS 3	3-4	Kewenangan Lembaga-lembaga Negara
4.	Rabu, 4 Oktober 2017	X IPA 1	7-8	Kewenangan Lembaga-lembaga Negara
5.	Jumat, 8 Oktober 2017	X IPS 2	1-2	Kewenangan Lembaga-lembaga

6.	Selasa, 10 Oktober 2017	X IPS 3	3-4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia
7.	Rabu, 11 Oktober 2017	X IPA 1	7-8	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia
8.	Jumat, 13 oktober 2017	X IPS 1	3-4	Kewenangan Lembaga-lembaga Negara
9.	Sabtu, 14 Oktober 2017	X IPA 2	3-4	Kewenangan Lembaga-lembaga
10.	Selasa, 17 Oktober 2017	X IPS 3	3-4	Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
11.	Rabu , 18 Oktober 2017	X IPA 1	7-8	Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
12.	Jumat, 20 Oktober 2017	X IPS 1	3-4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia
13.	Jum'at, 27 Oktober 2017	X IPS 2	1-2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia
14.	Jum'at, 27 Oktober 2017	X IPS 1	3-4	Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
15	Sabtu,28 Okttober 2017	X IPA 2	3-4	mengerjakan soal LKS Uji Kompetensi 1,2, dan 3 Bab 3.
16	Selasa, 31 Oktober 2017	X IPS 3	3-4	Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
17	Rabu, 1 November 2017	X IPA 1	7-8	Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
18	Selasa, 24 Oktober 2017	X IPS 3	3-4	Kedudukan dan peran pemerintah pusat
19.	Rabu, 25 Oktober 2017	X IPA 1	7-8	Kedudukan dan peran pemerintah pusat

20	Jum'at, 3 November 2017	X IPS 2	1-2	Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21	Jum'at, 3 November 2017	X IPS 1	3-4	Kedudukan dan peran pemerintah pusat
22	Selasa, 7 November 2017	X IPS 3	3-4	hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah
23	Rabu, 8 November 2017	X IPA 1	7-8	Ulangan Harian Bab 4 "Hubungan pemerintah pusat dan daerah".
24	Jum'at, 10 November 2017	X IPS 2	1-2	Kedudukan dan peran pemerintah pusa
25	Jum'at, 10 November 2017	X IPS 1	3-4	Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
26	Selasa, 14 November 2017	X IPS 3	3-4	Ulangan Harian Bab 4 "Hubungan pemerintah pusat dan daerah".
Total Jam				58 Jam

Proses praktik mengajar di dalam kelas terdiri dari beberapa tahapan pembelajaran diantaranya adalah :

a) Membuka pelajaran

Membuka pelajaran, mahasiswa PLT melakukan kegiatan seperti berdoa bersama sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, salam pembuka, memeriksa kondisi kelas, mempresensi peserta didik untuk mengecek peserta didik yang hadir dan tidak hadir, memeriksa kesiapan peserta didik dalam mengikuti dan menerima Pelajaran PKn, memotivasi peserta didik, memberikan apersepsi terlebih, menyampaikan SK dan KD yang harus di capai oleh peserta didik dilanjutkan dengan pre test. Pre test selalu dilaksanakan sebelum masuk ke materi selanjutnya, hal ini ditujukan supaya siswa mempersiapkan terlebih dahulu setidaknya dengan membaca materi selanjutnya, selain itu pre test juga sangat baik untuk melihat progress pencapaian atau perkembangan siswa dalam mempersiapkan dan menyerap materi yang disampaikan.

b) Penyajian materi

Materi yang di sampaikan sesuai dengan standar kompetensi

(SK) dan kompetensi dasar (KD), selain itu untuk mempermudah penyampaian materi mahasiswa PLT menggunakan metode dan media yang memudahkan peserta didik menerima dan mencerna materi pelajaran.

c) Interaksi dengan peserta didik

Interaksi dengan peserta didik terjadi saat kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, interaksi tersebut berupa interaksi antara pendidik dan peserta didik ataupun peserta didik dengan peserta didik lainnya.

Peran pendidik saat interaksi di dalam kelas pada kegiatan belajar mengajar adalah sebagai fasilitator dan mengontrol situasi kelas yang menjadi prioritas utama. Kurikulum K13 menuntut peserta didik lebih berperan aktif, dimana peserta didik berusaha mencari dan menjelaskan materi yang dianggap oleh peserta didik belum di ketahui, selain itu peserta didik dituntut untuk ikut aktif berfikir dan terlibat dalam proses belajar mengajar. Di samping proses belajar mengajar berlangsung pendidik / mahasiswa PLT melakukan penilaian kepada peserta didik.

d) Penutup

Kegiatan penutup biasanya dilakukan setelah pendidik memberikan materi. Penutup pelajaran terlebih dahulu pendidik menanyakan kembali materi yang baru saja di jelaskan. Kemudian antara peserta didik dan pendidik sama - sama menyimpulkan pelajaran yang telah di sampaikan. Pendidik juga menyampaikan tugas atau materi berikutnya yang akan di bahas pada pertemuan berikutnya.

5. Membuat Ulangan Harian

Membuat soal ulangan harian yang akan diujikan, terlebih dahulu mahasiswa membuat kisi-kisi. Setelah membuat kisi-kisi barulah dibuat soal sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator pencapaian. Setelah soal selesai dibuat kemudian dikonsultasikan kepada guru pembimbing sebelum diujikan kepada siswa. Adapun jumlah soal yang akan diujikan kepada siswa ada 15 butir soal pilihan ganda dan 5 butir soal essay dengan waktu pengerjaan 90 menit.

6. Mengoreksi Hasil Tugas dan Ulangan Harian

Kegiatan ini dilakukan setelah siswa mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh mahasiswa baik tugas kelompok maupun individu. Pengecekan jawaban ulangan harian dilakukan setelah siswa mengumpulkan hasil kerja mereka. Penilaian dilakukan mahasiswa disela-sela waktu kosong, sedangkan bobot penilaian dengan skala 0-100.

7. Merekap Nilai dan Analisis Butir Soal

Hasil ulangan harian siswa juga direkap, termasuk jumlah jawaban benar dan salah serta skor total pada setiap tipe soal. Setelahnya dilakukan analisis butir soal menggunakan master ANBUSO dengan program Ms.Excel. Kemudian nilai-nilai tugas di masukkan ke dalam lembar penilaian yang telah ada. Analisis soal dilakukan untuk mengetahui seberapa baik dan soal yang telah dibuat oleh mahasiswa, apakah kemudian layak untuk diujikan kembali atau tidak.

8. Evaluasi dan Bimbingan

Guru pembimbing sangat berperan bagi praktikan, karena sebagai mahasiswa yang sedang berlatih mengajar, banyak sekali kekurangan dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu umpan balik dan bimbingan dari guru pembimbing sangat dibutuhkan guna perbaikan pratikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guru pembimbing dalam hal ini selalu memberi masukan-masukan dan evaluasi pada praktikan agar kiranya mahasiswa pratikan dapat mengetahui kesalahan dan kekurangannya sehingga dengan begitu harapannya mahasiswa pratikan dapat lebih baik dalam megajar.

9. Penyusunan Laporan PLT

Penyusunan laporan resmi PPL dikerjakan saat mahasiswa sedang dan telah menjalani proses PLT. Laporan ini dilaporkan secara resmi dengan menggunakan format laporan baku sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pendeskripsian hasil pelaksanaan PLT.

10. Praktik Non-Mengajar

a) Piket tata usaha

Piket tata usaha dilakukan secara bergiliran, yaitu setiap hari rabu. Hal-hal yang dilakukan dalam membantu staf tata usaha misalnya menyelesaikan kegiatan administrasi seperti penataan surat, penataan buku rapor, dan penyortiran data siswa.

b) Piket perpustakaan

Piket perpustakaan dilakukan setiap hari Sabtu. Piket perpustakaan biasanya dilakukan dengan melakukan inventarisasi buku-buku, penataan

dan penyortiran buku, melayani peminjaman serta pengembalian buku.

c) Piket Guru

Piket guru setiap hari Selasa. Piket guru dilakukan dengan membantu guru piket menyiapkan dokumen, mendata siswa yang izin terlambat, izin keluar sekolah, izin sakit, izin meninggalkan sekolah, menyampaikan tugas guru yang berhalangan hadir, dan menerima tamu.

B. ANALISIS HASIL PELAKSAAN DAN REFLEKSI

Program praktik mengajar dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara praktikan dan guru pembimbing. Walaupun terkadang guru pembimbing tidak menemani praktikan. Hal ini dimaksudkan agar praktikan belajar mandiri. Praktik mengajar kelas X IPA 1, X IPS 1, X IPS 2, dan X IPS 3 berjalan dengan lancar meskipun terkadang terdapat beberapa faktor yang sedikit menghambat proses pengajaran dan pembelajaran.

1. Analisis Hasil

Menjalani profesi sebagai seorang guru selama pelaksanaan PLT telah memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa untuk menjadi seorang guru tidak hanya cukup dengan penguasaan materi dan pemilihan metode pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, faktor penguasaan pengelolaan kelas juga sangat menentukan tingkat profesionalisme seorang guru.

Selama PLT, praktikan mendapat berbagai pengetahuan dan pengalaman terutama dalam masalah kegiatan belajar mengajar di kelas. Hal-hal yang didapat oleh praktikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Praktikan dapat berlatih menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
- b. Praktikan dapat berlatih memilih dan mengembangkan materi, media, dan sumber bahan pelajaran serta metode yang dipakai dalam pembelajaran.
- c. Dalam belajar menyesuaikan materi dengan jam efektif yang tersedia.
- d. Dapat berlatih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas dan mengelola kelas.
- e. Berlatih melaksanakan penilaian hasil belajar siswa dan mengukur kemampuan siswa dalam menerima materi yang diberikan.

- f. Dapat mengetahui tugas-tugas guru selain mengajar di kelas (guru piket) sehingga dapat menjadi bekal untuk menjadi seorang guru yang profesional.

Dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan, guru pembimbing sangat berperan dalam kelancaran penyampaian materi. Hal ini dikarenakan guru pembimbing sudah mempunyai pengalaman yang cukup dalam menghadapi peserta didik ketika proses belajar mengajar berlangsung. Dalam praktik pengalaman lapangan, guru pembimbing mengamati dan memperhatikan praktikan ketika sedang praktik mengajar. Setelah praktikan selesai praktik mengajarnya, guru pembimbing memberikan umpan balik kepada praktikan. Umpan balik ini berupa saran-saran yang dapat digunakan oleh praktikan untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Saran-saran yang diberikan guru pembimbing antara lain :

- a) Praktikan harus memperhatikan alokasi waktu yang sudah ditetapkan.
- b) Praktikan harus bersikap menentukan media yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik.

Kegiatan PLT tidak dapat terlepas dari adanya hambatan. Hambatan ini muncul karena situasi lapangan yang tidak sama persis dengan yang dibayangkan oleh praktikan. Secara rinci, hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing yang dialami praktikan antara lain:

- a) Keanekaragaman karakteristik peserta didik yang menuntut kemampuan praktikan untuk dapat menyesuaikan diri dengan berbagai karakteristik tersebut serta menuntut praktikan untuk mengelola kelas dengan cara bervariasi pula.
- b) Materi, metode, model, dan media yang diterapkan secara paralel pada kelas berbeda kurang efektif. Karakteristik siswa yang homogen pada masing-masing kelas membuat materi, metode, model, dan media yang diterapkan dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi pada beberapa kelas yang memiliki karakteristik berbeda materi, metode, model, dan media yang diterapkan sulit untuk dilaksanakan.
- c) Manajemen waktu yang kurang pas dalam proses pembelajaran seringkali membuat tahapan dan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan tidak tercapai sampai akhir jam pelajaran

Disamping beberapa hambatan yang telah diuraikan diatas, terdapat berbagai daya dukung dalam menjalankan program PLT yang akhirnya membuat pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar antara lain:

- a) Sarana dan prasarana dalam ruang kelas yang sangat memadai untuk pelaksanaan metode pembelajaran yang telah direncanakan oleh praktikan, seperti kelengkapan LCD, Proyektor, *sound system* serta fasilitas hot spot area.
- b) Berbagai masukan dan evaluasi dari guru pembimbing yang memotivasi mahasiswa PLT sehingga bisa melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dengan lebih baik lagi.

2. Refleksi

- a. Materi, metode, model, dan media yang diterapkan secara paralel pada siswa yang homogen, mahasiswa selalu melakukan analisis karakteristik siswa dan mengadakan evaluasi setiap selesai mengajar. Dari hasil evaluasi tersebut, mahasiswa merencanakan pembaruan model dan media pembelajaran, sehingga model dan media pembelajaran yang diterapkan pada satu kelas kadang berbeda dengan kelas yang lain.
- b. Untuk mengatasi manajemen waktu yang kurang sesuai, mahasiswa selalu membatasi waktu pelaksanaan tiap-tiap tahapan proses pembelajaran. Sebagai contoh, menentukan batas waktu diskusi selama hanya 45 menit atau presentasi masing-masing kelompok hanya 5 menit. Hal demikian membuat penggunaan waktu pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, sehingga setiap tahapan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari kegiatan PLT yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kegiatan PLT dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang sudah disusun, tidak ada kendala yang cukup berarti bagi praktikan selama proses belajar mengajar dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Program PLT dapat menambah pengalaman praktikan dalam bidang pembelajaran di sekolah dalam melatih dan mengembangkan kompetensi dalam bidang pendidikan.

Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) memberikan pengalaman yang sesungguhnya kepada praktikan tentang pelaksanaan proses pembelajaran, cara berinteraksi dengan peserta didik, teknik penguasaan kelas, cara memotivasi peserta didik, penerapan metode mengajar yang sesuai, penggunaan media pembelajaran, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran serta cara evaluasi pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, berdasarkan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) yang telah dilaksanakan oleh praktikan di SMA Negeri 1 Pleret selama kurang lebih dua bulan terdapat manfaat yang bisa diperoleh diantaranya adalah:

1. Kegiatan PPL yang telah dilaksanakan oleh praktikan di SMA Negeri 1 Pleret telah memberi pengalaman, baik suka maupun duka menjadi seorang guru atau tenaga pendidikan dengan segala tuntutananya, seperti persiapan administrasi pembelajaran, persiapan materi dan persiapan mental untuk mengajar siswa dikelas.
2. Praktek pengalaman lapangan dapat menambah rasa percaya diri, memupuk kedisiplinan dan menumbuhkan loyalitas terhadap profesi guru dan tenaga kependidikan bagi mahasiswa.
3. Hubungan antara anggota keluarga besar SMA Negeri 1 Pleret yang terdiri atas kepala sekolah, para guru, staf karyawan, dan seluruh siswa terjalin dengan sangat baik dan harmonis sehingga menunjang kegiatan belajar mengajar.

B. SARAN

1. Untuk Mahasiswa
 - a. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus direncanakan secara matang, dan

harus dibuat secara jelas.

- b. Senantiasa berkomunikasi dengan pihak sekolah mengenai setiap kegiatan yang memungkinkan keterlibatan para mahasiswa sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan.
- c. Sebagai calon pendidik, mahasiswa PLT hendaknya dapat menempatkan diri dan menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah dan senantiasa profesional dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan.

2. Untuk Sekolah/Lembaga

- a. Hubungan dengan UNY hendaknya lebih ditingkatkan dengan saling memberi masukan antara kedua belah pihak.
- b. Hendaknya pihak sekolah melakukan monitoring secara lebih intensif terhadap proses kegiatan PLT yang berada dibawah bimbingan guru yang bersangkutan.
- c. Pihak sekolah hendaknya memberikan masukan yang membangun bagi mahasiswa PLT mengenai segala permasalahan berkaitan dengan proses pengajaran.

3. Untuk LPPMP UNY

Panduan untuk menggunakan buku-buku penilaian PLT (Buku kuning untuk guru, buku biru untuk mahasiswa, dan lembar penilaian untuk dosen pembimbing lapangan) hendaknya lebih diperjelas.

4. Untuk UNY

Sebagai lembaga yang mempersiapkan tenaga pendidik, diharapkan UNY dapat lebih meningkatkan fasilitas yang berhubungan dengan ilmu kependidikannya sehingga semua mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Universitas Negeri Yogyakarta. 2017. *Panduan Pengajaran Mikro*. Yogyakarta

:Universitas Negeri Yogyakarta

Suryani, Nunuk dan Leo Agung. 2012. *Strategi Belajar Mengajar*. Yogyakarta: Ombak

Tim Pembekalan PLT 2017. *Materi Pembekalan PPL Tahun 2015*. Yogyakarta: UNY

TIM Penyusun Panduan PPL 2015. *Panduan PPL*. Yogyakarta: PL PPL & PKL UNY.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



FORMAT OBSERVASI PEMBELAJARAN DI KELAS DAN OBSERVASI PESERTA DIDIK

NAMA MAHASISWA : Lisdri Sustiwi PUKUL : 08.30-selesai
 NO. MAHASISWA : 14401241007 TEMPAT : SMA N 1 Pleret
 TGL. OBSERVASI : 6 September 2017 FAK/JUR : FIS / PKnH

NO	ASPEK YANG DIAMATI	DESKRIPSI HASIL PENGAMATAN
A	Perangkat Pembelajaran	
	1. Kurikulum 2013	Kegiatan belajar mengajar sudah menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas X dengan lebih memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk lebih aktif menggali informasi.
	2. Silabus	Silabus yang digunakan disusun atas dasar kurikulum 2013 dan KTSP kemudian dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah.
	3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	Telah dibuat sesuai dengan kompetensi/sub kompetensi dan disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada.
B	Proses Pembelajaran	
	1. Membuka pelajaran	Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian dilanjutkan dengan mengabsen siswa di kelas. Mengulas kembali pembelajaran sebelumnya.
	2. Penyajian materi	nyajian materi dilakukan dengan terstruktur dan terarah, sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi. Guru mencatat poin-poin materi pelajaran yang penting di papan tulis atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian juga ada penekanan ucapan atau pengulangan pada siswa tentang poin materi yang wajib untuk dipahami atau dimengerti.
	3. Metode pembelajaran	Ceramah interaktif, Diskusi Kelompok

	<i>Inquiry Learning</i>
4. Penggunaan bahasa	Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia, hanya beberapa kali menggunakan bahasa daerah Jawa, yakni untuk menunjukkan contoh terdekat dari peserta didik dengan tujuan untuk lebih memudahkan peserta didik memahami konsep geografi dalam contoh yang diberikan.
5. Penggunaan waktu	Manajemen waktu sudah optimal. Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang sudah direncanakan.
6. Gerak	Guru kurang banyak bergerak, lebih sering berada di depan kelas untuk menjaga fokus anak-anak agar tidak membayangkan konsentrasi.
7. Cara memotivasi siswa	Guru memotivasi siswa dengan cara memberikan nasihat-nasihat agar selalu menjadi manusia yang senantiasa mengintrospeksi diri dalam menghadapi segala hal.
8. Teknik bertanya	Guru bertanya dimaksudkan untuk menumbuhkan peran aktif peserta didik dengan meminta memberi tanggapan. Cara menunjuk siswa untuk menjawab pertanyaan harus diperhatikan jangan sampai membuat peserta didik merasa terintimidasi. Pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang mampu membuat peserta didik mampu menganalisis konsep materi dengan aplikasinya dalam kehidupan yang bukan merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban iya atau tidak, sehingga guru dapat mengetahui dengan pasti tingkat keahaman peserta didik. Lalu, jawaban yang diberikan peserta didik diluruskan secara bersama-sama agar semua peserta didik memahami
9. Teknik penguasaan kelas	Guru mampu menguasai dan mengkondisikan siswa dengan baik
10. Penggunaan media	Pembelajaran disampaikan sepenuhnya oleh guru mulai dari konsep hingga detail materi dan siswa diajak berfikir kritis terhadap materi yang sedang dibahas dengan bantuan power point.

	11. Bentuk dan cara evaluasi	Menguji pemahaman siswa dengan memberikan pertanyaan langsung, kemudian dibahas secara bersama.
	12. Menutup pelajaran	Guru menutup pelajaran dengan membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari pertemuan mendatang agar peserta didik dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Kemudian guru menutup pelajaran dengan memberikan salam penutup.
C	Perilaku Siswa	
	1. Perilaku siswa di dalam kelas	Siswa agak ramai ketika materi disampaikan dan kurang memperhatikan.
	2. Perilaku siswa di luar kelas	Siswa menghormati guru, karyawan, dan juga siswa lain

LAMPIRAN 2



MATRIKS PROGRAM KERJA PLT UNY

F01

NAMA SEKOLAH : SMA NEGERI 1 PLERET
 ALAMAT SEKOLAH : Kedaton, Pleret, Pleret Bantul, DIY 55185
 GURU PEMBIMBING : Heri Widayari, S.Pd.
 PELAKSANAAN PPL : 15 September –15 November 2017

NAMA MAHASISWA : Lisdri Sustiwi
 NIM : 14401241007
 FAK/ JUR/ PRODI : FIS/PKnH/PKn
 DOSEN PEMBIMBING : Suripno,SH.,M.Pd.

NO.	KEGIATAN PPL		JUMLAH JAM PER MINGGU KE-										JUMLAH JAM		
			SEPTEMBER			OKTOBER					NOVEMBER				
			III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II			
1.	Penerjunan Mahasiswa PLT	R	1												1
		P	2												2
2.	Pembuatan Program PLT														
	a. Observasi	R		2											2
		P		4											4
	b. Menyusun Matriks Program PLT	R		6											6
		P		4						2					6
	c. Konsultasi dengan guru pembimbing	R			2										2
		P				2									2
3.	Administrasi Pembelajaran Guru														
	a. Membuat Prota dan Prosem	R			2	2									4
		P			3	2									5
	b. Membuat Kisi-kisi soal Ulangan/Tugas	R				2		2							4
		P						2	2						4
	c. Membuat Soal Ulangan/Tugas	R		2											2

		P							3	2			5
	d. Mengkoreksi Soal Ulangan/Tugas	R	6										6
		P		2		2		2	2	2	2		12
	e. Merekap Nilai Ulangan/Tugas	R	4										4
		P			1	1		1		2	2		7
	f. Membuat Analisis Butir Soal	R						2					2
		P									4		4
4.	Pembelajaran Intrakurikuler												
	(Kegiatan Mengajar Terbimbing)												
	a. Persiapan												
	1) Konsultasi	R	2	1	1	1	1		1				7
		P	1	1	1				1				4
	2) Mengumpulkan materi	R	2		2	2		2		2			10
		P			1	1		2		1			5
	3) Membuat RPP	R	2	2	2	2	2	2	2	2	2		16
		P	2	2	2	2	2	2	2	2	2		16
	4) Menyiapkan/membuat media	R	2		2		2		2				8
		P	2	2	2	2	1	2	1				12
	b. Mengajar terbimbing												
	1) Praktik Mengajar	R	8										8
		P	2	2	4								8
	2) Penilaian dan Evaluasi	R	2										2
		P	2	2	2								6
	c. Mengajar Mandiri												
	1) Praktik Mengajar	R	8	8	8	8	8	8	8	8	8		64
		P	4	8	8	8	4	8	8	8	2		58
	2) Penilaian dan Evaluasi	R		2	2	2	2	2	2	2	2		14
		P			2		2		2				6

5.	Pembelajaran Ekstrakurikuler												
	(Kegiatan Nonmengajar)												
	1) Kepramukaan	R			2	2	2	2	2	2	2		14
		P				2		2	2				6
6.	Kegiatan Sekolah												
	a. Upacara Bendera	R		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
		P		1		1		1	1			1	5
	b. Piket	R		7	7	7	7	7	7	7	7	7	63
		P		7	7	7	7	7	7	7	7	7	63
	c. Piket Perpustakaan	R		5	5	5	5	5	5	5	5		40
		P		5	2	3	4	4	4	4	4		30
	d. Pemasangan Poster Sekolah	R			2								2

LAMPIRAN 3



KARTU BIMBINGAN PLT
PUSAT PENGEMBANGAN PPL DAN PKL
 LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPMP) UNY
 TAHUN 2017

F04
 UNTUK MAHASISWA

Nama Sekolah / Lembaga : SMA NEGERI 1 PLERET
 Alamat Sekolah : KEDATON, PLERET BANTUL Fax./ Telp. Sekolah :
 Nama DPL PLT :
 Prodi / Fakultas DPL PLT :
 Jumlah Mahasiswa PLT : 24 Mahasiswa

No	Tgl. Kehadiran	Jml Mhs	Materi Bimbingan	Keterangan	Tanda Tangan DPL PLT
1.	30 / September -17	2	RPP		<i>[Signature]</i>
2.	26 / October 2017	2	metri pembelajaran		<i>[Signature]</i>

PERHATIAN :
 ☞ Kartu bimbingan PLT ini dibawa oleh mhs PLT (1 kartu utk 1 prodi).
 ☞ Kartu bimbingan PLT ini harap diisi materi bimbingan dan dimintakan tanda tangan dari DPL PLT setiap kali bimbingan di lokasi.
 ☞ Kartu bimbingan PLT ini segera dikembalikan ke PP PPL & PKL UNY paling lambat 3 (tiga) hari setelah penarikan mhs PLT untuk keperluan administrasi.

Mengetahui,
 Kepala PP PPL DAN PKL,
 Dr. Sulis Triyono, M.Pd
 NIP. 19580506 198601 1 001

Peret, 14. Mei 2017
 Ketua Kelompok PLT
[Signature]
 Gabriel Rian

LAMPIRAN 5

CATATAN PROSES PEMBELAJARAN /KEGIATAN HARIAN

Hari, Tanggal	Kelas	Jam	Materi pelajaran dan uraian kegiatan pembelajaran	Kegiatan Belajar	Alat peraga/ Media pembelajaran	Evaluasi	Keterangan
Selasa, 3 Oktober 2017	X IPS 3	08.30 - 09.15 Istirahat 09.30- 10.15	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis Pengertian Suprastruktur Politik menurut Para ahli • Menganalisis pengertian Infrastruktur Politik. • Menyebutkan kelompok kekuatan Infrastruktur Politik. • Menganalisis peran masing-masing kelompok kekuatan Infrastruktur politik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menjelaskan materi “Kewenangan Lembaga-lembaga” dengan power point. • Mahasiswa PLT memutar video dan yang berkaitan dengan “Kewenangan Lembaga-lembaga Negara”. • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 6 kelompok . • Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya. 	Power Point, Vidio, Papan Tulis, Spidol dan Lembar Kerja Siswa	-	-
Rabu, 4 Oktober 2017	X IPA 1	12.10- 13.30	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis Pengertian Suprastruktur Politik menurut Para ahli • Menganalisis pengertian Infrastruktur Politik. • Menyebutkan kelompok kekuatan Infrastruktur Politik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menjelaskan materi “Kewenangan Lembaga-lembaga” dengan power point. • Mahasiswa PLT memutar video dan yang berkaitan dengan 	Power Point, Vidio, Papan Tulis, Spidol dan Lembar Kerja Siswa	-	-

			<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis peran masing-masing kelompok kekuatan Infrastruktur politik 	<p>“Kewenangan Lembaga-lembaga Negara”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 6 kelompok . • Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya 			
Jumat, 8 Oktober 2017	X IPS 2	07.00- 08.30	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis Pengertian Suprastruktur Politik menurut Para ahli • Menganalisis pengertian Infrastruktur Politik. • Menyebutkan kelompok kekuatan Infrastruktur Politik. • Menganalisis peran masing-masing kelompok kekuatan Infrastruktur politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menjelaskan materi “ Kewenangan Lembaga-lembaga”dengan power point. • Mahasiswa PLT memutar video dan yang berkaitan dengan “Kewenangan Lembaga-lembaga Negara”. • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 6 kelompok. • Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya. 	Power Point, Vidio, Papan Tulis, Spidol dan Lembar Kerja Siswa	-	-

Selasa, 10 Oktober 2017	X IPS 3	08.30 - 09.15 Istirahat 09.30- 10.15	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis pengertian Tata Kelola Pemerintahan yang baik. • Menganalisis unsur pokok dan ciri-ciri Tata Kelola Pemerintahan yang baik. • Menjelaskan cakupan/ruang lingkup tata pemerintahan yang baik. • Menganalisis Syarat untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik. • Menganalisis Pengertian Partisipasi Politik. • Menganalisis ciri-ciri dan contoh Partisipasi politik yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menjelaskan materi “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia” dengan power point. • Mahasiswa PLT memutar video dan yang berkaitan dengan “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia”. • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 6 kelompok. • Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya. • Mahasiswa PLT membimbing siswa untuk menyimpulkan materi. 	Power Point, Vidio, Papan Tulis, Spidol dan Lembar Kerja Siswa	-	-

Rabu, 11 Oktober 2017	X IPA 1	12.10- 13.30	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis pengertian Tata Kelola Pemerintahan yang baik. • Menganalisis unsur pokok dan ciri-ciri Tata Kelola Pemerintahan yang baik. • Menjelaskan cakupan/ruang lingkup tata pemerintahan yang baik. • Menganalisis Syarat untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik. • Menganalisis Pengertian Partisipasi Politik. • Menganalisis ciri-ciri dan contoh Partisipasi politik yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menjelaskan materi “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia” dengan power point. • Mahasiswa PLT memutar video dan yang berkaitan dengan “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia”. • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 6 kelompok. • Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya. • Mahasiswa PLT membimbing siswa untuk menyimpulkan materi. 	Power Point, Vidio, Papan Tulis, Spidol dan Lembar Kerja Siswa	-	-
-----------------------------	---------	-----------------	--	--	--	---	---

Jumat, 13 oktober 2017	X IPS 1	08.30 - 09.15	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis Pengertian Suprastruktur Politik menurut Para ahli • Menganalisis pengertian Infrastruktur Politik. • Menyebutkan kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menjelaskan materi “Kewenangan Lembaga-lembaga” dengan power point. • Mahasiswa PLT 	Power Point, Vidio, Papan Tulis, Spidol dan Lembar Kerja Siswa		

		Istirahat 09.30- 10.15	<p>kekuatan Infrastruktur Politik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis peran masing-masing kelompok kekuatan Infrastruktur politik. 	<p>memutar video dan yang berkaitan dengan “Kewenangan Lembaga-lembaga Negara”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 6 kelompok . • Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya. 			
Sabtu, 14 Oktober 2017	X IPA 2	08.30 - 09.15 Istirahat 09.30- 10.15	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis Pengertian Suprastruktur Politik menurut Para ahli • Menganalisis pengertian Infrastruktur Politik. • Menyebutkan kelompok kekuatan Infrastruktur Politik. • Menganalisis peran masing-masing kelompok kekuatan Infrastruktur politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menjelaskan materi “ Kewenangan Lembaga-lembaga” dengan power point. • Mahasiswa PLT memutar video dan yang berkaitan dengan “Kewenangan Lembaga-lembaga Negara”. • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 6 kelompok . • Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban 	Power Point, Vidio, Papan Tulis, Spidol dan Lembar Kerja Siswa		

				dari hasil diskusinya.			
Selasa, 17 Oktober 2017	X IPS 3	08.30 - 09.15 Istirahat 09.30- 10.15	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis Pengertian Desentralisasi. • Mengidentifikasi Pembagian Desentralisasi menurut Amran Muslimin. • Menganalisis Kelebihan dan kelemahan desentralisasi . • Menganalisis Pengertian Otonomi Daerah menurut para ahli. • Menganalisis Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan. • Menganalisis Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menayangkan dan menerangkan power point yang berkaitan dengan “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”. • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 6 kelompok. • Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya. • Mahasiswa PLT membimbing siswa untuk menyimpulkan materi 	Power Point, Papan Tulis, Spidol dan Lembar Kerja Siswa	-	-
Rabu , 18 Oktober 2017	X IPA 1	12.10- 13.30	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis Pengertian Desentralisasi. • Mengidentifikasi Pembagian Desentralisasi menurut Amran Muslimin. • Menganalisis Kelebihan dan kelemahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menayangkan dan menerangkan power point yang berkaitan dengan “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik 	Power Point, Papan Tulis, Spidol dan Lembar Kerja Siswa	-	-

			<p>desentralisasi .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis Pengertian Otonomi Daerah menurut para ahli. • Menganalisis Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan. • Menganalisis Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia. 	<p>Indonesia”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 6 kelompok. • Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya. • Mahasiswa PLT membimbing siswa untuk menyimpulkan materi 			
Jumat, 20 Oktober 2017	X IPS 1	08.30 - 09.15 Istirahat 09.30- 10.15	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis pengertian Tata Kelola Pemerintahan yang baik. • Menganalisis unsur pokok dan ciri-ciri Tata Kelola Pemerintahan yang baik. • Menjelaskan cakupan/ruang lingkup tata pemerintahan yang baik. • Menganalisis Syarat untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik. • Menganalisis Pengertian Partisipasi Politik. • Menganalisis ciri-ciri dan contoh Partisipasi politik yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menjelaskan materi “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia” dengan power point. • Mahasiswa PLT memutar video dan yang berkaitan dengan “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia”. • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 6 kelompok. 	Power Point, Vidio, Papan Tulis, Spidol dan Lembar Kerja Siswa.		

				<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya. • Mahasiswa PLT membimbing siswa untuk menyimpulkan materi. 			
Jum'at, 27 Oktober 2017	X IPS 2	07.30-08.30	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis pengertian Tata Kelola Pemerintahan yang baik. • Menganalisis unsur pokok dan ciri-ciri Tata Kelola Pemerintahan yang baik. • Menjelaskan cakupan/ruang lingkup tata pemerintahan yang baik. • Menganalisis Syarat untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik. • Menganalisis Pengertian Partisipasi Politik. • Menganalisis ciri-ciri dan contoh Partisipasi politik yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menjelaskan materi "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia" dengan power point. • Mahasiswa PLT memutar video dan yang berkaitan dengan "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia". • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 6 kelompok. • Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya. • Mahasiswa PLT membimbing siswa untuk 	Power Point, Vidio, Papan Tulis, Spidol dan Lembar Kerja Siswa		

				menyimpulkan materi.			
Jum'at, 27 Oktober 2017	08.30 - 09.15 Istiraha t 09.30- 10.15	X IPS 1	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis Pengertian Desentralisasi. • Mengidentifikasi Pembagian Desentralisasi menurut Amran Muslimin. • Menganalisis Kelebihan dan kelemahan desentralisasi . • Menganalisis Pengertian Otonomi Daerah menurut para ahli. • Menganalisis Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan. • Menganalisis Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menayangkan dan menerangkan power point yang berkaitan dengan “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”. • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 6 kelompok. • Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya. • Mahasiswa PLT membimbing siswa untuk menyimpulkan materi 	Power Point, Papan Tulis, Spidol dan Lembar Kerja Siswa		
Sabtu, 28 Oktober 2017	X IPA 2	08.30 - 09.15 Istirahat	<ul style="list-style-type: none"> • Latihan Soal di LKS 	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa diberi tugas untuk mengerjakan soal LKS Uji Kompetensi 1,2, dan 3 (15 nomor) Bab 3 tentang Kewenangan Lembaga- lembaga Negara Menurut UUD 1945. 	Lembar Kerja Siswa		

		09.30-10.15		<ul style="list-style-type: none"> • Siswa dan mahasiswa PLT mencocokkan jawaban di LKS 			
Selasa, 31 Oktober 2017	X IPS 3	08.30 - 09.15 Istirahat 09.30-10.15	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis Kewenangan Pemerintah Daerah. • Mengidentifikasi daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus. • Menganalisis Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Otonomi Daerah • Menganalisis Proses Pemilihan Kepala Daerah dan peraturan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT meminta peserta didik untuk mengamati dengan membaca buku PKn Kelas X Bab 4, Sub-Bab C. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah dengan diberi waktu 10 menit untuk membaca. • Mahasiswa PLT menanyakan kepada siswa apakah sudah memahami materi “Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah” . • Mahasiswa PLT menjelaskan materi yang ditanyakan oleh siswa. • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 5 kelompok. • Siswa diminta untuk mencari permasalahan atau kendala yang 	Power Point tentang Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah, Papan Tulis, dan Spidol		

				<p>dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. 			
Rabu, 1 November 2017	X IPA 1	12.10- 13.30	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis Kewenangan Pemerintah Daerah. • Mengidentifikasi daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus. • Menganalisis Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Otonomi Daerah • Menganalisis Proses Pemilihan Kepala Daerah dan peraturan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menanyakan kepada siswa apakah sudah memahami materi “Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah” . • Mahasiswa PLT menjelaskan materi yang ditanyakan oleh siswa. • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 5 kelompok. • Siswa diminta untuk mencari permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia. • Setiap kelompok mempresentasikan hasil 	Power Point tentang Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah, Papan Tulis, dan Spidol		

				<p>diskusinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT membimbing siswa untuk menyimpulkan materi. 			
Selasa, 24 Oktober 2017	X IPS 3	08.30 - 09.15 Istirahat 09.30- 10.15	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis Fungsi yang dimiliki Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. • Menganalisis kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat. • Mengidentifikasi Tujuan umum dan khusus dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menerangkan materi dengan power point tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan daerah. • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 5 kelompok . • Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya. • Mahasiswa PLT membimbing siswa untuk menyimpulkan materi. 	Power point tentang “Kedudukan dan peran pemerintah pusat”, Papan Tulis, dan Spidol.		
Rabu, 25 Oktober 2017	X IPA 1	12.10- 13.30	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis Fungsi yang dimiliki Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. • Menganalisis kewenangan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menerangkan materi dengan power point tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan daerah. • Mahasiswa PLT 	Power point tentang “Kedudukan dan peran pemerintah pusat”, Papan		

			<p>dimiliki pemerintah pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi Tujuan umum dan khusus dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah 	<p>membentuk peserta menjadi 5 kelompok .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya. • Mahasiswa PLT membimbing siswa untuk menyimpulkan materi. 	Tulis, dan Spidol.		
Jum'at, 24 september 2017	X IPS 2	07.00-08.30	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis status warga negara Indonesia. • Menganalisis asas-asas penentuan kewarganegaraan. • Menganalisis masalah masalah dalam kewarganegaraan. • Mengidentifikasi syarat-syarat menjadi WNI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa mendengarkan penjelasan mahasiswa PLT tentang status warga negara Indonesia dan asas-asas penentuan kewarganegaraan. • Siswa mengidentifikasi masalah masalah dalam kewarganegaraan • Siswa mengerjakan latihan soal penilaian harian 2 di LKS dengan soal sebanyak 25 pilihan ganda. 	Power point tentang "Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia", Papan Tulis, dan Spidol.		
Jum'at, 24 september	X IPS 1	08.30 - 09.15	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis status warga negara Indonesia. • Menganalisis asas-asas 	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa mendengarkan penjelasan mahasiswa PLT tentang status warga negara Indonesia 	Power point tentang "Kedudukan warga negara		

2017		Istirahat 09.30-10.15	<p>penentuan kewarganegaraan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis masalah masalah dalam kewarganegaraan. • Mengidentifikasi syarat-syarat menjadi WNI. 	<p>dan asas-asas penentuan kewarganegaraan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa mengidentifikasi masalah masalah dalam kewarganegaraan • Siswa mengerjakan latihan soal penilaian harian 2 di LKS dengan soal sebanyak 25 pilihan ganda. 	<p>dan Penduduk Indonesia”, Papan Tulis, dan Spidol.</p>		
Jum’at, 3 November 2017	X IPS 2	07.00-08.30	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis Pengertian Desentralisasi. • Mengidentifikasi Pembagian Desentralisasi menurut Amran Muslimin. • Menganalisis Kelebihan dan kelemahan desentralisasi . • Menganalisis Pengertian Otonomi Daerah menurut para ahli. • Menganalisis Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan. • Menganalisis Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menayangkan dan menerangkan power point yang berkaitan dengan “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”. • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 6 kelompok. • Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya. • Mahasiswa PLT 	<p>Power Point, Papan Tulis, Spidol dan Lembar Kerja Siswa</p>		

				membimbing siswa untuk menyimpulkan materi			
Jum'at, 3 November 2017	X IPS 1	08.30 - 09.15 Istirahat 09.30- 10.15	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis Fungsi yang dimiliki Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. • Menganalisis kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat. • Mengidentifikasi Tujuan umum dan khusus dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menerangkan materi dengan power point tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan daerah. • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 5 kelompok . • Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya. • Mahasiswa PLT membimbing siswa untuk menyimpulkan materi. 	Power point tentang “Kedudukan dan peran pemerintah pusat”, Papan Tulis, dan Spidol		
Selasa, 7 November 2017	X IPS 3	08.30 - 09.15 Istirahat 09.30-	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah. • Menjelaskan hubungan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. • Menganalisis hubungan struktural dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menjelaskan materi “hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah” dengan power point. • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 5 kelompok . 	Power Point “hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah”, papan tulis,		

		10.15	<p>fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya. • Mahasiswa PLT membimbing siswa untuk menyimpulkan materi 	dan spidol		
Rabu, 8 November 2017	X IPA 1	12.10-13.30	<ul style="list-style-type: none"> • Ulangan Harian Bab 4 “Hubungan pemerintah pusat dan daerah”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa mengerjakan soal ulangan sebanyak 15 pilihan ganda dan 5 soal essay. • Ulangan berjalan dengan lancar. 	Lembar kerja siswa		
Jum’at, 10 November 2017	X IPS 2	07.00-08.30	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis Fungsi yang dimiliki Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. • Menganalisis kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat. • Mengidentifikasi Tujuan umum dan khusus dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menerangkan materi dengan power point tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan daerah. • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 5 kelompok . • Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya. • Mahasiswa PLT membimbing siswa untuk menyimpulkan materi 	Power point tentang “Kedudukan dan peran pemerintah pusat”, Papan Tulis, dan Spidol.		

			daerah.				
X IPS 1	08.30 - 09.15 Istirahat 09.30- 10.15	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis Kewenangan Pemerintah Daerah. • Mengidentifikasi daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus. • Menganalisis Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Otonomi Daerah. • Menganalisis Proses Pemilihan Kepala Daerah dan peraturan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT menanyakan kepada siswa apakah sudah memahami materi “Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah” . • Mahasiswa PLT menjelaskan materi yang ditanyakan oleh siswa. • Mahasiswa PLT membentuk peserta menjadi 5 kelompok. • Siswa diminta untuk mencari permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah 	Power Point tentang Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah, Papan Tulis, dan Spidol			

				<p>daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. • Mahasiswa PLT membimbing siswa untuk menyimpulkan materi. 			
Selasa, 14 November 2017	X IPS 3	08.30 - 09.15	<ul style="list-style-type: none"> • Ulangan Harian Bab 4 “Hubungan pemerintah pusat dan daerah”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa mengerjakan soal ulangan sebanyak 15 pilihan ganda dan 5 soal 	Lembar Kerja Siswa.		

		Istirahat 09.30- 10.15		essay. • Ulangan berjalan dengan lancar.			
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

LAMPIRAN 6

KALENDER PENDIDIKAN


SEKOLAH: SMAN 1 PLERET


TAHUN
PELAJAR 2017-
AN : 2018

JULI 2017

W K	M	S n	S s	R	K	J	S b
1							1
2	2	3	4	5	6	7	8
3	9	10	11	12	13	14	15
4	16	17	18	19	20	21	22
5	23	24	25	26	27	28	29
6	30	31					
ME=3		HL = 2		HE = 18			


 Masuk Sekolah

 Masa Orientasi Peserta Didik Baru

 Pengenalan Lingkungan

AGUSTUS 2017

W K	M	Sn	Ss	R	K	J	S b
1			1	2	3	4	5
2	6	7	8	9	10	11	12
3	13	14	15	16	17	18	19
4	20	21	22	23	24	25	26
5	27	28	29	30	31		
ME = 4		HL = 9		HE = 22			


 Libur Awal Puasa



SEPTEMBER 2017

W K	M	Sn	S s	R	K	J	S b
1						1	2
2	3	4	5	6	7	8	9
3	10	11	12	13	14	15	16
4	17	18	19	20	21	22	23
5	24	25	26	27	28	29	30
ME = 3		HL = 13		HE = 17			

 Kegiatan Ramadhan

 Libur Iedul Fitri 1431 H



OKTOBER 2017

W K	M	Sn	Ss	R	K	J	S b
1	1	2	3	4	5	6	7
2	8	9	10	11	12	13	14
3	15	16	17	18	19	20	21
4	22	23	24	25	26	27	28
5	29	30	31				

ME = 4 HL = 5 HE = 26

Ulangan Tengah Semester 1



NOPEMBER 2017

W K	M	Sn	Ss	R	K	J	S b
1				1	2	3	4
2	5	6	7	8	9	10	11
3	12	13	14	15	16	17	18
4	19	20	21	22	23	24	25
5	26	27	28	29	30		

ME = 4 HL = 5 HE = 25

DESEMBER 2017

W K	M	Sn	Ss	R	K	J	S b
1						1	2
2	3	4	5	6	7	8	9
3	10	11	12	13	14	15	16
4	17	18	19	20	21	22	23
5	24	25	26	27	28	29	30
6	31						

ME = 3 HL = 12 HE = 19

Ulangan Akhir Semester

Pembagian Raport Semester 1

Libur Semester 1

JANUARI 2018

W K	M	Sn	Ss	R	K	J	S b
1		1	2	3	4	5	6
2	7	8	9	10	11	12	13
3	14	15	16	17	18	19	20
4	21	22	23	24	25	26	27


FEBRUARI 2018

W K	M	Sn	Ss	R	K	J	S b
1					1	2	3
2	4	5	6	7	8	9	10
3	11	12	13	14	15	16	17
4	18	19	20	21	22	23	24


MARET 2018

W K	M	Sn	Ss	R	K	J	S b
1					1	2	3
2	4	5	6	7	8	9	10
3	11	12	13	14	15	16	17
4	18	19	20	21	22	23	24

5	28	29	30	31			
ME = 3		HL = 12		HE = 19			

 Awal Masuk Semester 2


5	25	26	27	28			
ME = 3		HL = 6		HE = 22			


 Pekan Prestasi



 Ulangan Uji Kompetensi


5	25	26	27	28	29	30	31
ME = 3		HL = 5		HE = 26			

 Ujian Nasional Utama

 Ujian Praktek kelas XII

APRIL 2018


W K	M	Sn	Ss	R	K	J	S b
1	1	2	3	4	5	6	7
2	8	9	10	11	12	13	14
3	15	16	17	18	19	20	21
4	22	23	24	25	26	27	28
5	29	30					
ME = 3		HL = 5		HE = 25			

 Ujian Sekolah Kelas XII



MEI 2018

W K	M	Sn	Ss	R	K	J	S b
1			1	2	3	4	5
2	6	7	8	9	10	11	12
3	13	14	15	16	17	18	19
4	20	21	22	23	24	25	26
5	27	28	29	30	31		
ME = 4		HL = 6		HE = 25			

 Ujian Nasional Ulang

JUNI 2018

W K	M	Sn	Ss	R	K	J	S b
1						1	2
2	3	4	5	6	7	8	9
3	10	11	12	13	14	15	16
4	17	18	19	20	21	22	23
5	24	25	26	27	28	29	30
ME = 3		HL = 10		HE = 8			

 Ulangan Kenaikan Kelas/UKK

 Pembagian Raport Semester 2

Ke t :	ME = Minggu Efektif
	HL = Hari Libur
	HE = Hari Efektif

LAMPIRAN 8

PROGRAM TAHUNAN

SEKOLAH : SMA NEGERI 1 PLERET
 MATA PELAJARAN : PKn
 KELAS : X
 TAHUN PELAJARAN : 2017/2018

	KOMPETENSI DASAR	M PEL	PETERANGAN
	1.1. Mensyukuri keberadaan nilai- nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.1. Menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3.1. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 4.1. Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara-negara	p	
	ULANGAN HARIAN	p	
	1.2. Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa 2.2 Bersikap peduli terhadap penerapan keuntungan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan 3.2 Menelaah ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan 4.2 Menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama	p	

		dan kepercayaan pertahanan dan keamanan		
		ULANGAN HARIAN	p	
		<p>1.3. Menghargai nilai-nilai fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa</p> <p>2.3 Bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara</p> <p>3.3 Menganalisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.3 Mendemostrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	p	
		ULANGAN HARIAN	p	
		<p>1.4. Menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>2.4 Bersikap Peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat</p> <p>3.4 Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.4 Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	p	
		ULANGAN HARIAN	p	
		1.5. Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud syukur	p	

		<p>kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>2.5. Menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>3.5. Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>4.5. Mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika</p>		
		ULANGAN HARIAN	0	
		<p>1.6. Mensyukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>2.6. Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>3.6. Menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>4.6. Menyajikan hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.</p>	0	
		ULANGAN HARIAN	0	
		<p>1.7. Menghargai wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>2.7. Bertanggungjawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	0	

		<p>3.7. Menginterpretasi pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>4.7. Mempresentasi hasil interpretasi terkait pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>		
		ULANGAN HARIAN	0	

LAMPIRAN 9

PROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : PKn
 Satuan Pendidikan : SMA
 2017/2018

Kelas/Semester : X/1
 Tahun Pelajaran :

No	Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok	Jmlh Jam Pelj	Juli				Agustus					September				Oktober			November				Desember					
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
3.1	Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan	4				2	2																					
4.1	Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara-negara	4						2	2	U																		
3.2	Menelaah ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan	4								2	2																	
4.2	Menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan pertahanan dan	4										2	2															
	MID SEMESTER	2												2														
3.3	Menganalisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2													2	2												
4.3	Mendemostrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2														2	U											
3.4	Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4																2	2									
4.4	Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2																							2			

LAMPIRAN 10

SILABUS PPKn

KURIKULUM 2013

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Pleret
 Kelas/ Semester : X/ I
 Program/ Peminatan : Wajib

A. Kompetensi Inti :

1. 1	menhayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
1. 2	menhayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerja sama, toleransi, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro- aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional
1. 3	memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
1. 4	menunjukkan ketrampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara : efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

No	Kompetensi Dasar (KD)	Materi Pokok	IPK (ambil dari silabus)	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1	1. 1 Mensyukuri keberadaan	nilai-nilai Pancasila dalam kerangka	1.1.1 Menyakiti nilai-nilai Pancasila dalam	❖ Mengamati gambar/ tayangan video/ film		1 jam	video, Buku teks

	<p>nilai- nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>2. 1 Menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>3. 1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik</p>	<p>praktik pemerintahan Negara</p> <p>a. Sistem Pembagaan Kekuasaan Negara</p> <p>b. Kedudukan dan Fungsi Kemerintahan Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementrian</p> <p>c. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p>praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>1.1.2 Membuktikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>1.1.3 Mengubah perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>1.1.1 Mendemonstrasikan sikap gotong royong</p>	<p>dengan penuh rasa syukur dan atau memabaca dari berbagai sumber (buku, media cetak maupun elektronik)/ nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara</p> <p>❖ Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan mendlam/ dialektis dengan menggunakan High- Order- Thingking Skills (HOTS) tentang Nilai-Nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah Negara Mengumpulkan informasi dari</p>			<p>wajib</p>
--	---	---	---	--	--	--	--------------

	<p>penyelenggaraa n</p> <p>4.1 Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraa n pemerintahan Negara-negara</p>		<p>sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>1.1.2 Membangun nilai-nilai toleransi dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara</p> <p>2.1.3 Membangun nilai-nilai kejujuran dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara</p>	<p>berbagai sumber (Buku yang relevan, media masa, memanfaatkan Teknologi Informasi dan Kopmunikasi)/ dengan penuh kejujuran dan toleransi tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara ❖ Mendemonstrasikan pengambilan keputusan bersama dalam kerangka praktik penyelenggaraan 			
--	--	--	---	---	--	--	--

				pemerintah negara			
2	<p>1.2 Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>2.2 Bersikap peduli terhadap penerapan</p>	<p>tentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>b. Kependudukan warga negara dan Penduduk Indonesia</p> <p>c. Kemerdekaan</p>	<p>1.2.1 Membangun nilai-nilai menghargai secara adil ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan pertahanan dan keamanan</p> <p>1.2.2 Membangun nilai-nilai kerjasama secara adil ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan pertahanan dan keamanan</p>	<p>❖ Mengamati gambar /tayangan video/film dengan penuh rasa syukur dan atau mekalukan kajian konstitusionalitas (membaca ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan pertahanan dan keamanan</p> <p>❖ Mengidentifikasi dan megajukan pertanyaan dengan menggunakan <i>High-Order-Thinking Skills</i> (HOTS) tentang Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang</p>			

	<p>keuntungan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>3.2 Menelaah ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang</p>	<p>beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia</p> <p>d. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia</p>		<p>wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan pertahanan dan keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang Ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan pertahanan dan keamanan ❖ Menganalisis dan menyimpulkan serta mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur 			
--	---	--	--	---	--	--	--

	<p>wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan</p> <p>4.2 Menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan pertahanan dan keamanan</p>			<p>tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan pertahanan dan keamanan</p> <p>❖ Mempresentasikan hasil analisis tentang Ketentuan Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan</p>			
--	---	--	--	---	--	--	--

	<p>1.3 Menghargai nilai-nilai fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa</p> <p>2.3 Bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara</p> <p>3.3 Menganalisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara Republik</p>	<p>kewenangan lembaga-lembaga negara</p> <p>a. Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik Indonesia</p> <p>b. Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>1.3.1 Menerima fungsi lembaga-lembaga Negara menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan taqwa</p> <p>1.3.2 Menyukuri berfungsinya lembaga-lembaga Negara menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa</p> <p>2.3.1 Memiliki sikap peduli terhadap lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mengamati gambar/tayangan video/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, artikel, media cetak maupun elektronik) tentang kewenangan lembaga-lembaga negara ❖ Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan <i>High-Order-Thinking Skills</i> (HOTS) tentang kewenangan lembaga-lembaga negara ❖ Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan penuh 	<p>Portofolio Presentasi</p>	<p>Am</p>	<p>Video Buku Tesk Wajib</p>
--	---	--	---	--	----------------------------------	-----------	--------------------------------------

	<p>Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.3 Mendemostrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>			<p>disiplin dan tanggung jawab tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>❖ Mempresentasikan hasil kesimpulan tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>			
	<p>1.4 Menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang</p>	<p>hubungan Struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah</p> <p>a. Desentralisasi</p>	<p>1.4.1 Memahami nilai hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut</p>	<p>❖ Mengamati gambar/tayangan video/ film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca</p>			

	<p>Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>2.4 Bersikap Peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat</p> <p>3.4 Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.4 Merancang dan melakukan penelitian</p>	<p>atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>b. Kependudukan dan Peran Pemerintah Pusat</p> <p>c. Kedudukan dan Pemerintah Daerah</p>	<p>Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>1.4.2 Menerima nilai-nilai hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD NRI Tahun 1945</p> <p>1.4.3 Meyakini nilai-nilai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat UUD NKRI Tahun 1945</p> <p>1.4.4 Meyakini nilai-nilai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD NKRI Tahun 1945</p> <p>1.4.5 Meyakini nilai-nilai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan</p>	<p>dari berbagai sumber (buku, artikel, media cetak maupun elektronik) tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah</p> <p>❖ Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan secara proaktif dan responsif dengan menggunakan <i>High-Order-Thinking Skills</i> (HOTS) tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah</p> <p>❖ Mengumpulkan data dari berbagai</p>			
--	--	---	--	---	--	--	--

	<p>sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>		<p>daerah menurut UUD NKRI Tahun 1945</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan nilai-nilai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut 	<p>sumber termasuk media cetak dan elektronik secara proaktif dan responsif tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Menyimpulkan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ❖ Mempresentasikan hasil kesimpulan secara proaktif dan responsif tentang pusat dan daerah 			
--	--	--	---	--	--	--	--

LAMPIRAN 11

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : SMA NEGERI 1 PLERET

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Kelas/Semester : X/Ganjil

Materi Pembelajaran : Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alokasi Waktu : 2 X 45 Menit (1 X pertemuan)

A. Kompetensi Inti

No	Kompetensi Inti
K.I.1	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
K.I.2	Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
K.I.3	Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
K.I.4	Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
<p>1.3 Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa.</p>	<p>1.3.1 Membangun nilai-nilai disiplin atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Membangun nilai-nilai toleran yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>.</p> <p>1.3.2 Membangun nilai-nilai tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>
<p>2.3. Bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara.</p>	<p>2.3.1 Membangun nilai-nilai disiplin tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>2.3.2. Membangun nilai-nilai tanggung jawab tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>
<p>3.3.Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>3.3.1. Mengidentifikasi suprastruktur sistem politik Indonesia</p> <p>3.3.2. Mengidentifikasi Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945.</p> <p>3.3.3 Menganalisis tatakelola pemerintahan yang baik</p>

	3.3.4 Menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI
4.3.Mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.3.1.Menyajikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.3.2. Mengomunikasikan hasil telaah analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Tujuan Pembelajaran

Melalui model pembelajaran Saintifik/Discovery Learning dengan metode diskusi, Tanya jawab, dan penugasan tentang Tugas dan wewenang lembaga negara berdasarkan UUD 1945 dan Penjabaran Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan RI, Peserta didik dapat memahami macam-macam Lembaga tinggi negara Indonesia beserta tugas dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945 serta dalam menjabarkan Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan RI. Peserta didik diharapkan memiliki keterampilan untuk menyaji dan mengkomunikasikan hasil diskusi serta mensyukuri nilai-nilai toleransi dan kerjasama menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab.

D. Materi Pembelajaran

a. Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik

Suprastruktur Politik

- Pengertian Suprastruktur Politik menurut David Easton
- Pengertian Suprastruktur Politik menurut Robert A. Dahl
- Pengertian Suprastruktur Politik menurut Jack C. Plano

- Pengertian Suprastruktur Politik menurut Rusadi Kantaprawira

Infrastruktur Politik

1. Pengertian Infrastruktur Politik
2. Kelompok kekuatan Infrastruktur Politik
 - Partai Politik
 - Kelompok Kepentingan (interest group)
 - Kelompok Penekan (pressure group)
 - Kelompok Penekan (pressure group)

b. Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945

1. Macam-macam Lembaga tinggi negara Indonesia
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 - d. Presiden/Wakil Presiden
 - e. Mahkamah Agung
 - f. Mahkamah Konstitusi
 - g. Komisi Yudisial
 - h. Badan Pemeriksa Keuangan
2. Tugas dan wewenang lembaga negara berdasarkan UUD 1945

E. Metode Pembelajaran

Pendekatan/Model : Saintifik/Discovery Learning dengan model pembelajaran bekerja dalam kelompok
 Metode : Diskusi, Presentasi, dan penugasan.

F. Media Pembelajaran

1. Media Pembelajaran
 Vidio dan Power Point tentang Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Alat dan Bahan Pembelajaran
 Laptop, LCD, Sidol, Penghapus, *Whiteboard*.

G. Sumber Belajar

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. 2015. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta. Halaman: 75-85
- b. UUD 1945
- c. Sumber lainnya dan internet.

H. Kegiatan Pembelajaran

No.	Kegiatan Belajar	Waktu
1.	<p>Kegiatan Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, menanyakan kehadiran siswa, kebersihan kelas, dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis, dan sumber belajar.2. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan rasa syukur peserta didik masih dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah (SMA).3. Guru menyampaikan topik pembelajaran hari ini yaitu tentang “Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan tujuan pembelajaran. <i>(Terlampir)</i>	15 menit
	<p>Kegiatan Inti</p> <p>Dinamika Kelompok</p> <ol style="list-style-type: none">a. Guru memutar video dan power point yang berkaitan dengan “Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.b. Peserta didik memperhatikan tayangan video yang diputar oleh guru.	65 menit

	<p>c. Guru membentuk peserta menjadi 6 kelompok yang anggotanya disesuaikan dengan jumlah peserta didik di dalam kelas.</p> <p>d. Guru menambahkan penjelasan tambahan yang berkaitan dengan materi power point dan video yang diputar.</p> <p>2) Mengumpulkan Data</p> <p>a. Peserta didik secara kelompok dibimbing untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang disusun oleh guru, dengan hasil pengamatan video mengenai "Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945" atau dengan mencari referensi buku sumber lain yang relevan, seperti internet, web, dan media lain.</p> <p>b. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi Tugas dan wewenang lembaga negara berdasarkan UUD 1945 dan menjabarkan Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan RI.</p> <p>c. Peserta didik menjawab teka teki silang mengenai tugas dan wewenang lembaga negara serta membuat resume dengan mengisi tabel mengenai "Landasan Hukum Lembaga Negara di Indonesia dan penjabaran Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan RI"</p> <p>3) Menyajikan hasil temuan dan argumentasi (debat)</p> <p>a. Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya mengenai Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjabarkan Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan RI.</p> <p>b. Peserta didik dibimbing guru untuk menyusun laporan dalam bentuk paparan.</p>	
--	---	--

	<p>c. Berdasarkan kelompok menyajikan hasil paparannya dan berargumentasi untuk memberikan alasan dalam menjawab pertanyaan tersebut.</p> <p>4) Menyimpulkan hasil kelompok (Conclution)</p> <p>a. Peserta didik berdasarkan hasil diskusinya dan argument kelompok memberikan kesimpulan hasil.</p>	
	<p>nutup</p> <p>a. Peserta didik ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran “Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.</p> <p>b. Dengan bimbingan guru peserta didik menyimpulkan materi “Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang telah di bahas,sebagai refleksi.</p> <p>c. Guru memberikan tugas untuk pelajaran yang akan datang yaitu materi tentang “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”</p> <p>d. Guru mengakiri pelajaran dengan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa.</p>	15 menit

I. Penilaian pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1) Teknik Penilaian

- a. Penilaian Sikap : Observasi
- b. Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis dan Lisan
- c. Penilaian keterampilan : Unjuk kerja, presentasi, Laporan Penugasan

2) Bentuk Penilaian

- a. Observasi : Jurnal Guru
- b. Tes Tertulis : Uraian, Laporan, Paparan

- c. Unjuk Kerja : Laporan, Paparan.

3) Instrumen Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan (terlampir)

LAMPIRAN MATERI

A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

1. Suprastruktur

Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik, terbentuk dari dua pengertian yaitu sistem dan politik. Menurut Pamudji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Selanjutnya, menurut Rusadi Kantaprawira, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur, komponen atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang kait-mengait dan fungsional. Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya baik yang berupa input (masukan) ataupun output (hasil) yang terdapat dalam lingkungan dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional.

Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siyasah yang berarti strategi. Dari pengertian sistem dan politik beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. David Easton, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.
- b. Robert A. Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antarmanusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan.

- c. Jack C. Plano, mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut.
- d. Rusadi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.

Dari berbagai rumusan di atas, secara umum sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut.

Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Dengan kata lain, melalui sistem politik aspirasi masyarakat (berupa tuntutan dan dukungan) yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut. Sistem politik berbeda dengan sistem- sistem sosial yang lainnya. Ada empat ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain.

- a. Daya jangkauannya universal, meliputi semua anggota masyarakat.
- b. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik.
- c. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah.
- d. Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar.

Dengan demikian, sistem politik yang berjalan tidak akan terlepas dari keseluruhan unsur-unsur suprastruktur dari suatu negara. Dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan

antara komponen- komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Struktur politik negara Indonesiapun terdiri dari dua kekuatan tersebut.

Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Infrastruktur

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat empat kekuatan sebagai berikut.

- a. Partai Politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan.
- b. Kelompok Kepentingan (interest group), yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan

politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen (mandiri). Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan sebagainya.

- c. Kelompok Penekan (pressure group), yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok dan sebagainya.
- d. Media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya, sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi bahkan mencari aspirasi/pendapat sebagai berita politik.

B. Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK,

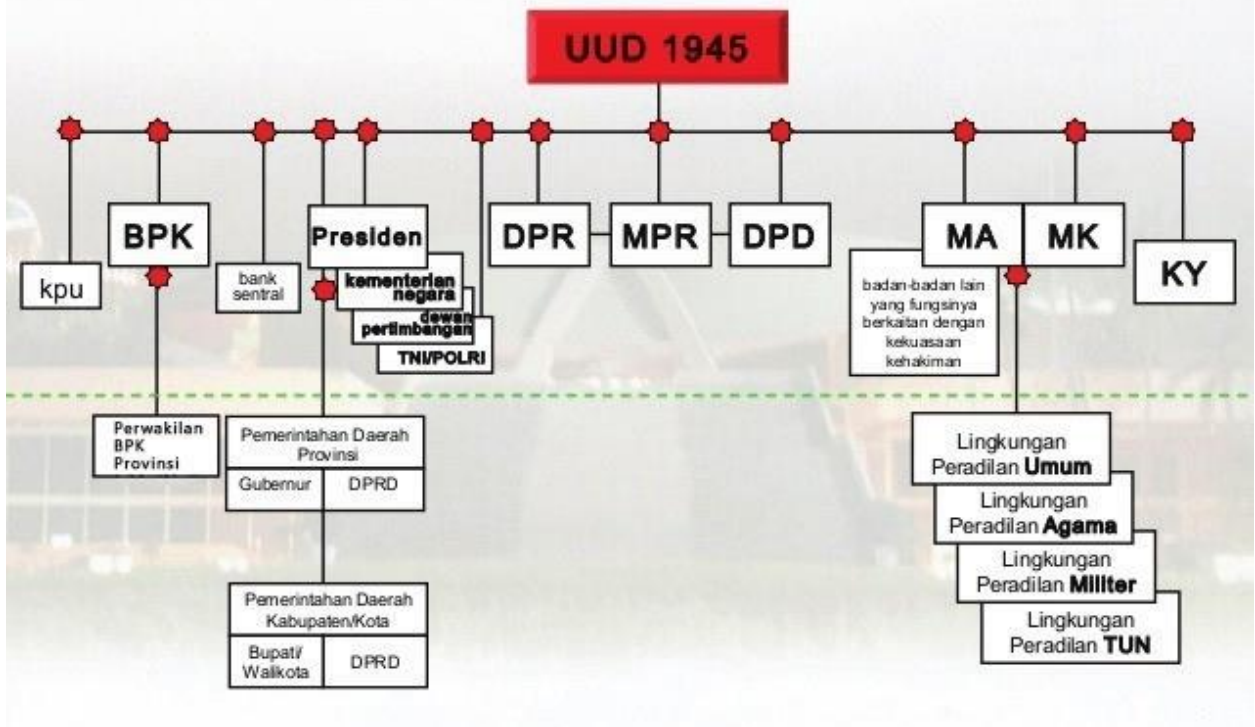
Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Presiden/Wakil Presiden
5. Mahkamah Agung
6. Mahkamah Konstitusi
7. Komisi Yudisial
8. Badan Pemeriksa Keuangan

Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam supra-struktur politik negara kita. Secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut.

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5



Secara garis besar berdasarkan UUD 1945 tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

- Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2 (1) UUD 1945).
- Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4x jumlah provinsi anggota DPD (UU Nomor 22 tahun 2003).
- MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara.
- Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945 sesuai Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

- e. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

2. Presiden

- a. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon (Pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- c. Kekuasaan presiden menurut UUD NRI Tahun 1945.
 - 1) Membuat Undang-Undang bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20)
 - 2) Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 (2))
 - 3) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (Pasal 10)
 - 4) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR (Pasal 11)
 - 5) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
 - 6) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13)
 - 7) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat (1))
 - 8) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2))
 - 9) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15)
 - 10) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada presiden (Pasal 16)
 - 11) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17)

12) Mengajukan RUU APBN (Pasal 23)

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- a. Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- c. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20 A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- d. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/ pendapat dan hak imunitas (Pasal 20 A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- a. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

5. Mahkamah Agung (MA)

- a. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- b. MA membawahi peradilan di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- c. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

6. Mahkamah Konstitusi (MK)

- a. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan:

Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI

Tahun 1945

2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

3) Memutus pembubaran partai politik.

4) Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI

Tahun 1945)

5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan orang, 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR dan tiga anggota diajukan Presiden.

7. Komisi Yudisial (KY)

- a. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR (Pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).
- b. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

8. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- a. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi.
- b. DPD merupakan wakil-wakil provinsi.
- c. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (UU Nomor 22 tahun 2003).
- d. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah.

LAMPIRAN INSTRUMEN PENILAIAN

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang dinilai kemampuan menyampaikan pendapatargumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerjasama kelompok.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas :

Hari, Tanggal :

Pertemuan Ke- :

Materi Pokok :

Rubrik penilaian Sikap kegiatan Pengamatan dan Diskusi

No.	Nama peserta didik	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai
		Kedisiplinan	Partisipasi	Kerjasama		
1						
2						
3						
4						
5	Dst.					

Keterangan

Aspek Kedisiplinan:

Skor	3	Mengerjakan tugas sesuai dengan prosedur dan tepat waktu.
	2	Mengerjakan tugas sesuai prosedur/tepat waktu.
	1	Tidak mengerjakan tugas sesuai prosedur dan tidak tepat waktu

Aspek Partisipasi

Skor	3	Melakukan pengamatan/menyimak, pencatatan dan urun pendapat atau solusi.
	2	Melakukan pengamatan/menyimak/pencatatan/urun pendapat atau solusi.
	1	Tidak melakukan pengamatan, pencatatan dan tidak urun pendapat/ solusi.

Aspek Kerjasama:

Skor	3	Melakukan pengamatan, pencatatan dan penyelesaian tugas secara bersama.
	2	Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara bersama.
	1	Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara individual.

Skor maksimum adalah $3 \times 3 = 9$

Nilai = $\frac{\text{Skor perolehan}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100$

2. Penilaian Pengetahuan

a). Pemahaman Materi

Dalam mempelajari bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami. Oleh karena itu, lakukan penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan ceklis pada kolom PS (Paham Sekali), PSb (Paham Sebagian), BP (Belum Paham).

No	Sub Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	<p>Suprastruktur Politik</p> <p>1.Pengertian Suprastruktur Politik menurut David Easton</p> <p>2.Pengertian Suprastruktur Politik menurut Robert A. Dahl</p> <p>3.Pengertian Suprastruktur Politik menurut Jack C. Plano</p> <p>4.Pengertian Suprastruktur Politik menurut Rusadi Kantaprawira</p>			
2.	<p>Infrastruktur Politik</p> <p>1.Pengertian Infrastruktur Politik</p> <p>2.Kelompok kekuatan Infrastruktur Politik.</p> <p>a. Partai Politik</p> <p>b. Kelompok Kepentingan (interest group)</p> <p>c. Kelompok Penekan (pressure group)</p> <p>d. Media Komunikasi Politik.</p>			

3.	<p>Macam-macam Lembaga tinggi negara Indonesia</p> <p>1.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)</p> <p>2.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)</p> <p>3.Dewan Perwakilan Daerah (DPD)</p> <p>4.Presiden/Wakil Presiden</p> <p>5.Mahkamah Agung (MA)</p> <p>6.Mahkamah Konstitusi (MK)</p> <p>7.Komisi Yudisial (KY)</p> <p>8.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</p>			
4.	<p>Tugas dan wewenang lembaga negara berdasarkan UUD 1945</p>			

b) Soal Pengetahuan

1. Penilaian Pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, diantaranya yaitu tugas untuk mengisi jawaban dalam bentuk tabel dan menjawab soal dalam bentuk teka-teki silang.

a. Soal Teka-Teki Silang

Menurun

1. Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD serta melantik presiden dan wakil presiden.
2. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD 1945.
3. Komisi Yudisial (KY) berwenang mengusulkan pengangkatan
4. Lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara.
5. Yang berkekuasaan menetapkan peraturan pemerintah adalah

Mendatar

1. Lembaga yang berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berhubungan dengan daerah.
2. Jumlah anggota Mahkamah Konstitusi
3. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan
4. Tindakan presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti tidak bersalah dinamakan
5. Lembaga yang berkekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

b. Soal dalam bentuk Tabel

No	Infrastruktur Politik Indonesia	Contoh Peranannya
1.	Partai Politik

	
2.	Kelompok Kepentingan
3.	Kelompok Penekan
4.	Alat Komunikasi Politik

Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Remedial

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari Buku Teks PPKn latihan atau pengayaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku Teks PPKn Kelas X Bab 3 yaitu tentang “Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

2. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran, yaitu materi pada Bab 3 mengenai “Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam pengayaan ini dapat diberikan bahan bacaan yang relevan dengan materi pembelajaran.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah	: SMA NEGERI 1 PLERET
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas/Semester	: X/Ganjil
Materi Pembelajaran	: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia
Alokasi Waktu	: 2 X 45 Menit (1 X pertemuan)

C. Kompetensi Inti

No	Kompetensi Inti
K.I.1	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
K.I.2	Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
K.I.3	Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
K.I.4	Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

D. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.3 Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa.	<p>1.3.1 Membangun nilai-nilai disiplin atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Membangun nilai-nilai toleran yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>.</p> <p>1.3.2 Membangun nilai-nilai tanggung jawab</p>

	atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.3. Bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara.	<p>2.3.1 Membangun nilai-nilai disiplin tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>2.3.2. Membangun nilai-nilai tanggung jawab tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>
3.3.Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	<p>3.3.1. Mengidentifikasi suprastruktur sistem politik Indonesia</p> <p>3.3.2. Mengidentifikasi Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945.</p> <p>3.3.3 Menganalisis tatakelola pemerintahan yang baik</p> <p>3.3.4 Menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI</p>
4.3.Mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	<p>4.3.1.Menyajikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.3.2. Mengomunikasikan hasil telaah analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun</p>

C. Tujuan Pembelajaran

Melalui model pembelajaran Saintifik/Discovery Learning dengan metode diskusi, Tanya jawab, dan penugasan tentang ciri-ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta contoh partisipasi dan perilaku politik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Peserta didik diharapkan dapat memahami Pengertian Tata Kelola Pemerintahan yang baik, unsur pokok Tata Kelola Pemerintahan yang baik , ciri dan karakteristik Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Cakupan/ruang lingkup tata pemerintahan yang baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia. Sehingga dengan mempelajari sub bab tersebut, peserta didik dapat menerapkan Good Governance di lingkungan masyarakat dan negara. Peserta didik dapat memberi contoh partisipasi politik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara Peserta didik diharapkan memiliki keterampilan untuk menyaji dan mengkomunikasikan hasil diskusi serta mensyukuri nilai-nilai toleransi dan kerjasama menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab.

D. Materi Pembelajaran

a. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

1. Pengertian Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
2. Unsur pokok Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
3. Ciri dan karakteristik Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
4. Cakupan/ruang lingkup tata pemerintahan yang baik.
5. Syarat untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia

1. Pengertian Partisipasi Politik.
2. Ciri-ciri Partisipasi politik yang baik.
3. Contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

E. Metode Pembelajaran

Pendekatan/Model : Saintifik/Discovery Learning dengan model pembelajaran bekerja dalam kelompok

Metode : Diskusi, Presentasi, dan penugasan.

F. Media Pembelajaran

3. Media Pembelajaran

Power Point dan Vidio tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia.

4. Alat dan Bahan Pembelajaran

Laptop, LCD, Sidol, Penghapus, *Whiteboard*.

G. Sumber Belajar

- d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*.2015.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta. Halaman: 86-98
- e. UUD 1945
- f. Sumber lainnya dan internet.

H. Kegiatan Pembelajaran

No.	Kegiatan Belajar	Waktu
1.	giatan Pendahuluan 4. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, menanyakan kehadiran siswa, kebersihan kelas, dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis, dan sumber belajar. 5. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan rasa syukur peserta didik masih dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah (SMA). 6. Guru menyampaikan topik pembelajaran hari ini yaitu tentang	10 menit

	<p>“Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia” dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan tujuan pembelajaran. (Terlampir)</p>	
	<p>giatan Inti</p> <p>Dinamika Kelompok</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Guru memutar video dan power point yang berkaitan dengan “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia”. b. Peserta didik memperhatikan tayangan video yang diputar oleh guru. c. Guru membentuk peserta menjadi 6 kelompok yang anggotanya disesuaikan dengan jumlah peserta didik di dalam kelas. d. Guru menambahkan penjelasan tambahan yang berkaitan dengan materi power point dan video yang diputar. <p>2) Mengumpulkan Data</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Peserta didik secara kelompok dibimbing untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang disusun oleh guru, dengan hasil pengamatan video mengenai contoh Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia atau dengan mencari referensi buku sumber lain yang relevan, seperti internet, web, dan media lain. e. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi ciri-ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, apakah Indonesia sudah mencerminkan good governance dan apa indikatornya, serta mencari contoh partisipasi dan perilaku politik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. f. Peserta didik menjawab soal dan membuat resume dengan mengisi tabel mengenai ciri-ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta contoh partisipasi dan perilaku politik. 	<p>menit</p>

	<p>3) Menyajikan hasil temuan dan argumentasi (debat)</p> <p>d. Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya mengenai ciri-ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, hasil analisis apakah Indonesia sudah mencerminkan good governance beserta indikatornya, dan contoh partisipasi dan perilaku politik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara.</p> <p>e. Peserta didik dibimbing guru untuk menyusun laporan dalam bentuk paparan.</p> <p>f. Berdasarkan kelompok menyajikan hasil paparannya dan berargumentasi untuk memberikan alasan dalam menjawab pertanyaan tersebut.</p> <p>4) Menyimpulkan hasil kelompok (Conclution)</p> <p>b. Peserta didik berdasarkan hasil diskusinya dan argument kelompok memberikan kesimpulan hasil.</p>	
<p>Penutup</p>	<p>e. Peserta didik ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia”.</p> <p>f. Dengan bimbingan guru peserta didik menyimpulkan materi “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia” yang telah di bahas, sebagai refleksi.</p> <p>g. Guru memberikan tugas membaca untuk pelajaran yang akan datang yaitu materi tentang “Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah”</p> <p>h. Guru mengakhiri pelajaran dengan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa.</p>	<p>15 menit</p>

I. Penilaian pembelajaran Remedial dan Pengayaan

4) Teknik Penilaian

- d. Penilaian Sikap : Observasi
- e. Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis dan Lisan
- f. Penilaian keterampilan : Unjuk kerja, presentasi, Laporan Penugasan

5) Bentuk Penilaian

- d. Observasi : Jurnal Guru
- e. Tes Tertulis : Uraian, Laporan, Paparan
- f. Unjuk Kerja : Laporan, Paparan.

6) Instrumen Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan (terlampir)

LAMPIRAN MATERI

A. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Menurut World Bank, Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan

pengecahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir- akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang bersifat sinergis.

- a. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu.
- b. Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik.
- c. Unsur warga masyarakat (stakeholders).

Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

Menurut Laode Ida (2002), tatakelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut.

- a. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi.
- b. Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.
- c. Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
- d. Keseimbangan kekuatan (balance of force), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen

yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama.

- e. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut.

- 1) Hubungan antara pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar.
- 2) Hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat.
- 3) Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- 4) Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat (pejabat birokrat). Misalnya, mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat atau politisi.
- 5) Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan.
- 6) Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang (RUU).
- 7) Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerja sama di segala bidang untuk kemajuan bangsa.

Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut.

- a. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.

- b. Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.
- d. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM.
- e. Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (rights to information) keputusan pemerintah terjamin.

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat.

B. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia

Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang/ sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh Verba, yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya.

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik.

Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah.
2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat.
3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan.
4. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat.
5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja.
6. Dapat menerima perbedaan pendapat.
7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa.
8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya.
9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan.
10. Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara.
11. Patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum.

12. Membangun budaya politik yang demokratis.
13. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan.
14. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik.
15. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air.

Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara, dalam bentuk institusi formal (DPR) ataupun informal (partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan).

Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

a. Di Lingkungan Sekolah

Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- 1) Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra dan sebagainya.
- 2) Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti.
- 3) Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah.

Dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung siswa dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan sebagainya. Supaya perilaku politik yang ditampilkan

mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma sebagai berikut.

1. Pancasila.
2. Undang-Undang Dasar RI 1945.
3. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
4. Tata tertib siswa, dan sebagainya.

b. Di Lingkungan Masyarakat

Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai berikut.

- 1) Forum warga.
- 2) Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan sebagainya.
- 3) Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya.

Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan dan norma-norma sebagai berikut.

- 1) Pancasila dan UUD RI 1945.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya undang-undang HAM, undang-undang parpai politik dan sebagainya.
- 3) Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT-RW, Peraturan Desa dan sebagainya.
- 4) Norma-norma sosial yang berlaku

c. Di Lingkungan Negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden.
- 2) Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada).
- 3) Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun.

Perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut.

- 1) Pancasila.
- 2) UUD NRI 1945.
- 3) Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan sebagainya.
- 4) Peraturan Pemerintah.
- 5) Keputusan Presiden.
- 6) Peraturan daerah.

Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam

berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

LAMPIRAN INSTRUMEN PENILAIAN

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang dinilai kemampuan menyampaikan pendapatargumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerjasama kelompok.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas :

Hari, Tanggal :

Pertemuan Ke- :

Materi Pokok :

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian					Empaty
		Iman Taqwa	Toleransi	Jujur	Disiplin	Tanggung jawab	

2. Penilaian Pengetahuan

a). Pemahaman Materi

Dalam mempelajari bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami. Oleh karena itu, lakukan penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan ceklis pada kolom PS (Paham Sekali), PSb (Paham Sebagian), BP (Belum Paham).

No	Sub Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	<p>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengertian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.2. Unsur pokok Tata Kelola Pemerintahan yang baik3. Ciri dan karakteristik Tata Kelola Pemerintahan yang baik4. Cakupan/ruang lingkup tata pemerintahan yang baik5. Syarat untuk mengimplementasikan tata			

	kelola pemerintahan yang baik			
2.	Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia 1. Pengertian Partisipasi Politik 2. Ciri-ciri Partisipasi politik yang baik 3. Contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. a. Di Lingkungan Sekolah b. Di Lingkungan Masyarakat c. Di Lingkungan Negara			

b) Soal Pengetahuan

1. Apakah negara Indonesia sudah mencerminkan good governance? Apa saja indikatornya?

Jawab:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Contoh Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Politik.

Masing-masing kelompok mengerjakan contoh partisipasi politik di lingkungan yang yang berbeda satu sama lain.

No	Lingkungan	Contoh Partisipasi	Manfaatnya
1	Sekolah		

No	Lingkungan	Contoh Partisipasi	Manfaatnya
2	Masyarakat		

No	Lingkungan	Contoh Partisipasi	Manfaatnya
3	Negara		

Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Remedial

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari Buku Teks PPKn latihan atau pengayaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku Teks PPKn Kelas X Bab 3 yaitu tentang “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia”.

Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

2. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran, yaitu materi pada Bab 3 mengenai “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia”. Dalam pengayaan ini dapat diberikan bahan bacaan yang relevan dengan materi pembelajaran.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : SMA NEGERI 1 PLERET

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Kelas/Semester : X/Ganjil

Materi Pembelajaran : Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.

Alokasi Waktu : 2 X 45 Menit (1 X pertemuan)

E. Kompetensi Inti

No	Kompetensi Inti
K.I.1	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
K.I.2	Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa

	dalam pergaulan dunia.
K.I.3	Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi,seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
K.I.4	Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

F. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.4 Menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.	<p>1.4.1 Membangun nilai-nilai proaktif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>1.4.2 Membangun nilai-nilai responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>
2.4. Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat.	<p>2.4.1 Membangun nilai-nilai proaktif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>2.4.2. Membangun nilai-nilai responsif yang terkandung dalam hubungan struktural</p>

	dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.4. Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	<p>3.4.1. Menganalisis desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>3.4.2. Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah pusat.</p> <p>3.4.3 Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah</p> <p>3.4.4 Menunjukkan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah</p>
4.4. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	<p>4.4.1.Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.4.2.Mengomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>

C. Tujuan Pembelajaran

Melalui model pembelajaran berbasis permasalahan (*Problem Base Learning*) tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia, peserta didik dapat memberikan alternative solusi dan permasalahan desentralissi melalui evaluasi terhadap optimalisasi menyaji dan mengkomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional

pemerintah pusat dan daerah serta menghormati dan peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa.

D. Materi Pembelajaran

Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

a. Desentralisasi

6. Pengertian Desentralisasi menurut kelompok Anglo Saxon dan Kontinental.
7. Pengertian Desentralisasi menurut ahli ilmu tata negara.
8. Pembagian Desentralisasi menurut Amran Muslimin.
9. Kelebihan desentralisasi .
10. kelemahan desentralisasi.

b. Otonomi Daerah

4. Pengertian Otonomi Daerah menurut C. J. Franseen.
5. Pengertian Otonomi Daerah menurut J. Wajong.
6. Pengertian Otonomi Daerah menurut Ateng Syarifuddin
7. Pengertian Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

c. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

d. Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia

peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia

e. Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia

1. Nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.
2. Dasar pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten/kota.
3. Prinsip otonomi daerah yang dianut di Indonesia.

E. Metode Pembelajaran

Pendekatan/Model : *Problem Base Learning* dengan metode diskusi dalam kelompok.

Metode : Diskusi, Presentasi, dan penugasan.

F. Media Pembelajaran

5. Media Pembelajaran
Power Point tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alat dan Bahan Pembelajaran
Laptop, LCD, Sidol, Penghapus, *Whiteboard*.

G. Sumber Belajar

- g. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta. Halaman: 101-112.
- h. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta. Halaman: 151-172
- i. UUD NKRI Tahun 1945
- j. Sumber lainnya dan internet.

H. Kegiatan Pembelajaran

No.	Kegiatan Belajar	Waktu
1.	giatan Pendahuluan 7. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, menanyakan kehadiran siswa, kebersihan kelas, dan kerapian kelas, kesiapan	10 menit

	<p>buku tulis, dan sumber belajar.</p> <p>8. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan rasa syukur peserta didik masih dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah (SMA).</p> <p>9. Guru menyampaikan topik pembelajaran hari ini yaitu tentang “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan tujuan pembelajaran. <i>(Terlampir)</i></p>	
	<p>giatan Inti</p> <p>Dinamika Kelompok</p> <p>e. Guru menayangkan power point yang berkaitan dengan “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”.</p> <p>f. Peserta didik memperhatikan materi di power point yang ditayangkan oleh guru.</p> <p>g. Guru membentuk peserta menjadi 6 kelompok yang anggotanya disesuaikan dengan jumlah peserta didik di dalam kelas.</p> <p>h. Guru menambahkan penjelasan tambahan yang berkaitan dengan materi power point yang ditayangkan di depan kelas.</p> <p>2) Mengumpulkan Data</p> <p>g. Peserta didik secara kelompok dibimbing untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang disusun oleh guru, dengan hasil bacaan mengenai materi “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia” dengan mencari referensi buku sumber lain yang relevan, seperti internet, web, dan media lain.</p> <p>h. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, penyalahgunaan pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah, penyebab saat ini</p>	65 menit

	<p>banyak kepala daerah yang tersangkut dalam kasus korupsi di daerahnya, serta dampak jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah.</p> <p>i. Peserta didik menjawab soal dan membuat resume mengenai materi “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”.</p> <p>3) Menyajikan hasil temuan dan argumentasi (debat)</p> <p>a. Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, penyalahgunaan pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah, penyebab saat ini banyak kepala daerah yang tersangkut dalam kasus korupsi di daerahnya, serta dampak jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah.</p> <p>b. Peserta didik dibimbing guru untuk menyusun laporan dalam bentuk paparan.</p> <p>c. Berdasarkan kelompok menyajikan hasil paparannya dan berargumentasi untuk memberikan alasan dalam menjawab pertanyaan tersebut.</p> <p>4) Menyimpulkan hasil kelompok (Conclusion)</p> <p>c. Peserta didik berdasarkan hasil diskusinya dan argument kelompok memberikan kesimpulan hasil.</p>	
--	--	--

	<p>utup</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Peserta didik ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”. j. Dengan bimbingan guru peserta didik menyimpulkan materi “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang telah di bahas,sebagai refleksi. k. Guru memberikan tugas membaca untuk pelajaran yang akan datang yaitu materi tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat” l. Guru mengakiri pelajaran dengan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa. 	15 menit
--	---	----------

I. Penilaian pembelajaran Remedial dan Pengayaan

7) Teknik Penilaian

- g. Penilaian Sikap : Observasi
- h. Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis dan Lisan
- i. Penilaian keterampilan : Unjuk kerja, presentasi, Laporan Penugasan

8) Bentuk Penilaian

- g. Observasi : Jurnal Guru
- h. Tes Tertulis : Uraian, Laporan, Paparan
- i. Unjuk Kerja : Laporan, Paparan.

9) Instrumen Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan (terlampir)

LAMPIRAN MATERI

A. Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Desentralisasi

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan centerum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.

Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo Saxon dan Kontinental. Kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif.

Adapun Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.

Menurut ahli ilmu tata negara, dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada

pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.

Menurut Amran Muslimin (2009:120, desentralisasi dibedakan atas 3 (tiga) bagian.

- 1) Desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
- 2) Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani.
- 3) Desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah.

Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat.
- b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien.
- c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif.
- d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat.
- b. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
- c. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.
- d. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah.
- e. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- f. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan.
- g. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing.
- h. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka pada awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.
- i. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi.
- j. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu.
- k. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung.

Adapun kelemahan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
- b. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.

- c. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
- d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
- e. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

2. Otonomi Daerah

Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli. Menurut H.M. Agus Santoso, pengertian otonomi daerah di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. C. J. Franseen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan- urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya.
- b. J. Wajong, otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.
- c. Ateng Syarifuddin, otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
- d. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi.

3. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya.

4. Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia

Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND).
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Indonesia Timur.

- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- j. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.

- 1) Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (eenheidstaat), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.
- 2) Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial, yang bersumber dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan

nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Berkaitan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Dengan demikian, titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten/kota dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Dimensi Politik, kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim.
- 2) Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.
- 3) Kabupaten/kota adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten/kota-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab dan dinamis.

- a. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah.
- b. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air.
- c. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.

Selain itu, terdapat lima prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut uraiannya.

1) Prinsip Kesatuan

Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan

masyarakat lokal.

2) Prinsip Riil dan Tanggung Jawab

Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah.

3) Prinsip Penyebaran

Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya.

4) Prinsip Keserasian

Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian.

5) Prinsip Pemberdayaan

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunann dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

LAMPIRAN INSTRUMEN PENILAIAN

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang dinilai kemampuan menyampaikan pendapatargumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerjasama kelompok.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas :

Hari, Tanggal :

Pertemuan Ke- :

Materi Pokok :

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian					Empaty
		Iman Taqwa	Toleransi	Jujur	Disiplin	Tanggung jawab	

2. Penilaian Pengetahuan

a). Pemahaman Materi

Dalam mempelajari bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami. Oleh karena itu, lakukan penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan ceklis pada kolom PS (Paham Sekali), PSb (Paham Sebagian), BP (Belum Paham).

No	Sub Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Desentralisasi 1. Pengertian Desentralisasi menurut kelompok Anglo Saxon dan Kontinental 2. Pengertian Desentralisasi menurut ahli ilmu tata negara. 3. Pembagian Desentralisasi menurut Amran			

	<p>Muslimin.</p> <p>4. Kelebihan desentralisasi.</p> <p>5. Kelemahan desentralisasi.</p>			
2.	<p>Otonomi Daerah</p> <p>4. Pengertian Otonomi Daerah menurut C. J. Franseen</p> <p>5. Pengertian Otonomi Daerah menurut J. Wajong</p> <p>6. Pengertian Otonomi Daerah menurut Ateng Syarifuddin</p> <p>7. Pengertian Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015.</p>			
3.	<p>Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan</p> <p>1. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia</p>			
4.	<p>Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia</p> <p>1. Peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia</p>			
5.	<p>Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia.</p> <p>1. Nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI</p>			

	<p>Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.</p> <p>2. Dasar pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten/kota.</p> <p>3. Prinsip otonomi daerah yang dianut di Indonesia</p>			
--	---	--	--	--

b) Soal Pengetahuan

Jawab:

1. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....

3. Mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering disalahgunakan?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Mengapa saat ini banyak kepala daerah yang tersangkut dalam kasus korupsi di daerahnya? Apa penyebabnya?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah?

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Remedial

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari Buku Teks PPKn latihan atau pengayaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku Teks PPKn Kelas X Bab 4 yaitu tentang “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

2. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran, yaitu materi pada Bab 4 mengenai “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam pengayaan ini dapat diberikan bahan bacaan yang relevan dengan materi pembelajaran.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : SMA NEGERI 1 PLERET

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Kelas/Semester : X/Ganjil

Materi Pembelajaran : Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan Daerah

Alokasi Waktu : 2 X 45 Menit (1 X pertemuan).

G. Kompetensi Inti

No	Kompetensi Inti
K.I.1	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
K.I.2	Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan

	sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
K.I.3	Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi,seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
K.I.4	Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

H. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.4 Menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.	1.4.1 Membangun nilai-nilai proaktif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1.4.2 Membangun nilai-nilai responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.4. Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang	2.4.1 Membangun nilai-nilai proaktif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan

<p>harmonis di daerah setempat.</p>	<p>daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>2.4.2. Membangun nilai-nilai responsif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>
<p>3.4. Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>3.4.1. Menganalisis desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>3.4.2. Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah pusat.</p> <p>3.4.3 Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah</p> <p>3.4.4 Menunjukkan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah</p>
<p>4.4. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>4.4.1.Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.4.2.Mengomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>

C. Tujuan Pembelajaran

Melalui model pembelajaran berbasis permasalahan (*Problem Base Learning*) tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia, peserta didik dapat memberikan alternative solusi dan permasalahan yang terjadi pada penerapan otonomi daerah yang dialami oleh pemerintah pusat dan daerah melalui evaluasi terhadap optimalisasi menyaji dan mengkomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah serta menghormati dan peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa.

D. Materi Pembelajaran

Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

1. Fungsi yang dimiliki Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah

- a. Fungsi Layanan (Servicing Function)
- b. Fungsi Pengaturan (Regulating Function)

Fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah :

- Menyediakan infrastruktur ekonomi
- Menyediakan barang dan jasa kolektif
- Menjembatani konflik dalam masyarakat
- Menjaga kompetisi
- Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa
- Menjaga stabilitas ekonomi

c. Fungsi Pemberdayaan

2. kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat
3. Tujuan umum dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah.
4. Tujuan khusus dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah.

E. Metode Pembelajaran

Pendekatan/Model : *Problem Base Learning* dengan metode diskusi dalam kelompok.

Metode : Diskusi, Presentasi, dan penugasan.

F. Media Pembelajaran

7. Media Pembelajaran

Power Point tentang Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat.

8. Alat dan Bahan Pembelajaran

Laptop, LCD, Sidol, Penghapus, *Whiteboard*.

G. Sumber Belajar

k. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta. Halaman: 113-133.

l. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. **Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X**. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta. Halaman: 161-166

m. UUD NKRI Tahun 1945

n. Sumber lainnya dan internet.

H. Kegiatan Pembelajaran

	Kegiatan Belajar	Waktu
1.	Kegiatan Pendahuluan 10. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, menanyakan kehadiran siswa, kebersihan kelas, dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis, dan sumber belajar. 11. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan rasa syukur peserta didik masih dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah (SMA).	10 menit

<p>12. Guru menyampaikan topik pembelajaran hari ini yaitu tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan Daerah” dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan tujuan pembelajaran. <i>(Terlampir)</i></p>	
<p>giatan Inti</p> <p>Dinamika Kelompok (Mengamati Fenomena)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Guru menayangkan power point yang berkaitan dengan “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan daerah”. j. Peserta didik memperhatikan materi di power point yang ditayangkan oleh guru. k. Guru membentuk peserta menjadi 5 kelompok yang anggotanya disesuaikan dengan jumlah peserta didik di dalam kelas. l. Guru bersama peserta didik memaparkan permasalahan dan menyepakati yang menjadi bahasan kelas, yaitu <ul style="list-style-type: none"> 1). Mencari permasalahan yang terjadi pada penerapan otonomi daerah yang dialami pemerintah pusat. Apa dampak dari permasalahan tersebut dan mencari alternative pemecahan masalah. 2) Menganalisis apakah Pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah telah menjalankan fungsinya dengan baik m. Guru menambahkan penjelasan tambahan yang berkaitan dengan materi power point yang ditayangkan di depan kelas. <p>2) Mengumpulkan Data dan Menganalisa Kasus</p> <ul style="list-style-type: none"> j. Peserta didik secara kelompok dibimbing untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang disusun oleh guru, dengan hasil bacaan mengenai materi “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan Daerah” dengan mencari referensi buku sumber lain yang relevan, seperti internet, web, dan media lain. 	<p>menit</p>

<p>k. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi apakah Pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah telah menjalankan fungsinya dengan baik dan mencari permasalahan yang terjadi pada penerapan otonomi daerah yang dialami pemerintah pusat. Apa dampak dari permasalahan tersebut dan mencari alternative pemecahan masalah.</p> <p>l. Peserta didik menjawab soal dan membuat resume mengenai materi “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan Daerah”.</p> <p>3) Menyajikan hasil temuan dan argumentasi (debat)</p> <p>a. Peserta didik berdasarkan kelompoknya, mengemukakan jawaban dari hasil diskusinya mengenai apakah Pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah telah menjalankan fungsinya dengan baik dan mencari permasalahan yang terjadi pada penerapan otonomi daerah yang dialami pemerintah pusat. Apa dampak dari permasalahan tersebut dan mencari alternative pemecahan masalah.</p> <p>b. Peserta didik dibimbing guru untuk menyusun laporan dalam bentuk paparan.</p> <p>c. Berdasarkan kelompok menyajikan hasil paparannya dan berargumentasi untuk memberikan alasan dalam menjawab pertanyaan tersebut.</p> <p>4) Menyimpulkan hasil kelompok (Conclution)</p> <p>d. Peserta didik berdasarkan hasil diskusinya dan argument kelompok memberikan kesimpulan hasil.</p>	
<p>nutup</p> <p>m. Peserta didik ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat”.</p> <p>n. Dengan bimbingan guru peserta didik menyimpulkan materi “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat” yang</p>	<p>15 menit</p>

<p>telah di bahas, sebagai refleksi.</p> <p>o. Guru memberikan tugas membaca untuk pelajaran yang akan datang yaitu materi tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah”</p> <p>p. Guru mengakiri pelajaran dengan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa.</p>	
--	--

I. Penilaian pembelajaran Remedial dan Pengayaan

Teknik Penilaian

- j. Penilaian Sikap : Observasi
- k. Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis dan Lisan
- l. Penilaian keterampilan : Unjuk kerja, presentasi, Laporan Penugasan

Bentuk Penilaian

- j. Observasi : Jurnal Guru
- k. Tes Tertulis : Uraian, Laporan, Paparan
- l. Unjuk Kerja : Laporan, Paparan.

Instrumen Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan (terlampir)

LAMPIRAN MATERI

Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi.

1. Fungsi Layanan (Servicing Function)

Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama.

Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya.

2. Fungsi Pengaturan (Regulating Function)

Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Sementara itu ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah.

a. Menyediakan infrastruktur ekonomi

Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya.

b. Menyediakan barang dan jasa kolektif

Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public goods yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya.

c. Menjembatani konflik dalam masyarakat

Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat.

d. Menjaga kompetisi

Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut.

e. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa

Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus.

f. Menjaga stabilitas ekonomi

Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi.

3. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma.

Selain kewenangan tersebut di atas, pemerintah pusat memiliki kewenangan lain sebagai berikut.

- 1) Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.
- 2) Dana perimbangan keuangan.
- 3) Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.
- 4) Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
- 5) Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis.
- 6) Konservasi dan standarisasi nasional.

Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 2) Memperhatikan pemerataan dan keadilan.
- 3) Menciptakan demokratisasi.
- 4) Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional.

- 5) Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat adalah sebagai berikut.

- 1) Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara.
- 2) Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara.
- 3) Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional.
- 4) Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal dan berisiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, teknologi satelit, penerbangan antariksa, dan sebagainya.
- 5) Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal.
- 6) Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya.
- 7) Memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.

LAMPIRAN INSTRUMEN PENILAIAN

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang dinilai kemampuan menyampaikan pendapatargumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerjasama kelompok.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas :

Hari, Tanggal :

Pertemuan Ke- :

Materi Pokok :

Rubrik penilaian Sikap kegiatan Pengamatan dan Diskusi

No.	Nama peserta didik	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai
		Kedisiplinan	Partisipasi	Kerjasama		
1						
2						
3						
4						
5	Dst.					

Keterangan

Aspek Kedisiplinan:

Skor	3	Mengerjakan tugas sesuai dengan prosedur dan tepat waktu.
	2	Mengerjakan tugas sesuai prosedur/tepat waktu.
	1	Tidak mengerjakan tugas sesuai prosedur dan tidak tepat waktu

Aspek Partisipasi

Skor	3	Melakukan pengamatan/menyimak, pencatatan dan urun pendapat atau solusi.
	2	Melakukan pengamatan/menyimak/pencatatan/urun pendapat atau solusi.
	1	Tidak melakukan pengamatan, pencatatan dan tidak urun pendapat/ solusi.

Aspek Kerjasama:

- 3 Melakukan pengamatan, pencatatan dan penyelesaian tugas secara bersama.
- Skor 2 Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara bersama.
- 1 Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara individual.

Skor maksimum adalah $3 \times 3 = 9$

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100$$

2. Penilaian Pengetahuan

a). Pemahaman Materi

Dalam mempelajari bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami. Oleh karena itu, lakukan penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan ceklis pada kolom PS (Paham Sekali), PSb (Paham Sebagian), BP (Belum Paham).

No	Sub Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	1. Fungsi yang dimiliki Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah a. Fungsi Layanan (Servicing Function)			

	<p>b. Fungsi Pengaturan (Regulating Function)</p> <p>Fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah.</p> <p>c. Fungsi Pemberdayaan</p>			
2.	<p>kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. 2) Dana perimbangan keuangan. 3) Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. 4) Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. 5) Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis. 6) Konservasi dan standarisasi nasional. 			
3.	<p>Tujuan umum dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah.</p>			
4.	<p>Tujuan khusus dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah.</p>			

b) Soal Pengetahuan

Jawab:

1. Apakah Pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah telah menjalankan fungsinya dengan baik?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Analisis permasalahan yang terjadi pada penerapan otonomi daerah yang dialami oleh pemerintah pusat. Apa dampak dari permasalahan tersebut dan berikan solusinya!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil tugas peserta didik dengan format sebagai berikut

- :
 Nama Peserta Didik :
- Kelas :
- Materi :
- Tanggal :

No.	KD	Semester	Kriteria	Ket
-----	----	----------	----------	-----

			Keaslian	Kesesuaian materi	Kualitas / Kerapihan	Ketepatan Waktu	

Catatan:

- Setiap karya peserta didik sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti pekerjaannya.
- Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 0 - 100.
- Semakin baik hasil penugasan/karya peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan.
- Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan/kelebihan bukti belajar (evidence) yang dinilai.

1. Analisis Hasil Penilaian

No	Nama	Nilai	Keterangan	
			Tuntas	Belum Tuntas

Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Remedial

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari Buku Teks PPKn latihan atau pengayaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku Teks PPKn Kelas X Bab 4 yaitu tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat”.

Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

2. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran, yaitu materi pada Bab 4 mengenai “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat”. Dalam pengayaan ini dapat diberikan bahan bacaan yang relevan dengan materi pembelajaran.

LAMPIRAN 12

KISI – KISI ULANGAN HARIAN

Tahun Pelajaran 2017/2018

Nama Sekolah : SMAN 1 PLERET

Mata Pelajaran : PKn

Kelas/ Semester : X / 1

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok	Jenis Soal	No. Soal
1	3. menampilkan sikap keterbukaan dan kedilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	3.1 Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat.	Siswa mampu menjelaskan pengertian dari otonomi daerah	Pengertian otonomi daerah	PG	1
			Siswa mampu menunjukkan arti penting otonomi daerah.	arti penting otonomi daerah.	PG	2
			Siswa mampu menjelaskan asas-asas yang dimiliki pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah.	asas-asas yang dimiliki pemerintah daerah	PG	3
			Siswa mampu menunjukkan alasan dilaksanakannya otonomi daerah.	Pentingnya otonomi daerah	PG	4
			Siswa mampu menunjukkan Faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah.	Faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah.	PG	5
			Siswa mampu menjelaskan kelebihan otonomi daerah.	Kelebihan otonomi daerah	PG	6
			Siswa mampu menjelaskan kewenangan pemerintah pusat.	wenangan pemerintah pusat.	PG	7
		3.2 Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang	Siswa mampu menjelaskan fungsi pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah	fungsi yang dimiliki pemerintah pusat.	PG	8

		Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Siswa mampu menjelaskan wewenang pemerintah daerah.	wewenang pemerintah daerah.	PG	9
			Siswa mampu mengidentifikasi Faktor penghambat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia	Faktor penghambat pelaksanaan otonomi daerah	PG	10
			Siswa mampu menjelaskan hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	PG	11
			Siswa mampu mengidentifikasi prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah.	Prinsip dalam menyelenggarakan otonomi daerah	PG	12
			Siswa mampu menjelaskan nilai dasar dalam otonomi daerah.	Nilai dasar otonomi daerah	PG	13
			Siswa mampu menjelaskan Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang keuangan.	Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang keuangan.	PG	14
			Siswa mampu menjelaskan Prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah	PG	

		Siswa mampu menjelaskan otonomi daerah dan penerapan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pengertian otonomi daerah dan penerapannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Essay	1
		Siswa mampu mengidentifikasi pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dan dekonsentrasi	pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dan dekonsentrasi	Essay	2
		Siswa mampu menjelaskan kelebihan desentralisasi.	kelebihan desentralisasi.	Essay	3
		Siswa mampu menjelaskan fungsi yang dimiliki pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah.	Fungsi yang dimiliki pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah	Essay	4
		Siswa mammpu mengidentifikasi daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus di Indonesia.	Daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus di Indonesia	Essay	5

LAMPIRAN 13

SOAL ULANGAN HARIAN

A. Pilihan Ganda

1. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan.....
 - A. Kehendak masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat di daerah
 - B. Kehendak para wakil rakyat (DPRD) yang ada di daerah.
 - C. Aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - D. Anjuran pemerintah pusat untuk disesuaikan dengan kondisi dengan kondisi daerah.
 - E. Keinginan pejabat pemerintah daerah yang sedang berkuasa.
2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
 - 1) Meringankan tugas presiden.
 - 2) Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
 - 3) Meningkatkan pendapatan negara.
 - 4) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
 - 5) Mengurangi kepadatan lalu lintas di ibu kota negara
 - 6) Meningkatkan peran serta masyarakat.Dari pernyataan-pernyataan tersebut, yang merupakan arti penting otonomi daerah ditunjukkan pada nomor.....
 - A. 1), 3), dan 4)
 - B. 1), 3), dan 5)
 - C. 2), 4), dan 5)
 - D. 2), 4), dan 6)
 - E. 4), 5), dan 6)
3. Pemerintah daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam

rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan

- A. Asas keterbukaan dan akuntabilitas
 - B. Asas otonomi dan tugas pembantuan
 - C. Asas kepastian hukum dan demokrasi
 - D. Asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
 - E. Asas keseimbangan dan pembagian keuntungan
4. Berikut ini alasan yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan otonomi daerah karena Indonesia adalah.....
- A. negara demokrasi berdasarkan hukum
 - B. negara demokrasi berpenduduk besar
 - C. negara yang subur dan rakyatnya ramah
 - D. negara besar yang penduduknya majemuk
 - E. negara hukum sehingga rakyatnya mudah diatur
5. Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah...
- A. keterampilan para pengusaha dalam menghadapi persaingan.
 - B. sikap mental dan partisipasi seluruh warga negara
 - C. tersedianya tenaga kerja dalam pembangunan
 - D. tingkat pendidikan warga masyarakat
 - E. sumber daya alam yang melimpah
6. Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta.....
- A. meningkatkan peran dari fungsi DPRD
 - B. meningkatkan peran dan fungsi kepala daerah
 - C. menumbuhkan kemakmuran masyarakat setempat.
 - D. meningkatkan partisipasi dan peran perangkat daerah
 - E. memberdayakan kepala daerah dan perangkat daerah otonom lainnya.
7. Perhatikan data berikut:
- (1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama
 - (2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri
 - (3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanian

(4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi

(5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan

Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor

A. 1 dan 2

B. 1 dan 3

C. 1 dan 5

D. 2 dan 4

E. 2 dan 5

8. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam suatu persoalan. Hal diatas merupakan salah salah satu fungsi pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah, yaitu fungsi....

A. fungsi pelayanan

B. fungsi pengaturan

C. fungsi pemberdayaan

D. Fungsi pembantuan

E. Fungsi kekuasaan

9. Berdasarkan bunyi pasal 18 ayat (1) UUD 1945, dibentuklah pemerintah daerah. Hal ini dapat dimaknai....

A. pemerintah pusat tidak membantu pemerintah daerah

B. pemerintah pusat dan daerah sama-sama mengelola urusan pemerintah daerah

C. pemerintah pusat mendapat bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam di daerah

D.pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai potensi yang dimiliki.

E. pemerintah daerah ikut serta mengelola urusan pemerintah pusat.

10. Faktor penghambat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah....

A. tidak semua daerah otonom daerah di Indonesia memiliki sumber daya manusia yang tinggi sehingga masih memerlukan bantuan dari pusat atau daerah lain.

- B. para pejabat di daerah merasa tidak lagi beruntung kepada pejabat tingkat pusat.
 - C. pemerintah pusat tidak mau lagi mengurus kegiatan pejabat-pejabat pemerintah daerah.
 - D. pejabat tingkat pusat merasa kekuasaannya berkurang sehingga kurang kurang semangat dalam bekerja.
 - E. pemerintah pusat tidak memiliki dana yang cukup untuk membantu pemerintah daerah.
11. Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan
- A. pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah
 - B. pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sejajar
 - C. hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - D. kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah.
 - E. pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang berbeda.
12. Berikut ini yang ***bukan*** merupakan prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah adalah....
- A. didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab
 - B. harus meningkatkan kemandirian daerah
 - C. lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif di daerah
 - D. kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan semua bidang.
 - E. memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi, dan keragaman daerah
13. Nilai dasar yang dikembangkan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yaitu memandang bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (*eenheidstaat*), yaitu nilai
- A. nilai dasar
 - B. nilai politik
 - C. nilai unitaris

- D. nilai esensial
 - E. nilai administratif
14. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang keuangan diantaranya adalah.....
- A. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah
 - B. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah.
 - C. kewenangan, Tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal.
 - D. memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.
 - E. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budi daya dan pelestarian.
15. Prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkuat negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal, yaitu prinsip
- A. prinsip pemberdayaan
 - B. prinsip kesatuan
 - C. prinsip penyebaran
 - D. prinsip keserasian
 - E. prinsip tanggung jawab

B. Soal Essay

1. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah? Jelaskan penerapan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia!
2. Bagaimanakah pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dan dekonsentrasi?
3. Desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki kelemahan dan kelebihan. Sebutkan 3 kelebihan desentralisasi!
4. Sebut dan jelaskan 3 fungsi yang dimiliki pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah!
5. Jelaskan mengenai daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus di Indonesia!

LAMPIRAN 14

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	C	11	C
2	D	12	D
3	B	13	C
4	B	14	A
5	B	15	B
6	C		
7	E		
8	C		
9	D		
10	A		

2. Kunci Jawaban Soal Uraian

No	Jawaban	Skor
1	Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara Republik Indonesia sebagai	3

	<p>negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.</p> <p>Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.</p> <p>Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya.</p>	
2	<p>Pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom. Sedangkan pelimpahan wewenang dengan cara dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hierarkinya di daerah.</p>	3
3	<ol style="list-style-type: none"> 1) Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat. 2) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. 3) Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. 4) Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah. 5) Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 	3

	<p>6) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan.</p> <p>7) Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing.</p> <p>8) Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka pada awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.</p> <p>9) Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi.</p> <p>10) Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu.</p> <p>11) Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung.</p>	
4	<p>4. Fungsi Layanan (Servicing Function)</p> <p>Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya.</p> <p>5. Fungsi Pengaturan (Regulating Function)</p> <p>Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.</p> <p>6. Fungsi Pemberdayaan</p> <p>Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan</p>	3

	<p>yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma.</p>	
5	<p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (1) menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).</p>	3

LAMPIRAN 15

DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN BAB 4 TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

KELAS : X IPA 1

KKM : 75

WALI KELAS : Dra. Sri Waluyajati

JML TATAP MUKA : 7X

MAPEL : PKn

No	Nama	Nilai Ulangan Harian
----	------	----------------------

1	ANNISA FITRIANA NUR AZIZAH	70
2	APRILIA DWI ASIANI PUTRI	73
3	ASRIKA WAHYU GILANDARI	77
4	AVVAN BAYKHAQI	77
5	AZIZA TRI HASTUTI	77
6	DAFFA TABINA RISKYTAMA	87
7	DEVI NUR WIJAYANTI	67
8	FRANSISKA RIKHA K	63
9	KANZA RANIA LUTHFI	67
10	LINA DWI ARYANI	70
11	LUTHFI SETIAWAN	63
12	MUHAMMAD NUR IKHSAN	77
13	NABILA AULIA FAZZA	70
14	NANCY KHUSNUL KHOTIMAH	77
15	NUNING LATIFAH	83
16	NURUL ARINI	70
17	PRAMUDITO RIDWAN H	80
18	SEKAR WIJAYANTI K	77
19	TEGAR PRADANA MEILASARI	77
20	TIARA ANGGRAENI WARASTUTI	80
21	VISTA ALINDIA	70
22	WAHYU SETO SETYAWAN	77
23	WIKU SANTYAKA GUSTI	87
24	WISNU SURYA ADITYA	90

**DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN BAB 4
TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018**

Kelas : X IPS 3

KKM : 75

Wali Kelas : Dwi Mas Agung Basuki,
S.Pd

JML TATAP MUKA : 7X

Mapel : PKn

No	Nama	Nilai Ulangan Harian
1	ADZANESTRA NABILA K	70
2	AHMAD FAKHRIL GHUFRON	5
3	ANISA DWI CHANDRA	67
4	BISMA AKBAR PANGESTU	77
5	CINDY LIYANA	70

6	DIAH PAMUNGKAS	53
7	DINI CAHYA SARI	40
8	FITRI DYAH N	A
9	HANAYANTI PUTRI UTAMI	70
10	HELEN HASTANAGARI	70
11	KURNIA WULANDARI	73
12	MADA FARDAN BAIHAQI	77
13	MAHALLIA SABARINI S	63
14	MUHAMMAD FACHRIANSYAH	83
15	MUHAMMAD FAJRUL KHAQ	83
16	NABILA RIZQI AMALIA P	73
17	NABILA Tafa ARTHA	67
18	RANGGA ARYA PERMATA	77
19	RIA ISTIANA	67
20	SAKA PANUNTUN	70
21	TRIA ULFAH	73
22	WINDA RESTU PALUPI	50

LAMPIRAN 16

DAFTAR NILAI TENGAH SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

KELAS : X IPA 1

KKM : 75

WALI KELAS : Dra. Sri Waluyajati

JML TATAP MUKA : 7X

MAPEL : Pkn

No	Nama	Nilai Tugas				UH	Afektif	Psikomotorik
		1	2	3	4			
1	ANNISA FITRIANA NUR AZIZAH	85	78	90	80	70	B	B
2	APRILIA DWI ASIANI PUTRI	92	90	i	85	73	B	B
3	ASRIKA WAHYU GILANDARI	92	90	90	85	77	B	B
4	AVVAN BAYKHAQI	85	80	85	80	77	B	B
5	AZIZA TRI HASTUTI	95	80	i	80	77	B	B
6	DAFFA TABINA RISKYTAMA	85	78	i	80	87	B	B
7	DEVI NUR WIJAYANTI	95	76	85	78	67	B	B
8	FRANSISKA RIKHA K	95	80	85	78	63	B	B
9	KANZA RANIA LUTHFI	92	S	85	80	67	B	B
10	LINA DWI ARYANI	92	90	90	85	70	B	B
11	LUTHFI SETIAWAN	85	78	i	80	63	B	B

12	MUHAMMAD NUR IKHSAN	85	80	85	80	77	B	B
13	NABILA AULIA FAZZA	85	78	90	80	70	B	B
14	NANCY KHUSNUL KHOTIMAH	92	76	i	80	77	B	B
15	NUNING LATIFAH	95	78	l	80	83	B	B
16	NURUL ARINI	95	80	85	80	70	B	B
17	PRAMUDITO RIDWAN H	85	78	90	80	80	B	B
18	SEKAR WIJAYANTI K	92	90	i	85	77	B	B
19	TEGAR PRADANA MEILASARI	92	76	85	80	77	B	B
20	TIARA ANGGRAENI WARASTUTI	95	80	85	80	80	B	B
21	VISTA ALINDIA	92	76	85	80	70	B	B
22	WAHYU SETO SETYAWAN	85	80	90	80	77	B	B
23	WIKU SANTYAKA GUSTI	85	78	85	80	87	B	B
24	WISNU SURYA ADITYA	85	78	90	80	90	B	B

DAFTAR NILAI TENGAH SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

Kelas : X IPS 3

KKM : 75

Wali Kelas : Dwi Mas Agung Basuki,
S.Pd

JML TATAP MUKA : 7X

Mapel : PKn

No	Nama	Nilai Tugas				UH	Afektif	Psikomotorik
		1	2	3	4			
1	ADZANESTRA NABILA K	90	80	90	85	70	B	B
2	AHMAD FAKHRIL GHUFRON	80	S	85	85	S	B	B
3	ANISA DWI CHANDRA	88	85	90	80	67	B	B
4	BISMA AKBAR PANGESTU	80	85	85	85	77	B	B
5	CINDY LIYANA	90	80	85	I	70	B	B
6	DAH PAMUNGKAS	88	85	85	80	53	B	B
7	DINI CAHYA SARI	90	85	85	85	40	B	B
8	FITRI DYAH N	80	A	A	A	A	B	B
9	HANAYANTI PUTRI UTAMI	92	80	90	87	70	B	B
10	HELEN HASTANAGARI	92	80	85	87	70	B	B
11	KURNIA WULANDARI	80	85	85	80	73	B	B
12	MADA FARDAN BAIHAQI	88	S	90	80	77	B	B
13	MAHALLIA SABARINI S	90	80	85	80	63	B	B
14	MUHAMMAD FACHRIANSYAH	80	85	85	80	83	B	B
15	MUHAMMAD FAJRUL KHAQ	80	80	85	87	83	B	B

16	NABILA RIZQI AMALIA P	90	80	90	85	73	B	B
17	NABILA Tafa ARTHA	90	80	85	80	67	B	B
18	RANGGA ARYA PERMATA	88	80	85	80	77	B	B
19	RIA ISTIANA	80	85	87	80	67	B	B
20	SAKA PANUNTUN	80	80	85	87	70	B	B
21	TRIA ULFAH	90	80	90	80	73	B	B
22	WINDA RESTU PALUPI	90	85	87	87	50	B	B

DAFTAR NILAI TENGAH SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

Kelas : X IPS 1

KKM : 75

Wali Kelas : Dra. Budiarti

JML TATAP MUKA : 6X

Mapel : PKn

No	Nama	Nilai Tugas				Afektif	Psikomotorik
		1	2	3	4		
1	ALI MUHAMMAD AL GIBRAN	90	90	90	90	B	B
2	ARLA MUTIARA PUTRI W	90	80	90	85	B	B
3	BAGUS MAHENDRA	90	85	90	90	B	B
4	DIAN ABID WIJAYA	90	80	85	78	B	B
5	DIMAS RESTIANO ELSA W	90	80	92	85	B	B
6	DZIKRINA NURHIDAYAH	85	80	85	90	B	B
7	FANIA ALBANI SAPUTRI	90	85	90	85	B	B
8	FEBRY FAINIWAN DHORIFI	90	80	90	78	B	B
9	FITRA DELA CHOIRUNISA	90	90	85	78	B	B
10	GALIH ANDRIYANTO	90	92	92	85	B	B
11	MERDEKAWATI PUSPA NEGARI	85	85	85	85	B	B
12	NADIA HANDRIYANI PUSPITA	90	80	90	90	B	B
13	NATASYA AYU PATRICIA D	85	90	85	78	B	B
14	NAUFAL ADAM SASATYO	90	87	90	85	B	B
15	NITA ROHMAWATI	90	87	85	78	B	B
16	NOFARISA AGUSTIN V		90	90	90	B	B
17	NUR HIDAYAT SIWI MARYADI	90	90	85	90	B	B
18	NURMALITA WINASAH	90	90	90	90	B	B
19	RISKA NURAINI	85	90	90	85	B	B
20	RISKY AGGALIA K	85	90	85	90	B	B

21	VALENSIA AIRA SEKAR D	85	90	90	85	B	B
----	-----------------------	----	----	----	----	---	---

**DAFTAR NILAI TENGAH SEMESTER 1
TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018**

Kelas : X IPS 2

Wali Kelas : Heri Widiyati, S.Pd

KKM : 75

JML TATAP MUKA : 5X

Mapel : PKn

No	Nama	Nilai Tugas				Afektif	Psikomotorik
		1	2	3	4		
1	ADAM YUSIAN F	92	90	87		B	B
2	ADITYA DUTA PERDANA	82	85	90		B	B
3	ANANDA FITRIA	95	90	85		B	B
4	ASELLA OKTAVIA PUTRI	92	85	92		B	B
5	AULIA NUR AZIZAH	92	85	85		B	B
6	AYU KARTIKA SARI	92	90	90		B	B
7	CAHYO CANDRA SANTOSO	82	87	90		B	B
8	DHITA AMALIA FIRDAUS	82	87	92		B	B
9	DINDA PRIMAYANTI	92	85	85		B	B
10	FARHAN HIMAYA	90	85	92		B	B
11	FIEKY AMALIA	82	90	90		B	B
12	HAMESTI KEKESWARI	90	90	85		B	B
13	LIA DWI NUR KHASANAH	95	85	90		B	B
14	MUHAMMAD IVAN SAID	92	90	90		B	B
15	NUR IKHA PUTRI AYU	90	92	92		B	B
16	RIANA DWI UTAMI	92	85	85		B	B
17	RICA FANITA AYUNINGTYAS	95	85	90		B	B
18	SALMA DHIAN ANDINASARI	92	90	90		B	B
19	SHAHELIA RAIHANI	90	85	90		B	B
20	SYAHRULLY NUR RAHMAT	90	85	90		B	B
21	VENABELLA MITHA ANJANI P	90	90	85		B	B
22	WIZZA ARDHA KENCANA	90	85	85		B	B

LAMPIRAN 17

SEBARAN JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA

Satuan : SMA N 1 PLERET
Pendidikan
Nama Tes : ULANGAN HARIAN
Mata Pelajaran : PKN
Kelas/Program : X IPA 1
Tanggal Tes : 8 NOVEMBER 2017
Pokok : HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Bahasan/Sub

No Butir	Persentase Jawaban						Jumlah
	A	B	C	D	E	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	0.0	16.7	79.2*	4.2	0.0	0.0	100.0
2	0.0	0.0	33.3	66.7*	0.0	0.0	100.0
3	8.3	87.5*	0.0	4.2	0.0	0.0	100.0
4	58.3	37.5*	0.0	0.0	4.2	0.0	100.0
5	0.0	62.5*	8.3	29.2	0.0	0.0	100.0
6	20.8	0.0	37.5*	41.7	0.0	0.0	100.0
7	37.5	4.2	8.3	41.7	8.3*	0.0	100.0
8	8.3	0.0	87.5*	4.2	0.0	0.0	100.0
9	0.0	8.3	0.0	50*	41.7	0.0	100.0
10	91.7*	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	100.0
11	20.8	0.0	79.2*	0.0	0.0	0.0	100.0
12	0.0	29.2	4.2	66.7*	0.0	0.0	100.0
13	0.0	0.0	29.2*	70.8	0.0	0.0	100.0
14	25*	45.8	0.0	29.2	0.0	0.0	100.0
15	66.7	33.3*	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
16	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-	-

42	-	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-

HASIL ANALISIS SOAL ESSAY

Satuan Pendidikan : SMA N 1 PLERET
Nama Tes : ULANGAN HARIAN
Mata Pelajaran : PKN
Kelas/Program : X IPA 1
Tanggal Tes : 8 NOVEMBER 2017
Pokok Bahasan/Sub : HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Kesimpulan Akhir
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0.014	Tidak Baik	0.806	Mudah	Tidak Baik
2	0.464	Baik	0.875	Mudah	Cukup Baik
3	-	-	1.000	Mudah	Cukup Baik
4	0.122	Tidak Baik	0.986	Mudah	Tidak Baik
5	-0.062	Tidak Baik	0.985	Mudah	Tidak Baik
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-



LAMPIRAN 18

**DAFTAR HADIR SISWA
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

Kelas : X IPA 1

Wali Kelas : Dra. L. SRI WALUYAJATI

Nomor		Pertemuan ke-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Jumlah	
Urt	Induk	Tanggal	P/ L																	
		Nama																		
1	6071	ANNISA FITRIANA NUR AZIZAH	P	
2	6072	APRILIA DWI ASIANI PUTRI	P	
3	6073	ASRIKA WAHYU GILANDARI	P	I	
4	6074	AVVAN BAYKHAQI AMSAR	L	
5	6075	AZIZA TRI HASTUTI	P	
6	6076	DAFFA TABINA RIZKYTAMA DEWANTO	L	
7	6077	DEVI NUR WIJAYANTI	L	
8	6078	FRANSISKA RIKHA KRISMASDAYANTI	P	
9	6079	KANZA RANIA LUTHFI	P	
10	6080	LINA DWI ARYANI	P	I	
11	6081	LUTHFI SETIAWAN	L	
12	6082	MUHAMMAD NUR IKHSAN	L	
13	6083	NABILA AULIA FAZZA	P	
14	6084	NANCY KHUSNUL KHOTIMAH	P	A	

**DAFTAR HADIR SISWA
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

Kelas : X IPS 1

Wali Kelas : Dra. BUDIARTI

Nomor		Pertemuan ke-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Jumlah					
Urt.	Induk	Tanggal	P/L																		s	i	a	
		Nama																						
1	6155	ALI MUHAMMAD AL GIBRAN	L																					
2	6156	ARLA MUTIARA PUTRI WIBOWO	P			I																		
3	6157	BAGUS MAHENDRA	L																					
4	6158	DIAN ABID WIJAYA	P																					
5	6159	DIMAS RESTIANO ELSA WIBOWO	L																					
6	6160	DZIKRINA NURHIDAYAH	P																					
7	6161	FANIA ALBANI SAPUTRI	P																					
8	6162	FEBRY FAINIWAN DHOFIRI	L																					
9	6163	FITRA DELA CHOIRUNNISA	P																					
10	6164	GALIH ANDRIANTO	L																					
11	6165	MERDEKAWATI PUSPA NEGARI	P				I																	
12	6166	NADIA HANDRIYANI PUSPITA	P																					
13	6167	NATASYA AYU PATRICIA DEWANTI	P																					
14	6168	NAUFAL ADAM SASATYO	L																					
15	6169	NITA ROHMAWATI	P																					

No. Dokumen	FM-AKD-02/03-05
No. Revisi	2
Tanggal Berlaku	16 Juli 2012

**DAFTAR HADIR SISWA
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

Kelas : X IPS 2

Wali Kelas : HERI WIDAYATI,S.Pd.

Nomor		Pertemuan ke-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Jumlah					
Urt.	Induk	Tanggal	P/L																		s	i	a	
		Nama																						
1	6177	ADAM YUSIAN FATHURROHMAN	L																					
2	6178	ADITYA DUTA PERDANA	L																					
3	6179	ANANDA FITRIA	P						A															
4	6180	ASELLA OKTAVIA PUTRI	P																					
5	6181	AULIA NUR AZIZAH	P																					
6	6182	AYU KARTIKA SARI	P				I																	
7	6183	CAHYO CANDRA SANTOSO	L																					
8	6184	DHITA AMALIA FIRDAUS	L																					
9	6185	DINDA PRIMAYANTI	P																					
10	6186	FARHAN HIMAYA	L																					
11	6187	FIEKY AMALIA	P					A	S															

No. Dokumen	FM-AKD-02/03-05
No. Revisi	2
Tanggal Berlaku	16 Juli 2012

DAFTAR HADIR SISWA

TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Kelas : X IPS 3

Wali Kelas : DWI MAS AGUNG BASUKI,S.Pd.

Nomor		Pertemuan ke-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Jumlah		
Urt.	Induk	Tanggal	P/L																		
		Nama																			
1	6199	ADZANESTRA NABILA KHAIRUNISA	P																		
2	6200	AHMAD FAKHRIL GHUFRON	L																		
3	6201	ANISA DWI CHANDRA	P																		
4	6202	BISMA AKBAR PANGESTU	L																		
5	6203	CINDY LIYANA	P				S														
6	6204	DIAH PAMUNGKAS	P																		
7	6205	DINI CAHYA SARI	P				A	A	I												

8	6206	FITRI DYAH NUGRAHANTI	P																	
9	6207	HANAYANTI PUTRI UTAMI	P																	
10	6208	HELEN HASTANAGARI	P																	
11	6209	KURNIA WULANDARI	P																	
12	6210	MADA FARDAN BAIHAQI	L																	
13	6211	MAHALLIA SABARINI SULISTYAWATI	P							S										
14	6212	MUHAMMAD FACHRIANSYAH	L																	
15	6213	MUHAMMAD FAJRUL KHAQ	L																	
16	6214	NABILA RIZQI AMALIA PUTRI	P																	
17	6215	NABILA Tafa ARTHA MAYFEA	P																	
18	6216	RANGGA ARYA PERMANA	L																	
19	6217	RIA ISTIANA	P																	
20	6218	SAKA PANUNTUN	L							A										
21	6219	TRIA ULFAH	P																	
22	6220	WINDA RESTU PALUPI	P																	

L : 7
P : 15
Jumlah : 22

LAMPIRAN 19



LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

CATATAN HARIAN PLT

TAHUN:2017

NAMA MAHASISWA : LISDRI SUSTIWI

NAMA SEKOLAH : SMA NEGERI 1 PLERET

NO. MAHASISWA : 14401241007

ALAMAT SEKOLAH : KEDATON, PLERET, PLERET BANTUL

FAK/JUR/PR.STUDI : FIS/ PKNH/ PKN

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama kegiatan	Hasil kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ paraf DPL
1.	Jumat, 15 september 2017	09.00-11.00	Sosialisasi tatib dan penyerahan mahasiswa PLT oleh DPL	<ul style="list-style-type: none">• Di ikuti oleh 23 mahasiswa PLT UNY peserta DPL• Disambut oleh Kepala Sekolah, kepala humas dan pamong SMAN 1 Pleret, kegiatan dilaksanakan di Aula SMA N 1 Pleret dengan lancar	

		13.00-16.00	Workshop pembuatan RPP	<ul style="list-style-type: none"> • Diikuti oleh semua guru SMAN1 Pleret dan seluruh mahasiswa PLT UNY • Pembicara dari BINAS • Acara berlangsung di Aula SMAN 1 Pleret dengan lancar. • Diikuti oleh kurang lebih 10 mahasiswa PLT UNY 	
2.	Sabtu, 16 September 2017	06.30-07.00	Salam pagi	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan dipintu gerbang SMA N 1 Pleret • Melakukan salam kepada guru dan siswa SMA N 1 Pleret 	
		08.30-10.15	Pengkondisian kelas	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan oleh seluruh mahasiswa PLT UNY • Kegiatan ini dilakukan oleh Seluruh mahasiswa PLT UNY untuk berkeliling ke seluruh kelas yang kosong untuk diisi atau dicatat dilaporkan ke pada ruang piket 	

		10.15-11.45	Observasi Kelas	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan dikelas X IPA 2 • Materi pelajarannya yaitu BAB 2 tentang “ Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia”. • Siswa diminta untuk membaca materi dan dilanjutkan dengan pembentukan kelompok untuk diskusi dan presentasi. • Mahasiswa PLT ikut membantu dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. • Kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. 	
		12.00-14.00	Pendampingan vaksinasi Rubella	<ul style="list-style-type: none"> • Mendampingi kelas x untuk vaksinasi Rubella • Diikuti kurang lebih 10 mahasiswa PLT UNY • Kegiatan dilaksanakan di Aula SMA N 1 Pleret. 	
3.	Senin, 18 september 2017	07.00-07.10	Persiapan Upacara	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan guru • Kegiatan ini berfungsi untuk menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk melancarkan kegiatan upacara. 	

		07.00-07.45	Upacara bendera	<ul style="list-style-type: none"> • Upacara berjalan dengan lancar. • Upacara bendera diikuti oleh seluruh warga sekolah SMA N 1 Pleret • Upacara dilaksanakan di lapangan upacara SMA N 1 Pleret. • Kegiatan upacara berjalan dengan lancar
		08.15-09.35	Observasi kelas	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas XI IS 3 • Observasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi kelas yang akan digunakan dalam pelaksanaan PLT • Keadaan kelas XI IS 3 lumayan lengkap, siswa-siswa kelas XI IS 3 sulit dikondisikan • Kegiatan dilakukan dengan materi bab 2 yaitu tentang proses demokrasi menuju masyarakat madani.
		09.35-10.15	Konsultasi dengan Guru pembimbing Mapel PKN	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan untuk konsultasi terkait perangkat pembelajaran. • Tuntutan yang harus dikerjakan dalam pelaksanaan PLT yaitu sebelum praktek mengajar harus mengumpulkan RPP terlebih dahulu. • Pemberian informasi terkait Kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu menggunakan K13. • Pemilihan kelas untuk kegiatan

				<p>praktik pembelajaran selama 2 bulan masa PLT di SMA N 1 Pleret</p>		
			Observasi kelas XI IPS 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas XI IS 2 ,kondisi kelas fasilitas cukup memadai • Siswa-siswa didalam kelas cukup kondusif • Materi yang diajarkan di dalam kelas adalah bab 2 tentang budaya politik meliputi penjelasan dari bapak jarot dan diselingi perkenalan oleh mahasiswa PLT UNY • Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan LKS latihan soal. 		
		10.30-11.50				
		12.00-13.30	Mencari materi untuk persiapan praktek mengajar		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini meliputi mencari referensi buku pelajaran yang akan digunakan. • Kegiatan dilakukan di perpustakaan SMA N 1 Pleret 	
4.	Selasa, 19 september 2017	06.30-07.00	Salam pagi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan diikuti oleh 4 mahasiswa PLT UNY • Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut siswa dan guru 		

		07.00-08.30	Piket	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY • Kegiatan ini meliputi absensi siswa tiap kelas, back up presensi, dan mencatat administrasi siswa siswa yang ingin meninggalkan kelas dengan alasan izin, sakit dan sebagainya. • Mengisi untuk menggantikan guru yang berhalangan hadir. 	
		08.30- 10.15	Observasi Kelas	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan dikelas X IPS 3 • Materi pelajarannya yaitu BAB 2 tentang “ Status WNI dan Asas penentuan kewarganegaraan”. • Siswa diminta untuk membaca materi dan dilanjutkan dengan pembentukan kelompok untuk diskusi dan presentasi. • Mahasiswa PLT ikut membantu dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. 	

		10.15-11.45	Pendampingan tugas kelas XI IPS 3	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT UNY • Pendampingan siswa kelas XI IPS 3 dalam mengerjakan tugas dari guru matematika yang berhalangan hadir • Siswa yang ada didalam kelas XI IPS 3 cukup kondusif. 	
5.	Rabu , 20 September 2017	07.10-08.30	Membantu persiapan packing soal-soal UTS	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 15 mahasiswa PLT UNY • Kegiatan ini bertujuan untuk packing soal-soal UTS 	
		09.00-08.30	Konsultasi RPP Materi Bab II dengan Bapak Jarot	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan lancar, kegiatan diisi dengan kegiatan arahan bapak Jarot mengenai RPP yang dibuat yaitu KD 2 dan RPP harus dikumpulkan sebelum mahasiswa praktek mengajar 	
		10.30-12.30	Membantu packing soal-soal UTS	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 20 mahasiswa PLT UNY • Kegiatan dilakukan dengan mengklip soal-soal menjadi satu dan memasukan soal-soal tersebut kedalam amplop yang telah 	

				disediakan.	
6.	Jumat, 22 september 2017	07-00-08.30	Praktik mandiri pembelajaran PKN di X IPS 2.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan diisi dengan menjelaskan materi BAB 2 “ Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia” dengan media pembelajaran Power Point. • Setelah diterangkan Siswa mengerjakan latihan soal penilaian harian 2 di LKS dengan soal sebanyak 25 pilihan ganda. • Kondisi kelas kondusif dan kegiatan berjalan dengan lancar. 	
		08.30-10.15	Praktik mandiri pembelajaran PKN di X IPS 1	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan diisi dengan menjelaskan materi BAB 2 “ Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia” dengan media pembelajaran Power Point. • Setelah diterangkan Siswa mengerjakan latihan soal penilaian harian 2 di LKS dengan soal sebanyak 25 pilihan ganda. • Kondisi kelas cukup kondusif dan kegiatan berjalan dengan lancar. 	
7.	Sabtu, 23 September 2017	07.00-09.00	Piket Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT. • Kegiatan tersebut berupa member cap pada buku pelajaran yang masih baru dan menjaga perpustakaan jika ada yang meminjam/ mengembalikan buku. 	

		09.00-10.30	Pembuatan RPP kelas X Bab 3	<ul style="list-style-type: none"> • RPP ini digunakan untuk pedoman mengajar minggu depan dengan ketentuan menggunakan format k13 revisi. • RPP yang dibuat yaitu BAB 3 tentang “Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 	
		10.30-12.00	Finalisasi pengepakan soal-soal UTS	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan dilakukan oleh 20 mahasiswa PLT UNY • Kegiatan ini bertujuan untuk packing soal-soal UTS • Kegiatan juga bertujuan untuk merapihkan soal-soal yang sudah di masukan kedalam amplop-amplop yang telah disediakan. 	
		12.00-13.30	Penempelan nomor ujian	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan hanya oleh beberapa mahasiswa saja • Kegiatan dilakukan di 16 Ruang kelas yang akan digunakan sebagai ruangan UTS 	
8.	Senin, 25 september 2017	06.30-07.10	Salam pagi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh mahasiswa PLT UNY dipintu Gerbang UNY SMA N 1 pleret • Kegiatan bertujuan untuk memberi salam senyum sapa kepada siswa-siswa dan guru-guru yang hendak masuk ke sekolah 	

		07.00-08.00	Pengkondisian kelas dan siswa	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan ini dilakukan oleh semua mahasiswa PLT, guna mengkondisikan kelas dan siswa agar tertib untuk masuk kelas guna persiapan uts 	
9.	Selasa, 26 September 2017	06.15-07.00	Salam pagi	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY dipintu Gerbang UNY SMA N 1 pleret Kegiatan bertujuan untuk memberi salam senyum sapa kepada siswa-siswa dan guru-guru yang hendak masuk ke sekolah 	
		07.00-13.30	Piket	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY Kegiatan ini meliputi absensi siswa tiap kelas, back up presensi, dan mencatat administrasi siswa siswa yang ingin meninggalkan kelas dengan alasan izin, sakit dan sebagainya. Mengisi untuk menggantikan guru yang berhalangan hadir 	
10.	Rabu, 27 Sepetmber 2017	06.00-07.10	Salam pagi	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY dipintu Gerbang UNY SMA N 1 pleret Kegiatan bertujuan untuk memberi salam senyum sapa kepada siswa-siswa dan guru-guru yang hendak masuk ke sekolah 	
11.	Kamis,	08.00-11.00	Pembuatan RPP kelas X	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan ini melanjutkan 	

	28 September 2017		Bab 3	<p>pembuatan RPP pada hari sabtu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPP ini digunakan untuk pedoman mengajar minggu depan dengan ketentuan menggunakan format k13 revisi. • RPP yang dibuat yaitu BAB 3 tentang “Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 	
12.	Jumat, 29 September 2017	06.00-07.10	Salam pagi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY dipintu Gerbang UNY SMA N 1 pleret • Kegiatan bertujuan untuk memberi salam senyum sapa kepada siswa-siswa dan guru-guru yang hendak masuk ke sekolah 	
		08.00-10.30	Mencari media pembelajaran untuk mengajar hari selasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini berupa mencari video tentang “Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan membuat power point untuk mengajar. 	
13.	Sabtu, 30 September 2017	08.00-09.00	Pengumpulan RPP dan konsultasi media pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> • RPP yang telah disusun dikumpulkan kepada guru pamong PKn. • Konsultasi RPP dan media pembelajaran kepada guru pamong 	

		09.00-11.30	Piket Perpustakaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT. Kegiatan tersebut berupa member cap pada buku pelajaran yang masih baru dan menjaga perpustakaan jika ada yang meminjam/ mengembalikan buku 	
14.	Senin, 2 Oktober 2017	07.00-07.45	Upacara bendera	<ul style="list-style-type: none"> • Upacara berjalan dengan lancar. • Upacara bendera diikuti oleh seluruh warga sekolah SMA N 1 Pleret • Upacara dilaksanakan di lapangan upacara SMA N 1 Pleret. • Kegiatan upacara berjalan dengan lancar 	
		08.00-11.00	Membuat prosem Pkn Kelas X.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilakukan agar dapat merancang silabus. • Pembuatan prosem berjalan dengan lancar. 	
		12.15-13.30	Membuat silabus kelas X	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan untuk pedoman mengajar sebelum membuat RPP. 	

15.	Selasa, 3 Oktober 2017	06.15-07.00	Salam pagi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY dipintu Gerbang UNY SMA N 1 pleret • Kegiatan bertujuan untuk memberi salam senyum sapa kepada siswa-siswa dan guru-guru yang hendak masuk ke sekolah
		07.00-08.30	Piket	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY • Kegiatan ini meliputi absensi siswa tiap kelas, back up presensi, dan mencatat administrasi siswa siswa yang ingin meninggalkan kelas dengan alasan izin, sakit dan sebagainya. • Mengisi untuk menggantikan guru yang berhalangan hadir.
		08.30-10.15	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPS 3.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas X IPS 3. • Mahasiswa PLT menjelaskan materi tentang “Kewenangan Lembaga-lembaga” dengan power point dan memutar video yang berkaitan dengan materi. • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan • Kegiatan berjalan dengan lancar

		10.15-13.30	Melanjutkan Piket	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY • Kegiatan ini meliputi absensi siswa tiap kelas, back up presensi, dan mencatat administrasi siswa siswa yang ingin meninggalkan kelas dengan alasan izin, sakit dan sebagainya. • Mengisi untuk menggantikan guru yang berhalangan hadir 	
16.	Rabu, 4 Oktober 2017	07.30- 08.30	Pendampingan praktik mandiri di kelas XI IPA 4	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas XI IPA 4 • Siswa mendengarkan penjelasan mahasiswa PLT UNY tentang pengertian masyarakat madani • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan • Kegiatan berjalan dengan lancar 	
		12.10-13.30	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPA 1.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas X IPA 1. • Mahasiswa PLT menjelaskan materi tentang “Kewenangan Lembaga-lembaga” dengan power point dan memutar video yang berkaitan dengan materi. • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan. • Kegiatan berjalan dengan lancar 	

		13.30-14.00	Konsultasi dan penilaian guru pamong tentang praktik mandiri yang telah dilakukan mahasiswa PLT UNY	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan dengan penilaian penampilan praktik mandiri apa saja yang kurang dan harus diperbaiki oleh mahasiswa PLT UNY 	
17.	Kamis, 5 Oktober 2017	07.00-08.30	Mendampingi teman praktik mandiri di kelas XI IPA 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh mahasiswa PLT UNY di kelas XI IPA 2 • Siswa mendengarkan penjelasan mahasiswa PLT UNY tentang pengertian masyarakat madani • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan • Kegiatan berjalan dengan lancar. 	
		08.30-11.30	Pembuatan RPP	<ul style="list-style-type: none"> • RPP ini digunakan untuk pedoman mengajar minggu depan dengan ketentuan menggunakan format k13 revisi. • RPP yang dibuat yaitu tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia”. 	

18.	Jumat, 6 Oktober 2017	07.00-08.30	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPS 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas X IPS 2. • Mahasiswa PLT menjelaskan materi tentang “Kewenangan Lembaga-lembaga” dengan power point dan memutar video yang berkaitan dengan materi. • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan. • Kegiatan berjalan dengan lancar 	
		08.30-11.00	Pembuatan RPP	<ul style="list-style-type: none"> • RPP ini digunakan untuk pedoman mengajar minggu depan dengan ketentuan menggunakan format k13 revisi. • RPP yang dibuat yaitu tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia”. 	
19.	Sabtu, 7 Oktober 2017	08.00-09.00	Pengumpulan RPP dan konsultasi RPP	<ul style="list-style-type: none"> • RPP yang telah disusun dikumpulkan kepada guru pamong PKn. • Mahasiswa PLT konsultasi mengenai RPP yang telah disusun, media apa yang digunakan serta soal evaluasi. 	

		09.00-13.00	Piket Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT. • Kegiatan tersebut berupa member cap pada buku pelajaran yang masih baru dan menjaga perpustakaan jika ada yang meminjam/ mengembalikan buku 	
20.	Senin, 9 Oktober 2017	07.00-07.45	Upacara bendera	<ul style="list-style-type: none"> • Upacara bejalan dengan lancar. • Upacara bendera diikuti oleh seluruh warga sekolah SMA N 1 Pleret • Upacara dilaksanakan di lapangan upacara SMA N 1 Pleret. • Kegiatan upacara berjalan dengan lancar 	
		08.00-11.00	Mencari media pembelajaran untuk mengajar hari selasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini berupa mencari video tentang “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia” dan membuat power point untuk mengajar. 	

		10.30-11.50	Pendampingan Praktik mandiri pembelajaran XI IPS 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh mahasiswa PLT UNY di kelas XI IPS 2 • Kegiatan diisi dengan materi ciri-ciri masyarakat madani dan proses menuju masyarakat madani • Kemudian siswa mengerjakan soal yang telah disediakan dan mendiskusikan dengan kelompok yang telah dibentuk • Kegiatan berjalan dengan lancar 	
21.	Selasa, 10 Oktober 2017	06.15-07.00	Salam Pagi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY dipintu Gerbang UNY SMA N 1 pleret • Kegiatan bertujuan untuk memberi salam senyum sapa kepada siswa-siswa dan guru-guru yang hendak masuk ke sekolah 	
		07.00-08.30	Piket	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY • Kegiatan ini meliputi absensi siswa tiap kelas, back up presensi, dan mencatat administrasi siswa siswa yang ingin meninggalkan kelas dengan alasan izin, sakit dan sebagainya. • Mengisi untuk menggantikan guru yang berhalangan hadir. 	

		08.30-10.15	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPS 3.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas X IPS 3. • Mahasiswa PLT menjelaskan materi tentang “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia” dengan power point dan memutar video yang berkaitan dengan materi. • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan • Kegiatan berjalan dengan lancar. 	
		10.15-13.30	Melanjutkan piket	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY • Kegiatan ini meliputi absensi siswa tiap kelas, back up presensi, dan mencatat administrasi siswa siswa yang ingin meninggalkan kelas dengan alasan izin, sakit dan sebagainya. • Mengisi untuk menggantikan guru yang berhalangan hadir. 	
22.	Rabu, 11 Oktober 2017	07.00-08.30	Pendampingan Praktik mandiri pembelajaran XI IPA 4	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh mahasiswa PLT UNY di kelas XI IPA 4 • Kegiatan diisi dengan materi ciri-ciri masyarakat madani dan proses menuju masyarakat madani • Kemudian siswa mengerjakan soal yang telah disediakan dan 	

				<p>mendiskusikan dengan kelompok yang telah dibentuk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan berjalan dengan lancar. 	
		12.10-13.30	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPA 1.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas X IPS 3. • Mahasiswa PLT menjelaskan materi tentang “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia” dengan power point dan memutar video yang berkaitan dengan materi. • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan • Kegiatan berjalan dengan lancar. 	
		13.30-14.00	Konsultasi dan penilaian guru pamong tentang praktik mandiri yang telah dilakukan mahasiswa PLT UNY.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan dengan penilaian penampilan praktik mandiri apa saja yang kurang dan harus diperbaiki oleh mahasiswa PLT UNY 	

23.	Kamis, 12 Oktober 2017	07.00-08.30	Pendampingan praktik mandiri pembelajaran XI IPA 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh mahasiswa PLT UNY di kelas XI IPA 2 • Kegiatan diisi dengan materi ciri-ciri masyarakat madani dan proses menuju masyarakat madani • Kemudian siswa mengerjakan soal yang telah disediakan dan mendiskusikan dengan kelompok yang telah dibentuk • Kegiatan berjalan dengan lancar. 	
		08.30-11.30	Pembuatan RPP	<ul style="list-style-type: none"> • RPP ini digunakan untuk pedoman mengajar minggu depan dengan ketentuan menggunakan format k13 revisi. • RPP yang dibuat yaitu tentang “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 	

24.	Jumat, 13 Oktober 2017	08.30-10.15	Praktik Pembelajaran PKn mandiri di X IPS 1	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas X IPS 1. • Mahasiswa PLT menjelaskan materi tentang “Kewenangan Lembaga-lembaga” dengan power point dan memutar video yang berkaitan dengan materi. • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan. • Kegiatan berjalan dengan lancar 	
		10.30-13.00	Pembuatan RPP	<ul style="list-style-type: none"> • RPP ini digunakan untuk pedoman mengajar minggu depan dengan ketentuan menggunakan format k13 revisi. • RPP yang dibuat yaitu tentang “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 	
25.	Sabtu, 14 Oktober 2017	08.00-09.00	Pengumpulan RPP dan konsultasi RPP	<ul style="list-style-type: none"> • RPP yang telah disusun dikumpulkan kepada guru pamong PKn. • Mahasiswa PLT konsultasi mengenai RPP yang telah disusun, media apa yang digunakan serta soal evaluasi. 	

		09.00-13.00	Piket Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT. • Kegiatan tersebut berupa member cap pada buku pelajaran yang masih baru dan menjaga perpustakaan jika ada yang meminjam/ mengembalikan buku. 	
26.	Senin, 16 Oktober 2017	07.00-07.45	Upacara bendera	<ul style="list-style-type: none"> • Upacara berjalan dengan lancar. • Upacara bendera diikuti oleh seluruh warga sekolah SMA N 1 Pleret • Upacara dilaksanakan di lapangan upacara SMA N 1 Pleret. • Kegiatan upacara berjalan dengan lancar 	
		08.00-10.00	Membuat media pembelajaran untuk mengajar hari salasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini berupa membuat power point tentang “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia” 	

		10.30-11.50	Pendampingan Praktik mandiri pembelajaran XI IPS 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh mahasiswa PLT UNY di kelas XI IPS 2 • Kegiatan diisi dengan materi ciri-ciri masyarakat madani dan proses menuju masyarakat madani • Kemudian siswa mengerjakan soal yang telah disediakan dan mendiskusikan dengan kelompok yang telah dibentuk • Kegiatan berjalan dengan lancar. 	
27.	Selasa, 17 Oktober 2017	06.15-07.00	Salam Pagi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY dipintu Gerbang UNY SMA N 1 pleret • Kegiatan bertujuan untuk memberi salam senyum sapa kepada siswa-siswa dan guru-guru yang hendak masuk ke sekolah 	

		07.00-08.30	Piket	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY • Kegiatan ini meliputi absensi siswa tiap kelas, back up presensi, dan mencatat administrasi siswa siswa yang ingin meninggalkan kelas dengan alasan izin, sakit dan sebagainya. • Mengisi untuk menggantikan guru yang berhalangan hadir 	
		08.30-10.15	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPS 3	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas X IPS 3. • Mahasiswa PLT menjelaskan materi tentang “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”. • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan • Kegiatan berjalan dengan lancar. 	
		10.15-13.30	Melanjutkan piket	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY • Kegiatan ini meliputi absensi siswa tiap kelas, back up presensi, dan mencatat administrasi siswa siswa yang ingin meninggalkan kelas dengan alasan izin, sakit dan 	

				<p>sebagainya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengisi untuk menggantikan guru yang berhalangan hadir. 	
28.	Rabu, 18 Oktober 2017	07.00-08.30	Pendampingan Praktik mandiri pembelajaran XI IPA 4	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh mahasiswa PLT UNY • Kegiatan diisi dengan kegiatan mengisi latihan soal ulangan harian materi ciri-ciri masyarakat madani di LKS • Kegiatan diakhiri dengan mencocokkan jawaban bersama siswa-siswa XI IPA 4. 	
		12.10-13.30	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPA 1.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas X IPS 3. • Mahasiswa PLT menjelaskan materi tentang “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”. • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan • Kegiatan berjalan dengan lancar. 	

		13.30-14.00	Konsultasi dan penilaian guru pamong tentang praktik mandiri yang telah dilakukan mahasiswa PLT UNY.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan dengan penilaian penampilan praktik mandiri apa saja yang kurang dan harus diperbaiki oleh mahasiswa PLT UNY 	

29.	Kamis, Oktober 2017	19	07.00-08.30	Pendampingan praktik mandiri pembelajaran XI IPA 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh mahasiswa PLT UNY di kelas XI IPA 2 • Materi yang diajarkan adalah mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara • Kegiatan berjalan dengan lancar.
			08.30- 11.00	Pembuatan RPP	<ul style="list-style-type: none"> • RPP ini digunakan untuk pedoman mengajar minggu depan dengan ketentuan menggunakan format k13 revisi. • RPP yang dibuat yaitu tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat”.
30.	Jumat, Oktober 2017	20	08.30-10.15	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPS 1.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas X IPS 1. • Mahasiswa PLT menjelaskan materi tentang “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia” dengan power point dan memutar video yang berkaitan dengan materi. • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan • Kegiatan berjalan dengan lancar.

			10.30-11.30	Pembuatan RPP	<ul style="list-style-type: none"> • RPP ini digunakan untuk pedoman mengajar minggu depan dengan ketentuan menggunakan format k13 revisi. • RPP yang dibuat yaitu tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat”.
31.	Sabtu, 21 Oktober 2017		08.00-08.30	Pengumpulan dan konsultasi RPP.	<ul style="list-style-type: none"> • RPP yang telah disusun dikumpulkan kepada guru pamong PKn. • Mahasiswa PLT konsultasi mengenai RPP yang telah disusun, media apa yang digunakan serta soal evaluasi.

		08.30-10.15	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPA 2	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa diberi tugas untuk mengerjakan soal LKS Uji Kompetensi 1,2, dan 3 (15 nomor) Bab 3 tentang Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945. • Siswa dan mahasiswa PLT mencocokkan jawaban di LKS 	
		10.30-13.00	Piket Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT. • Kegiatan tersebut berupa member cap pada buku pelajaran yang masih baru dan menjaga perpustakaan jika ada yang meminjam/ mengembalikan buku. 	

32.	Senin, 2017	23 Oktober	06.30-07.00	Salam Pagi	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan dipintu gerbang SMA N 1 Pleret. • Melakukan salam kepada guru dan siswa SMA N 1 Pleret 	
			07.00-07.45	Upacara bendera	<ul style="list-style-type: none"> • Upacara bejalan dengan lancar. • Upacara bendera diikuti oleh seluruh warga sekolah SMA N 1 Pleret • Upacara dilaksanakan di lapangan upacara SMA N 1 Pleret. • Kegiatan upacara berjalan dengan lancar. 	
			08.00-10.00	Membuat media pembelajaran untuk mengajar hari salasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini berupa membuat power point tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat”. 	
			10.30-11.50	Pendampingan Praktik mandiri pembelajaran XI IPS 2.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh mahasiswa PLT UNY di kelas XI IPS 2 • Materi yang diajarkan adalah mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara • Kegiatan berjalan dengan lancar 	

33.	Selasa, 2017	24 Oktober	06.15-07.00	Salam Pagi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY dipintu Gerbang UNY SMA N 1 pleret • Kegiatan bertujuan untuk memberi salam senyum sapa kepada siswa-siswa dan guru-guru yang hendak masuk ke sekolah 	
			07.00-08.30	Piket	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY • Kegiatan ini meliputi absensi siswa tiap kelas, back up presensi, dan mencatat administrasi siswa siswa yang ingin meninggalkan kelas dengan alasan izin, sakit dan sebagainya. • Mengisi untuk menggantikan guru yang berhalangan hadir 	

		08.30-10.15	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPS 3	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas X IPS 3. • Mahasiswa PLT menjelaskan materi tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat” dengan power point . • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan • Kegiatan berjalan dengan lancar. 	
		10.15-13.30	Melanjutkan Piket	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY • Kegiatan ini meliputi absensi siswa tiap kelas, back up presensi, dan mencatat administrasi siswa siswa yang ingin meninggalkan kelas dengan alasan izin, sakit dan sebagainya. • Mengisi untuk menggantikan guru yang berhalangan hadir. 	

34.	Rabu, 25 Oktober 2017	08.00-09.30	Konsultasi dan penilaian guru pamong tentang praktik mandiri yang telah dilakukan mahasiswa PLT UNY.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan dengan penilaian penampilan praktik mandiri apa saja yang kurang dan harus diperbaiki oleh mahasiswa PLT UNY
		12.10-13.30	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPA 1	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas X IPS 3. • Mahasiswa PLT menjelaskan materi tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan daerah” dengan power point . • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan • Kegiatan berjalan dengan lancar.
35.	Kamis, 26 Oktober 2017	07.00-08.30	Pendampingan praktik mandiri pembelajaran XI IPA 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh mahasiswa PLT UNY di kelas XI IPA 2 • Materi yang diajarkan adalah Kegiatan dilakukan oleh mahasiswa PLT UNY di kelas XI IPS 2 • Materi yang diajarkan adalah menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan • Kegiatan didalam kelas berjalan dengan lancar.

		08.30- 11.30	Pembuatan RPP	<ul style="list-style-type: none"> • RPP ini digunakan untuk pedoman mengajar minggu depan dengan ketentuan menggunakan format k13 revisi. • RPP yang dibuat yaitu tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah”. 	
36.	Jumat, 27 Oktober 2017	07.30-08.30	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPS 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas X IPS 2. • Mahasiswa PLT menjelaskan materi tentang “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia” dengan power point dan memutar video yang berkaitan dengan materi. • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan. • Kegiatan berjalan dengan lancar. 	
		08.30-10.15	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPS 1	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas X IPS 3. • Mahasiswa PLT menjelaskan materi tentang “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”. • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan • Kegiatan berjalan dengan lancar. 	

37.	Sabtu, 2017	28 Oktober	08.00-09.00	Pengumpulan dan konsultasi RPP	<ul style="list-style-type: none"> • RPP yang telah disusun dikumpulkan kepada guru pamong PKn. • Mahasiswa PLT konsultasi mengenai RPP yang telah disusun, media apa yang digunakan serta soal evaluasi. 	
			09.00-13.00	Piket Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT. • Kegiatan tersebut berupa member cap pada buku pelajaran yang masih baru dan menjaga perpustakaan jika ada yang meminjam/ mengembalikan buku. 	
38.	Senin, 2017	30 Oktober	06.30-07.00	Salam Pagi	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan dipintu gerbang SMA N 1 Pleret. • Melakukan salam kepada guru dan siswa SMA N 1 Pleret 	
			07.00-07.45	Upacara Bendera	<ul style="list-style-type: none"> • Upacara berjalan dengan lancar. • Upacara bendera diikuti oleh seluruh warga sekolah SMA N 1 Pleret • Upacara dilaksanakan di lapangan upacara SMA N 1 Pleret. • Kegiatan upacara berjalan dengan lancar. 	

			08.00-10.00	Membuat media pembelajaran untuk mengajar hari salasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini berupa membuat power point tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah”. 	
			10.30-11.50	Pendampingan Praktik mandiri pembelajaran XI IPS 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh mahasiswa PLT UNY di kelas XI IPS 2 • Materi yang diajarkan adalah menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan • Kegiatan didalam kelas berjalan dengan lancar 	
39.	Selasa, 2017	31 Oktober	06.15-07.00	Salam Pagi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY dipintu Gerbang UNY SMA N 1 pleret • Kegiatan bertujuan untuk memberi salam senyum sapa kepada siswa-siswa dan guru-guru yang hendak masuk ke sekolah 	

		07.00-08.30	Piket	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY • Kegiatan ini meliputi absensi siswa tiap kelas, back up presensi, dan mencatat administrasi siswa siswa yang ingin meninggalkan kelas dengan alasan izin, sakit dan sebagainya. • Mengisi untuk menggantikan guru yang berhalangan hadir. 	
		08.30-10.15	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPS 3	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas X IPS 3. • Mahasiswa PLT menjelaskan materi tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah”. • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan • Kegiatan berjalan dengan lancar. 	
		10.15-13.30	Melanjutkan Piket	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY • Kegiatan ini meliputi absensi siswa tiap kelas, back up presensi, dan mencatat administrasi siswa siswa yang ingin meninggalkan kelas dengan alasan izin, sakit dan sebagainya. • Mengisi untuk menggantikan guru yang berhalangan hadir. 	

40.	Rabu, 2017	1 November	08.00-09.30	Konsultasi dan penilaian guru pamong tentang praktik mandiri yang telah dilakukan mahasiswa PLT UNY.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan dengan penilaian penampilan praktik mandiri apa saja yang kurang dan harus diperbaiki oleh mahasiswa PLT UNY
			09.30-12.00	Membuat Soal Ulangan Bab 4.	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PLT membuat soal ulangan sebanyak 15 pilihan ganda dan 5 soal essay. • Kegiatan berjalan dengan lancar.

		12.10-13.30	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPA 1	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas X IPS 3. • Mahasiswa PLT menjelaskan materi tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah”. • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan • Kegiatan berjalan dengan lancar. 	
41.	Kamis, 2 November 2007	07.00-08.30	Pendampingan praktik mandiri pembelajaran XI IPA 2.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilaksanakan di dalam kelas XI IPA 2 • Kegiatan pembelajaran diisi dengan mengerjakan soal-soal Ulangan Harian yang telah dibuat oleh Mahasiswa PLT • Ulangann bersifat close book, bentuk soal pilihan ganda sebanyak 25 nomor. • Kegiatan berjalan dengan lancar. 	

		08.30- 11.30	Pembuatan RPP	<ul style="list-style-type: none"> • RPP ini digunakan untuk pedoman mengajar minggu depan dengan ketentuan menggunakan format k13 revisi. • RPP yang dibuat yaitu tentang “hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah” 	
42.	Jum’at, 3 November 2017	07.30-08.30	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPS 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas X IPS 3. • Mahasiswa PLT menjelaskan materi “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara tentang Kesatuan Republik Indonesia”. • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan • Kegiatan berjalan dengan lancar. 	

		08.30-10.15	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPS 1	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas X IPS 3. • Mahasiswa PLT menjelaskan materi tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat” dengan power point . • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan • Kegiatan berjalan dengan lancar. 	
43.	Sabtu, 4 November 2017	08.00-09.00	Pengumpulan dan konsultasi RPP	<ul style="list-style-type: none"> • RPP yang telah disusun dikumpulkan kepada guru pamong PKn. • Mahasiswa PLT konsultasi mengenai RPP yang telah disusun, media apa yang digunakan serta soal evaluasi. 	
		09.00-13.00	Piket Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT. • Kegiatan tersebut berupa member cap pada buku pelajaran yang masih baru dan menjaga perpustakaan jika ada 	

				yang meminjam/ mengembalikan buku.	
44.	Senin, 6 November 2017	06.30-07.00	Salam pagi	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan dipintu gerbang SMA N 1 Pleret. • Melakukan salam kepada guru dan siswa SMA N 1 Pleret 	
		07.00-07.45	Upacara Bendera	<ul style="list-style-type: none"> • Upacara bejalan dengan lancar. • Upacara bendera diikuti oleh seluruh warga sekolah SMA N 1 Pleret • Upacara dilaksanakan di lapangan upacara SMA N 1 Pleret. • Kegiatan upacara berjalan dengan lancar. 	
		08.00-10.00	Membuat media pembelajaran untuk mengajar hari selasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini berupa mencari video tentang “hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah” dan membuat power point untuk mengajar. 	

		10.30-11.50	Pendampingan Praktik mandiri pembelajaran XI IPS 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilaksanakan di dalam kelas XI IPS 2 • Kegiatan pembelajaran diisi dengan mengerjakan soal-soal Ulangan Harian tentang masyarakat madani • Ulangann bersifat close book, bentuk soal pilihan ganda sebanyak 25 nomor <p style="text-align: center;">Kegiatan berjalan dengan lancar.</p>	
45.	Selasa, 7 November 2017	06.30-07.00	Salam Pagi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY dipintu Gerbang UNY SMA N 1 pleret • Kegiatan bertujuan untuk memberi salam senyum sapa kepada siswa-siswa dan guru-guru yang hendak masuk ke sekolah. 	
		07.00-08.30	Piket	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY • Kegiatan ini meliputi absensi siswa tiap kelas, back up presensi, dan mencatat administrasi siswa siswa yang ingin meninggalkan kelas dengan alasan izin, sakit dan sebagainya. • Mengisi untuk menggantikan guru yang berhalangan hadir. 	

		08.30-10.15	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPS 3	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas X IPS 3. • Mahasiswa PLT menjelaskan materi tentang “Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah” dengan power point . • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan. • Kegiatan berjalan dengan lancar 	
		10.15-13.30	Melanjutkan Piket	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY • Kegiatan ini meliputi absensi siswa tiap kelas, back up presensi, dan mencatat administrasi siswa siswa yang ingin meninggalkan kelas dengan alasan izin, sakit dan sebagainya. • Mengisi untuk menggantikan guru. 	

46.	Rabu, 8 November 2017	08.00-09.30	Konsultasi dan penilaian guru pamong tentang praktik mandiri yang telah dilakukan mahasiswa PLT UNY.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan dengan penilaian penampilan praktik mandiri apa saja yang kurang dan harus diperbaiki oleh mahasiswa PLT UNY 	
		12.10-13.30	Ulangan Harian PKn kelas X IPA 1.	<ul style="list-style-type: none"> • Ulangan Harian Bab 4 “Hubungan pemerintah pusat dan daerah”. • Siswa mengerjakan soal ulangan sebanyak 15 pilihan ganda dan 5 soal essay. • Ulangan berjalan dengan lancar. 	

47.	Kamis, 9 November 2017	08.00-10.00	Mengoreksi Soal Ulangan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan ini dilakukan guna mengetahui nilai yang di dapat siswa dari ulangan harian yang telah dilakukan apakah sudah mencapai KKM. 	
		10.00-11.30	Membuat analisis butir soal Ulangan Harian XI IPA 2	<ul style="list-style-type: none"> Anbuso dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaran atau kemudahan soal ulangan harian yang telah dibuat oleh mahasiswa PLT. 	
		12.00-13.30	Merekap Nilai Ulangan dan tugas	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan ini dilakukan guna merekap seluruh nilai ulangan harian dan tugas yang telah dilakukan. 	
48.	Jumat, 10November 2017	07.30-08.30	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPS 2.	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dilakukan di kelas X IPS 2. Mahasiswa PLT menjelaskan materi tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat” dengan power point . Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan Kegiatan berjalan dengan lancar. 	

		08.30-10.15	Praktik mandiri pembelajaran PKn di kelas X IPS 1.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan di kelas X IPS 3. • Mahasiswa PLT menjelaskan materi tentang “Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah”. • Kemudian siswa berkelompok dan mendiskusikan materi dan soal yang telah disediakan • Kegiatan berjalan dengan lancar. 	
49.	Sabtu, 11 November 2017	08.00-12.00	Mengoreksi dan merekap nilai seluruh tugas Siswa	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilakukan guna mengetahui seluruh nilai yang di dapat siswa dari tugas yang dikerjakan siswa. 	
50.	Senin, 13 November 2017	06.30-07.00	Salam Pagi	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan dipintu gerbang SMA N 1 Pleret. • Melakukan salam kepada guru dan siswa SMA N 1 Pleret 	

		07.00-07.45	Upaca Bendera	<ul style="list-style-type: none"> • Upacara bejalan dengan lancar. • Upacara bendera diikuti oleh seluruh warga sekolah SMA N 1 Pleret • Upacara dilaksanakan di lapangan upacara SMA N 1 Pleret. • Kegiatan upacara berjalan dengan lancar. 	
		08.00-11.30	Piket Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT. • Kegiatan tersebut berupa member cap pada buku pelajaran yang masih baru dan menjaga perpustakaan jika ada yang meminjam/ mengembalikan buku. 	
51.	Selasa, 14 November 2017	06.30-07.00	Salam Pagi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY dipintu Gerbang UNY SMA N 1 pleret • Kegiatan bertujuan untuk memberi salam senyum sapa kepada siswa-siswa dan guru-guru yang hendak masuk ke sekolah. 	

		07.30-08.30	Piket	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan oleh 4 mahasiswa PLT UNY • Kegiatan ini meliputi absensi siswa tiap kelas, back up presensi, dan mencatat administrasi siswa siswa yang ingin meninggalkan kelas dengan alasan izin, sakit dan sebagainya. • Mengisi untuk menggantikan guru yang berhalangan hadir. 	
		08.30-10.15	Ulangan Harian PKn kelas X IPS 3.	<ul style="list-style-type: none"> • Ulangan Harian Bab 4 “Hubungan pemerintah pusat dan daerah”. • Siswa mengerjakan soal ulangan sebanyak 15 pilihan ganda dan 5 soal essay. • Ulangan berjalan dengan lancar. 	
52.	Rabu, 15 November 2017	07.30-09.00	Penarikan mahasiswa PLT oleh DPL	<ul style="list-style-type: none"> • Di ikuti oleh 24 mahasiswa PLT UNY peserta DPL. • Disambut oleh Kepala Sekolah, Guru 	

				<p>pamong, dan kepala humas SMAN 1 Pleret.</p> <ul style="list-style-type: none">• kegiatan dilaksanakan di Aula SMA N 1 Pleret dengan lancar	
--	--	--	--	---	--

LAMPIRAN 20

DOKUMENTASI







